

**KAJIAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TERMINAL KAYU  
TERPADU SEBAGAI PENUNJANG KEBERLANGSUNGAN  
INDUSTRI KAYU DI JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh:

**JAMALUDIN MALIK**  
L4D006022



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**KAJIAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TERMINAL KAYU  
TERPADU SEBAGAI PENUNJANG KEBERLANGSUNGAN  
INDUSTRI KAYU DI JAWA TENGAH**

**TESIS**

**Oleh:**

**JAMALUDIN MALIK**  
L4D006022

**Pembimbing I**

Ir. Holi Bina Wijaya, MUM.

**Pembimbing II**

Wiwandari Handayani, ST. MT. MPS.



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**KAJIAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TERMINAL KAYU TERPADU  
SEBAGAI PENUNJANG KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI KAYU  
DI JAWA TENGAH**

Tesis Diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**JAMALUDIN MALIK**  
L4D006022

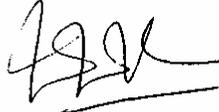
Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 22 September 2007

Dinyatakan Lulus

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Oktober 2007

**Pembimbing II**



**Wiwandari Handayani, ST. MT. MPS.**

**Pembimbing I**



**Ir. Holi Bina Wijaya, MUM.**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemukan duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang/institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik, dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang,      Oktober 2007

**JAMALUDIN MALIK**  
**NIM L4D006022**

*Nabi Muhammad SAW bersabda:  
"Seandainya kiamat terjadi,  
sementara di tanganmu ada bibit,  
jika (kamu) mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi,  
maka tanamlah".  
(HR. Ahmad)*



*Kepada istriku tercinta,  
Kepada ketiga buah hatiku: Annida, Farah & Hanan,  
Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan  
Seluruh pengorbanan ikhlas kalian.....*

## ABSTRAK

*Industri pengolahan kayu dan mebel (IPKM) Jawa Tengah saat ini menghadapi permasalahan kekurangan bahan baku kayu. Permasalahan ini mengakibatkan semakin sulitnya akses industri terutama industri kecil-menengah untuk mendapatkan bahan baku kayu. Di sisi lain masih diyakini bahwa pasokan bahan baku kayu masih cukup besar dan masalahnya adalah pada distribusi yang dikuasai oleh para pedagang kayu. Hal ini memunculkan ide untuk membangun terminal kayu. Mengingat biaya investasi untuk pembangunan terminal kayu sangat besar sedangkan akar permasalahan IPKM Jawa Tengah sesungguhnya belum diketahui, maka menarik untuk dikaji apakah terminal kayu memang dibutuhkan untuk dibangun sebagai sarana penunjang IPKM Jawa Tengah.*

*Kajian dilakukan melalui penelitian dengan metode deskriptif yang bersifat eksploratif melalui pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, baik sekunder maupun primer yang dilakukan dengan depth interview terhadap responden dengan kriteria tertentu yang dipilih secara purposive sampling. Analisis dilakukan terhadap aspek pasokan dan permintaan bahan baku kayu beserta permasalahannya, aspek distribusi, aspek fungsi terminal kayu dan kebijakan untuk melihat kemungkinan pembangunan terminal kayu yang dibandingkan dengan kebutuhannya menurut persepsi responden.*

*Berdasarkan analisis pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu diketahui bahwa apabila Terminal Kayu Terpadu (TKT) dibangun saat ini maka akan kesulitan untuk mendapatkan pasokan baik dari luar Jawa maupun impor karena di wilayah utama penghasil kayu pun mengalami defisit bahan baku kayu (BBK) sebesar 50 juta m<sup>3</sup>/tahun dan secara global defisit BBK mencapai > 740 juta m<sup>3</sup>/tahun. Dari analisis distribusi diketahui bahwa TKT berpotensi menambah biaya angkut dan mekanisme pergerakan kayu secara fisik juga tidak praktis kecuali terminal kayu satu lokasi dengan pelabuhan pendaratan. Jika jumlah sebaran IPHHK dipertimbangkan sebagai faktor utama arahan lokasi rencana pembangunan TKT maka rencana pembangunannya di Semarang kurang tepat karena daerah-daerah yang sangat tinggi atau tinggi jumlah unit IPHHK adalah Kab. Jepara atau Kab. Cilacap. Apabila TKT akan memfasilitasi industri yang menggunakan kayu dari hutan tanaman, maka rencana pembangunan terminal kayu di Semarang pun kurang tepat karena daerah yang paling tinggi industrinya menggunakan kayu dari hutan tanaman berdasarkan jumlah unit adalah Jepara, Cilacap dan Brebes. Sedangkan berdasarkan kapasitas produksinya, tiga daerah terbesar yang industri primernya menggunakan kayu tanaman adalah Temanggung, Banjarnegara dan Cilacap. Jika sebaran industri mebel sebagai arahan lokasi terminal kayu maka daerah dimana sebaran industri mebelnya dominan dapat dijadikan pertimbangan lokasi. Dalam hal ini sebaran klaster industri mebel layak dipertimbangkan sebagai arahan lokasi terminal kayu. Kota Semarang termasuk daerah yang memiliki klaster industri mebel, namun bukan yang utama. Mengacu pada peraturan yang ada (Permenhut No. 55 & 51/2006 dan Perpres No. 77/2007), peluang pembangunan dengan fungsi yang diharapkan yaitu dapat melayani pasokan sesuai kebutuhan, adalah sangat terbatas. Yang paling memungkinkan adalah terminal kayu sama fungsinya sebagai pedagang perantara. Secara finansial pembangunan TKT tidak ekonomis dan kurang menarik bagi perusahaan. Dengan demikian, saat ini pembangunan TKT tidak dibutuhkan.*

**Kata kunci: Terminal Kayu, Kebutuhan, Pasokan, Permintaan, Distribusi, Kebijakan**

## **ABSTRACT**

*Wood-working and furniture industries (WWFI) in Central Java are currently faced with raw material shortage. This situation has inflicted difficulty on related industries to gain access to wood raw material, particularly those of small and middle-scale entrepreneurs. In other hand, wood material supply is surely still adequate, but the problem arouses on its distribution which is greatly controlled by wood traders. This has spurred an idea to establish wood terminals. The fact that investment cost for that establishment is tremendously expensive, while the problem cores faced by the Central Java's WWFI is still known, then an idea occurs to assess whether or not wood-terminal establishment is indeed necessary as the supporting facilities for those Central Java's WWFI.*

*In relevant, the assessment was conducted using a descriptive method, employing explorative means in collecting the qualitative and quantitative data, either primary or secondary. Those data were collected through an in-depth interview with respondents who were previously selected through a purposive sampling. The analysis was performed on the supply and demand aspects of wood raw material with the scrutiny on problems, distribution characteristics, function aspects in wood terminals, and related policies to look into the possibility of wood-terminal establishment compared with its requirements that corresponded to the respondent perception.*

*Based on the analysis results about the supply and demand of wood materials, it found out that if integrated wood terminals (IWT) were to be built on this occasion, then difficulty that might occur was to procure the wood supply from outside Java as well as from import. This is because the main wood-producing region encountered a deficit in the available wood raw material as much as 50 million m<sup>3</sup>/year or globally over 740 million m<sup>3</sup>/year. Results of distribution analysis revealed that IWT could potentially increase transportation cost, and also physical movement mechanisms seemed impractical unless the IWT shared with the landing port in one location. If the distribution number of primary wood-processing industries (PWPI) were considered as a main guiding factor of IWT's establishment plan, then the plan located in Semarang would seem inappropriate. The reason was that regions with numerous PWPI are in Jepara or Cilacap regencies. If the IWT wanted to facilitate industries that use wood materials from plantation forest (PF), then the establishment plan in Semarang would not be appropriate either because the region where the PWPI consumes the greatest amounts of wood materials from PF based on number of units are situated in Jepara, Cilacap, and Brebes. Meanwhile, based on production capacity, the region where the PWPI consumes wood from the PF the greatest are in Temanggung, Banjarnegara, and Cilacap. Further, if the distribution of furniture industries were used as location guides, then the regions with the dominant distribution of those industries could be considered as the IWT location. Semarang belongs to a region that has the cluster of furniture industries, despite not being the main. Referring to the current regulations (Ministry of Forestry Decree No. 55 and 51/2006 and Presidential Law No. 77/2007), the chance of establishment with the expected function able to deal with the wood supply that corresponded to its demand is very limited. The establishment with the most likely is the IWT which have the similar function to the intermediary traders. To sum up, the IWT establishment is financially not economic and not interesting. Therefore, its establishment currently is not needed.*

**Keywords: Integrated Wood Terminal, Demand, Supply, Distribution, and Policy.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Tesis yang berjudul “Kajian Kebutuhan Pembangunan Terminal Kayu Terpadu Sebagai Penunjang Keberlangsungan Industri Kayu Di Jawa Tengah”, dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembangunan industri kehutanan pada umumnya dan industri kayu Jawa Tengah pada khususnya. Di samping itu, semoga bermanfaat bagi berbagai pihak yang bermaksud mengembangkan atau mempelajari program pembangunan industri kayu. Atas terselesainya Tesis ini, disampaikan terima kasih kepada:

1. Kepala Bappenas c.q Kapus Bindiklatren yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh studi di MTPWK UNDIP.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Bapak Dr. Ir. Boen M. Purnama, M.Sc. atas nama Menteri Kehutanan telah memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar.
3. Ketua Program Studi MTPWK UNDIP, Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA.
4. Bapak Ir. Holi Bina Wijaya, MUM, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan sejak pra-tesis, selama penelitian hingga selesainya Tesis ini.
5. Ibu Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan ide, arahan dan masukan sejak pra-tesis, selama penelitian hingga selesainya Tesis ini.
6. Ibu Maya Damayanti, ST, MA selaku Penguji I, atas masukannya dalam pembahasan dan ujian Tesis.
7. Bapak PM Broto Sunaryo, SE, MSP selaku Penguji II, atas masukannya dalam ujian Tesis.
8. Kepala Pusat Penelitian Hasil Hutan, Bogor, Bapak Dr. Ir. Maman Mansyur Idris, MS dan Sekretaris Badan Litbang Kehutanan, Bapak Dr. Ir. Agus Sarsito, M.Sc yang telah memberikan dukungan untuk melaksanakan tugas belajar.
9. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Subdinas Tertib Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Bapak Ir. A. Shodiq Purnomo beserta Bapak Ir. Hadi Iriatno, MM dan Ibu Ir. Windarti, MM atas data dan informasinya.
10. Kepala Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Semarang, Bapak Ir. Budi Winarno beserta staf, Kepala Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah, Bapak Suprpto, SE, MM, Kepala Seksi Industri Pertambangan dan Energi Bappeda Propinsi Jawa Tengah, Bapak Ir. Hendro Pratomo atas data dan informasinya.

11. Ketua Masyarakat Industri Kehutanan (MIK) Jawa Tengah, Bapak Ir. Yakub Firdaus, Ketua ASMINDO Jawa Tengah Bapak Ir. Angoro Ratmodiputro, Ketua Kompartemen Industri Kehutanan Kadin Jawa Tengah Bapak Ir. H. Wirodadi Suprayogo, dan Ketua Tim Klaster Mebel Dinas Perindustrian Jawa Tengah Bapak Ir. Budi Nur Prasetyo, M.Si atas dukungan data dan informasinya.
12. Kepala Seksi Pemasaran Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Bapak Ir. Teddy, MSi dan Kepala Seksi Analisa Evaluasi Industri & Bisnis Bapak H.M. Sakdun Managing Director PT Jati Luhur Agung Bapak Usman Harjanto, Pimpinan PT Hartco Utama, Accounting Dept. CV Dyan Indra Wijaya Bapak Davey D. Mulia, Pimpinan CV Rejaya Mebel Bapak Ahmad Muslim, ST, Pimpinan CV Andewa Bapak Djarwinto, dan Bapak Marmosuwito atas data, informasi dan diskusinya.
13. Bapak Dr. Ir. Dede Hermawan, M.Sc atas dukungan data dan informasinya.
14. Bapak Prof. Dr. Ir. Osly Rachman, Bapak Ir. Jamal Balfas, M.Sc, Bapak Dr. Adi Santoso, M.Si beserta rekan-rekan di Pusat Litbang Hasil Hutan Bogor atas dorongan semangatnya.
15. Rekan-rekan Kelas Bappenas-3 atas segala bantuan dan dukungannya hingga selesainya studi MTPWK.
16. Istriku Hj. Ratih T. Rentjani, SS dan ketiga anakku tercinta: Annida, Farah dan Hanan, atas dukungan semangat dan pengorbanannya.
17. Yang terhormat kedua orang tua Penulis, Bapak Amin Al Aman dan Ibu Erah, yang selalu memberikan semangat dan do'anya.
18. Yang terhormat kedua mertua Penulis, Bapak H.M. Muhadi dan Ibu Hj. Susiah, atas bantuan dan dukungannya.
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil yang tidak dapat disebut satu per satu.

Dengan segala keterbatasan, Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, segala saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan bagi perbaikan karya penulis di masa yang akan datang.

Semarang, Oktober 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah dan <i>Research Question</i> .....	5
1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian .....	7
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial .....	7
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial .....	8
1.5. Posisi dan Keaslian Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Pemikiran .....	11
1.7. Metodologi Penelitian.....	13
1.7.1. Pendekatan .....	13
1.7.1.1. Metode Penelitian .....	13
1.7.1.2. Tahapan Penelitian.....	14
1.7.2. Metode Analisis .....	15
1.7.2.1. Lingkup Analisis Substansial.....	15
1.7.2.2. Pengolahan Data .....	17
1.7.2.3. Analisis Data.....	17
1.7.2.4. Kerangka Analisis.....	18
1.7.3. Kebutuhan data .....	20
1.7.3.1. Jenis Data dan Variabel.....	20
1.7.3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	20
<b>BAB II    INDUSTRIALISASI, PERAN INDUSTRI KAYU DAN           KEBUTUHAN TERMINAL KAYU .....</b>	<b>23</b>
2.1. Proses Industrialisasi di Indonesia.....	23
2.2. Industri dan Pembangunan Wilayah .....	24
2.3. Industri Kayu .....	25
2.3.1. Posisi Industri Kayu dalam Bangun Sektor Industri Indonesia.....	26

2.3.2.	Kaitan ke Depan dan ke Belakang Dalam Industri Kayu serta Rantai Pasokan Dalam Industri Kayu ..	28
2.3.3.	Skala Industri .....	33
2.4.	Guna Lahan, Transportasi dan Terminal Kayu.....	33
2.4.1.	Guna Lahan dan Transportasi.....	33
2.4.2.	Terminal Kayu.....	36
2.5.	Pasokan dan Permintaan Kayu .....	41
2.6.	Sistem Distribusi.....	43
2.7.	Kebijakan .....	44
2.8.	Sintesis Kajian Literatur .....	45

<b>BAB III.</b>	<b>KARAKTERISTIK INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DAN MEBEL JAWA TENGAH.....</b>	<b>47</b>
3.1.	Hutan Sebagai Sumber Bahan Baku Kayu Jawa Tengah....	47
3.2.	Bahan Baku Kayu Bagi Industri .....	47
3.3.	Industri Pengolahan Kayu Jawa Tengah .....	50
3.3.1.	Sebaran Industri .....	50
3.3.2.	Proses Pengolahan Kayu di Industri .....	52
3.4.	Sebaran Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dan Jaraknya terhadap Kota Semarang .....	55
3.5.	Peran Industri Kayu dan Institusi Terkait Industri Kayu di Jawa Tengah.....	56
3.5.1.	Peran Industri Kayu Berdasarkan PDRB .....	56
3.5.2.	Institusi Terkait .....	58
3.6.	Permasalahan IPKM Jawa Tengah dan Terminal Kayu .....	58
3.6.1.	Permasalahan IPKM dan Usulan Solusinya.....	58
3.6.2.	Rencana Pembangunan Terminal Kayu .....	60

<b>BAB IV.</b>	<b>ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TERMINAL KAYU TERPADU DI JAWA TENGAH .....</b>	<b>63</b>
4.1.	Pasokan dan Kebutuhan Bahan Baku Kayu.....	63
4.1.1.	Kurangnya Pasokan Sebagai Masalah Utama IPKM.....	63
4.1.2.	Situasi Pasokan Kayu Regional, Nasional dan Global.....	69
4.2.	Analisis Distribusi Bahan Baku Kayu.....	76
4.2.1.	Faktor Biaya Angkut .....	76
4.2.2.	Distribusi Jumlah Unit IPHHK .....	78
4.2.3.	Distribusi IPHHK Berdasarkan Penggunaan Bahan Baku .....	80
4.2.4.	Saluran Distribusi Kayu .....	89
4.3.	Fungsi dan Kelembagaan Terminal Kayu.....	94
4.4.	Analisis Kebijakan .....	99

4.4.1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 55 dan No. 51 Tahun 2006.....	99
4.4.2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 .....	104
4.5. Kebutuhan Terminal Kayu .....	106
4.6. Sintesis Terhadap Hasil Analisis.....	112
4.6.1. Kayu Dalam Mekanisme Pasar .....	112
4.6.2. Terminal Kayu Dalam Sistem Distribusi .....	113
4.6.3. Manajemen Rantai Pasokan .....	114
4.6.4. Restrukturisasi Industri Kehutanan .....	116
4.6.5. Pengembangan IPKM .....	117
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>120</b>
5.1. Kesimpulan .....	120
5.2. Rekomendasi .....	121
5.3. Keterbatasan Penelitian .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	123
LAMPIRAN.....	129

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1.	Identifikasi Variabel, Kebutuhan, Kegunaan dan Sumber Data .....	21
TABEL I.2.	Daftar dan Karakteristik Responden .....	22
TABEL II.1.	Hubungan Antara Kaitan Ke Depan dan Ke Belakang Agroindustri .....	31
TABEL II.2.	Sintesis Aspek Kajian dan Variabel .....	46
TABEL III.1.	Volume Kayu Bulat yang Beredar di Jawa Tengah .....	49
TABEL III.2.	Jumlah IPHHK Menurut Kapasitas Produksi Per Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 .....	51
TABEL III.3.	Kabupaten/Kota Utama Industri Mebel Jawa Tengah .....	52
TABEL III.4.	Jarak Semarang Ke Kota-kota Lain Di Jawa Tengah .....	57
TABEL III.5.	Permasalahan Umum IPKM Jawa Tengah .....	59
TABEL IV.1.	Situasi Kayu Bulat Dunia Tahun 2002-2006 (x1000 m3) .....	74
TABEL IV.2.	Jumlah IPHHK Menurut Jenis Industri dan bahan Baku Per Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 .....	81
TABEL IV.3.	Fungsi Terminal Kayu terpadu Dalam Rancangan Pembangunan .....	96
TABEL IV.4.	Analisis Rencana Fungsi Terminal Kayu terpadu .....	98
TABEL IV.5.	Fungsi Terminal Kayu Terpadu Hasil Analsis .....	99
TABEL IV.6.	Kelayakan/Kebutuhan Terminal Kayu dari Berbagai Aspek .....	110
TABEL IV.7.	Karakteristik Kayu Sebagai Barang Privat .....	113
TABEL IV.8.	Pertimbangan Positif dan Negatif Pembangunan Terminal .....	117

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1.	Nilai Eskpor & PDB Hasil Hutan Kayu Nasional Sampai Tahun 2003 .....	2
GAMBAR 1.2.	Peta Administrasi Propinsi Jawa Tengah Sebagai Wilayah Studi .....	9
GAMBAR 1.3.	Posisi Penelitian.....	11
GAMBAR 1.4.	Kerangka Pemikiran Kajian .....	12
GAMBAR 1.5.	Kerangka Analisis Kebutuhan Terminal Kayu.....	19
GAMBAR 2.1.	Kaitan Utama Suatu Industri Dengan Kegiatan Lain .....	29
GAMBAR 2.2.	Kaitan Utama Industri Kayu Dengan Kegiatan Lain .....	30
GAMBAR 2.3.	Kerangka Tindak Dalam Manajemen Rantai Pasokan.....	32
GAMBAR 2.4.	Siklus Hubungan Transportasi Dengan Penggunaan Lahan .....	34
GAMBAR 2.5.	Sistem Jaringan Distribusi Barang .....	43
GAMBAR 3.1.	Komposisi Jumlah IPHHK Jawa Tengah 2006 Berdasarkan Skala Industrinya .....	48
GAMBAR 3.2.	Garis Besar Proses Di Industrinya Pengolahan Kayu .....	51
GAMBAR 3.3.	PDRB Sektor Kehutanan Jawa Tengah Lima Tahun Terakhir .....	52
GAMBAR 4.1.	Prioritas Permasalahan Industri Pengolahan Kayu dan Mebel Jawa Tengah.....	63
GAMBAR 4.2.	Prioritas Solusi Parsial IPKM Jawa Tengah.....	66
GAMBAR 4.3.	Volume Peredaran Kayu Jawa Tengah Tahun 2002-2006	69
GAMBAR 4.4.	Kesenjangan Antara Pasokan Dengan Kebutuhan Baha0 Baku Kayu Bagi IPHHK Jawa Tengah Tahun 2006 .....	70
GAMBAR 4.5.	Defisit Kebutuhan Bahan Baku Kayu di Wilayah Penghasil Kayu Utama .....	73
GAMBAR 4.6.	Pengaruh Terminal Kayu Terhadap Biaya Angkut .....	77
GAMBAR 4.7.	Peta Sebaran Jumlah IPHHK Jawa Tengah.....	79
GAMBAR 4.8.	Komposisi Kayu yang Beredar di Jawa Tengah.....	82
GAMBAR 4.9.	Peta Sebaran Jumlah IPHHK Berdasarkan Bahan Baku di Jawa Tengah .....	86

GAMBAR 4.10.	Peta Sebaran Kapasitas Industri Berdasarkan Bahan Baku di Jawa Tengah.....	87
GAMBAR 4.11.	Peta Sebaran Klaster Industri Mebel Jawa Tengah .....	88
GAMBAR 4.12.	Bagan Distribusi Kayu Jawa Tengah Tanpa Terminal Kayu Terpadu ( <i>Existing</i> ) .....	90
GAMBAR 4.13.	Bagan Distribusi Kayu Jawa Tengah Dengan Terminal Kayu Terpadu .....	91
GAMBAR 4.14.	Sistem Peredaran dan Dokumen Angkutan Kayu Menurut P.55 dan P.51 .....	102
GAMBAR 4.15.	Pendapat Responden tentang Kebutuhan Terminal Kayu Terpadu.....	106
GAMBAR 4.16.	Hubungan Antara Fungsi Terminal Kayu Dalam Sistem Distribusi Barang Dan Kebijakan Peredaran Hasil Hutan Kayu .....	114

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	Solusi Terhadap Permasalahan Umum IPKM Jawa Tengah Menurut Responden.....	129
LAMPIRAN 2.	Kapasitas Industri, Kebutuhan dan Neraca Bahan Baku Kayu Per Propinsi Seluruh Indonesia Tahun 2004.....	130
LAMPIRAN 3.	Pasokan Kayu Propinsi Jawa Tengah .....	132
LAMPIRAN 4.	Jumlah IPHHK Berdasarkan Kapasitas, Bahan Baku dan Volume Kayu di Jawa Tengah Tahun 2006 .....	133
LAMPIRAN 5.	Data Potensi Industri Mebel Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah .....	135
LAMPIRAN 6.	Pengukuran Skala Prioritas Permasalahan IPKM Jawa Tengah .....	138
LAMPIRAN 7.	Penghitungan Tingkat Kebutuhan Terminal Kayu Terpadu Berdasarkan Pendapat Responmden .....	139
LAMPIRAN 8.	Pendapat dan Alasan Responden tentang Kebutuhan Terminal Kayu Terpadu .....	140
LAMPIRAN 9.	Kesesuaian Lokasi Terminal Layu Berdasarkan Sebaran Industrinya. ....	142

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

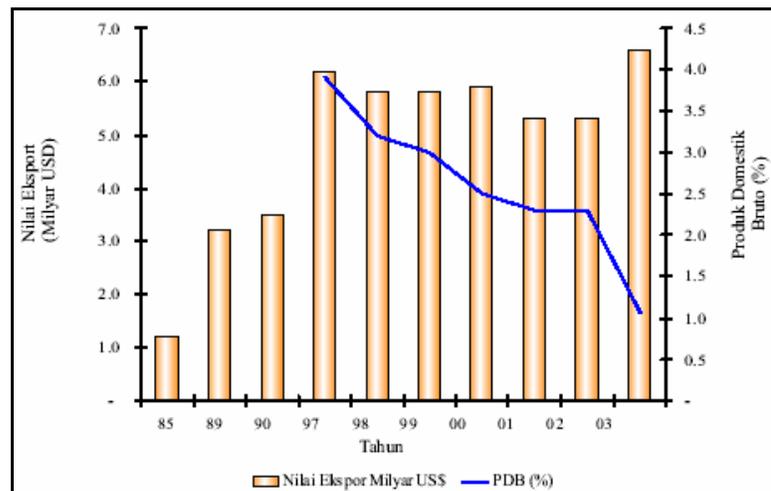
### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan wilayah dapat direpresentasikan eksistensi sektor dan biasanya suatu wilayah yang memiliki keuntungan lokasi (*location economies*) akan menjadi pusat pertumbuhan (Adisasmita, 2005: 33). Kemampuan inti wilayah untuk menyebarkan pertumbuhan tersebut tergantung pada *multiplier effect* yang berhubungan dengan faktor-faktor *input-output* dari inti tersebut. Adanya industri yang bertujuan menyediakan barang dan jasa, menyebabkan timbulnya aktivitas ekonomi dan penyebaran pertumbuhan. Hingga saat ini pengembangan industri Indonesia masih dalam tahap awal, namun diyakini bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang besar untuk mengembangkan industrinya yang berdaya saing kuat dengan berbagai peluangnya, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor (Sastrosunarto, 2006: 11).

Dalam konteks industrialisasi di Indonesia, industri kayu memiliki peluang untuk dapat dikembangkan, mengingat Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa tersedianya lahan yang luas untuk menyediakan bahan baku kayu sebagai sumber daya alam dari hutan tanaman. Industri kayu mempunyai potensi yang kuat dari sisi *internal supply* serta sebagai salah satu unsur dalam pilar industri agro. Namun demikian, perlu diingat bahwa ketersediaan sumberdaya alam seringkali terbatas meskipun sumber daya tersebut termasuk yang dapat diperbaharui. Clawson & Sedjo (1982) mengingatkan bahwa ketersediaan sumber daya hutan dan jaminan manfaat jangka panjang tergantung pada tindakan saat ini dan yang akan datang.

Permasalahan utama industri perikanan adalah terjadinya penurunan produksi kayu, sehingga terjadi kekurangan pasokan bahan baku bagi industri. Akibat kesenjangan *supply* dan *demand* yang paling ekstrim adalah berhentinya operasi industri kayu.

Dampak terjadinya penurunan pasokan terhadap ekonomi nasional dapat dilihat dari adanya kecenderungan menurunnya kontribusi kehutanan yang tercermin dari menurunnya nilai PDB sektor kehutanan (Gambar I.1). Departemen Perindustrian (2005) juga mencatat, bahwa penurunan ekspor barang-barang kayu pada periode tahun 2001 – 2005 sebesar 1,7%.



Sumber: SMCP-GTZ (2004) dan BPS (2005) dalam Dephut (2006)

**GAMBAR I.1.**  
**NILAI EKSPOR DAN PDB PRODUK KAYU NASIONAL**  
**SAMPAI TAHUN 2003**

Sementara terjadi penurunan peranannya saat ini, industri perikanan tetap menjadi salah satu komponen pilar industri dalam bangun industri Indonesia di masa mendatang. Hasil analisis pengukuran daya saing terhadap industri yang

sudah berkembang di Indonesia yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (2005) menempatkan industri kayu dan mebel/furnitur termasuk kelompok industri padat sumber daya alam yang prospektif dan terus akan dikembangkan di masa mendatang serta berpotensi ekspor.

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pusat industri kayu nasional, khususnya mebel. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, produk industri permebelan di Jawa Tengah untuk ekspor meningkat, tetapi pertumbuhannya menurun. Menurut data dari Masyarakat Industri Kehutanan (MIK) Jawa Tengah (2006), kontribusi ekspor produk mebel pada tahun 2000 sebesar 34,33% dari total nilai ekspor produk kayu olahan dan mebel nasional dan pada tahun 2004, yang kontribusinya menurun menjadi 18,50%. Selanjutnya MIK (2006) menyatakan bahwa industri pengolahan kayu khususnya produk pengerjaan kayu (*wood working*) dan mebel di Jawa Tengah membutuhkan bahan baku kayu sebesar 2 juta m<sup>3</sup>/tahun (di luar kebutuhan industri primer). Angka tersebut sebenarnya dapat tercukupi dari potensi pasokan bahan baku kayu yang ada di Jawa Tengah yang jumlahnya sekitar 2,5 juta m<sup>3</sup>/tahun. Jumlah pasokan tersebut berasal dari Perhutani sebesar 0,5 juta m<sup>3</sup>, dari hutan rakyat 1,0 juta m<sup>3</sup> dan dari luar Jawa sebesar 1,5 juta m<sup>3</sup>. Namun pada kenyataannya, banyak industri yang kekurangan bahan baku kayu sehingga bekerja di bawah kapasitasnya bahkan ada yang menghentikan operasinya.

Fenomena tersebut diduga karena adanya permasalahan dalam mekanisme pasokan dan permintaan atau sistem distribusi bahan baku kayu. Dari sudut pandang lain, industri memiliki kelemahan akses ke sumber bahan baku kayu atau bahan baku kayu lebih banyak digunakan untuk produk lain. Pada kondisi demikian, sampai saat ini belum ada pengaturan sistem distribusi bahan baku kayu

secara terpadu yang memberikan jaminan bahan baku untuk keberlangsungan industri. Di sisi lain, maraknya *illegal logging* (penebangan liar) dan *illegal trading* (perdagangan kayu liar) sampai saat ini belum dapat dituntaskan (MIK, 2006).

Meskipun menghadapi situasi sulitnya bahan baku, industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah masih dianggap prospektif. Sebagai contoh, di kawasan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga dan Purwodadi), industri kayu termasuk di antara 19 proyek investasi yang dipromosikan dalam Semarang Business Forum (Sembiz) dengan total nilai investai Rp 3,2 triliun (Kompas, 2007a).

Masih prospektifnya industri perkayuan di Jawa Tengah memerlukan dukungan solusi mendesak untuk mengatasi ketidaksinkronan antara kebutuhan dengan penyediaan bahan baku kayu, sehingga industri kayu dapat terjamin keberlangsungannya dan kontribusi sektor tersebut pada pendapatan Jawa Tengah dapat kembali ditingkatkan. Salah satu usulan yang dikemukakan para pihak terkait industri pengolahan kayu dan mebel (IPKM<sup>1</sup>) di Jawa Tengah adalah perlunya membangun terminal kayu terpadu yang diperkirakan dapat memecahkan persoalan tersebut.

Keberadaan terminal kayu terpadu di Jawa Tengah dirasakan pentingnya mengingat prasarana tersebut akan berfungsi melayani kebutuhan pasokan bahan baku bagi industri kayu di Jawa Tengah terutama industri kecil-menengah (IKM), memberikan kepastian dan kemudahan industri untuk memperoleh bahan baku legal serta akan mengefisienkan tata niaga kayu. Adapun kegiatan dan manfaat yang akan tercakup dalam terminal kayu tersebut antara lain penjualan *log* (kayu

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya dalam tesis ini industri pengolahan kayu dan mebel disingkat IPKM

bulat) langsung, penjualan *sawn timber* (kayu gergajian), penjualan jasa *sawmill* (penggergajian), penjualan jasa *kiln drying* (pengeringan kayu), penjualan langsung ke pengguna/masyarakat umum, jasa pengiriman/distribusi/transportasi serta pengurusan berbagai dokumen kayu (SKSHH, FA-KB dan FA-KO) (MIK, 2007).

Dibangunnya terminal kayu terpadu (*wood center*) akan menjadi pusat layanan baru bagi masyarakat khususnya kalangan industri kayu yang akan memberikan pengaruh positif baik dalam kaitan ke depan maupun ke belakangnya (*forward and backward linkages*). Secara spasial, pusat layanan tersebut akan melayani aktivitas pasokan dan permintaan kayu wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, kajian terhadap terminal kayu terpadu menarik untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana fasilitas tersebut dibutuhkan guna menunjang keberlangsungan industri kayu di Jawa Tengah. Terjaminnya keberlangsungan industri kayu berarti akan mempertahankan kontribusi sub sektor ini terhadap pembangunan wilayah. Menurut Dwiprabowo (2004), kebijakan pengembangan industri pengolahan hasil hutan selama ini cenderung untuk melihat perkembangan industri dari perspektif nasional atau makro, sedangkan aspek pengembangan secara kewilayahan (regional) kurang tersentuh. Kebijakan pengembangan industri dalam perspektif kewilayahan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keunggulan suatu wilayah baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

## **1.2 Perumusan Masalah dan *Research Question***

Berdasarkan uraian pada Sub Bab 1.1. maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian ini, yaitu:

- a. Persoalan yang dihadapi IPKM Jawa Tengah adalah ketimpangan antara pasokan dengan kebutuhan bahan baku kayu oleh industri. Oleh karena itu perlu dianalisis variabel-variabel dalam aspek pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu di Jawa Tengah.
- b. Masalah ketimpangan pasokan dapat ditimbulkan oleh mekanisme atau sistem distribusi bahan baku kayu kepada industri dengan asumsi produksi kayu melimpah. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang terlibat dalam mekanisme atau sistem distribusi bahan baku kayu dan kebijakan terkait dengan sistem tersebut.
- c. Kedua permasalahan tersebut (butir a dan b) memerlukan solusi berupa pembangunan terminal kayu terpadu. Namun terhadap solusi tersebut belum dilakukan kajian ilmiahnya.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa industri pengolahan kayu Jawa Tengah membutuhkan fasilitas pengumpulan, pendistribusian dan tata niaga bahan baku kayu. Usulan yang dikemukakan para pihak terkait IPKM Jawa Tengah untuk membangun terminal kayu, merupakan alternatif solusi yang memerlukan pengkajian mendalam karena selain memerlukan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur tersebut, juga harus dapat menjawab apakah pembangunan terminal kayu merupakan alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan bahan baku bagi industri kayu di Jawa Tengah saat ini. Oleh karena itu *Research Question* yang dikemukakan dalam studi ini adalah: *Apakah pembangunan terminal kayu dibutuhkan keberadaannya sebagai alternatif solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan IPKM di Jawa Tengah?*

### **1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan pembangunan terminal kayu terpadu sebagai fasilitas penunjang keberlangsungan IPKM di Jawa Tengah. Adapun sasarannya adalah:

- a. Mengetahui tingkat pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu.
- b. Mengetahui sebaran dan kapasitas industri serta kebutuhan bahan baku kayu sebagai pertimbangan arahan lokasi terminal kayu.
- c. Mengetahui mekanisme atau sistem distribusi bahan baku kayu dari sumber pasokan ke industri tanpa dan dengan terminal kayu terpadu.
- d. Mengetahui fungsi terminal kayu terpadu.
- e. Mengetahui kebijakan terkait peredaran dan industri kayu.
- f. Mengetahui kebutuhan dibangunnya terminal kayu terpadu.

Secara umum kajian ini akan bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam produksi dan peredaran bahan baku kayu serta para *stakeholders* IPKM (produsen, pedagang dan pengguna bahan baku kayu) dalam membuat rencana produksi, distribusi dan pemanfaatan bahan baku kayu bagi industri di Jawa Tengah.

### **1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansial**

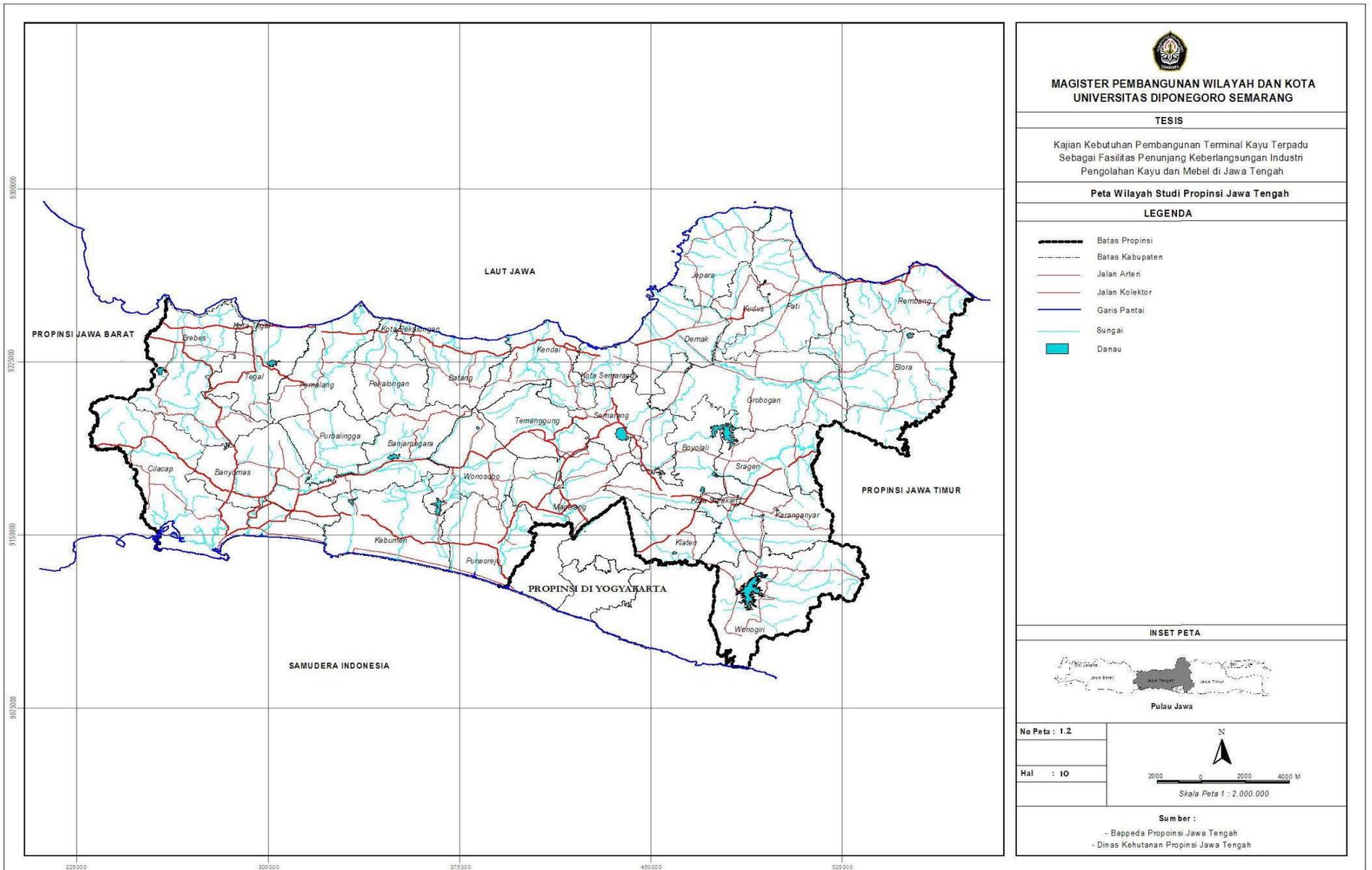
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada Sub Bab 1.1. dan 1.2., maka substansi penelitian ini adalah kajian terhadap kebutuhan dibangunnya terminal kayu sebagai fasilitas penunjang keberlangsungan IPKM di Jawa Tengah. Adapun lingkup kajian yang akan menjadi pijakan kebutuhan tersebut mencakup analisis terhadap:

- a. Pasokan bahan baku kayu dari sumber-sumber produksi (Perhutani, hutan rakyat dan kayu dari luar Jawa).
- b. Besaran kebutuhan bahan baku kayu bagi IPKM Jawa Tengah.
- c. Peredaran (sistem distribusi) bahan baku kayu dari pemasok kepada industri.
- d. Fungsi terminal kayu menurut konsep yang dikemukakan para penggagas dan kemungkinannya berdasarkan kebijakan yang ada.
- e. Kebijakan terkait dengan aspek pasokan dan distribusi bahan baku serta industri kayu.
- f. Kebutuhan pembangunan terminal kayu terpadu berdasarkan pendapat responden dan berdasarkan data.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek-aspek tersebut dapat diketahui sejauh mana terminal kayu terpadu dibutuhkan pembangunannya sebagai fasilitas penunjang keberlangsungan IPKM di Jawa Tengah saat ini.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**

Ruang lingkup spasial penelitian ini bersifat makro karena kajian mencakup wilayah Jawa Tengah untuk melihat: (1) sisi penyediaan bahan baku kayu yang terdiri dari sebaran pasokan serta sistem distribusi bahan baku kayu dan peta distribusi bahan baku kayu bagi industri; dan (2) sisi kebutuhan bahan baku dan sebaran industrinya. Industri pengolahan kayu Jawa Tengah terutama industri mebel telah lama eksis, produknya menjadi unggulan dan ciri khas wilayah serta memberikan kontribusi dalam pembangunan. Sedangkan ruang lingkup spasial mikronya adalah rencana lokasi dibangunnya terminal kayu sebagai *pilot project*, yaitu di sekitar Kota Semarang. Peta administrasi Jawa Tengah disajikan pada Gambar I.2.



Dipilihnya Kota Semarang sebagai lokasi kajian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Semarang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah yang memiliki sarana prasarana penunjang industri; (2) Aktivitas impor bahan baku kayu dan ekspor produk kayu olahan dilaksanakan dari Semarang; dan (3) Sebagian besar responden level Jawa Tengah berkedudukan di Semarang.

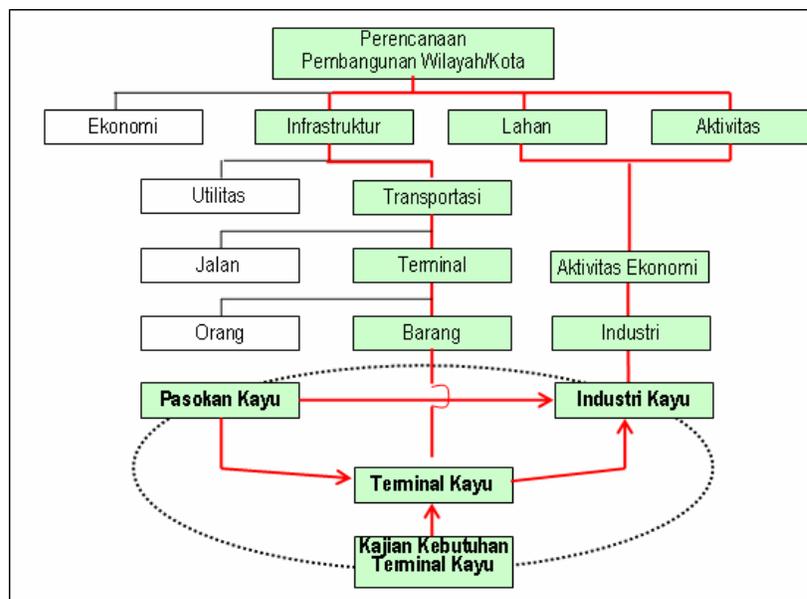
### **1.5 Posisi dan Keaslian Penelitian**

Isu pembangunan terminal kayu pernah muncul dan menjadi topik dalam berbagai diskusi industri per kayu di Indonesia sejak akhir tahun 70-an sampai awal tahun 80-an antara lain dikemukakan oleh Soerjohadikoesoemo (1980), Indonesian Sawmillers Association (1980) dan APKINDO (1981). Pemerintah pun pernah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu. Pada saat itu, produksi kayu hutan alam Indonesia masih dalam puncak produksinya dan kayu bulat (log) pun menjadi salah satu komoditas ekspor.

Saat ini, isu pembangunan terminal kayu muncul kembali tetapi pada kondisi yang berbeda dimana produksi kayu semakin menurun dan terjadi defisit bahan baku kayu bagi industri yang cukup besar. Hal tersebut menambah menarik untuk dikaji karena isu tersebut terus bergulir di Jawa Tengah, namun belum ada realisasinya sehingga mendorong untuk dilakukan penelitian, apakah terminal kayu merupakan solusi terhadap permasalahan IPKM Jawa Tengah dan sejauh mana kebutuhan dibangunnya fasilitas tersebut.

Dalam sistem perencanaan pembangunan wilayah dan kota, terminal merupakan bagian dari infrastruktur wilayah/kota dan terminal kayu termasuk jenis terminal barang. Sehingga posisi penelitian berada dalam domain

perencanaan pembangunan wilayah/kota dapat dilihat pada Gambar 1.3. Studi tentang sistem dan jaringan transportasi serta terminal angkutan umum di suatu wilayah/kota secara umum telah dilakukan antara lain oleh Mustafa (2003), Kanisah (2003) dan Muradi (2006). Adapun kajian mengenai kebutuhan terminal kayu belum banyak dilakukan. Tahun 2006, Direktorat Jenderal Industri Kimia dan Agro, Departemen Perindustrian melakukan studi Penyusunan Rancangan Terminal Kayu Jawa Tengah. Dalam laporannya, studi tersebut tidak melakukan kajian mengenai kebutuhan terminal kayu.

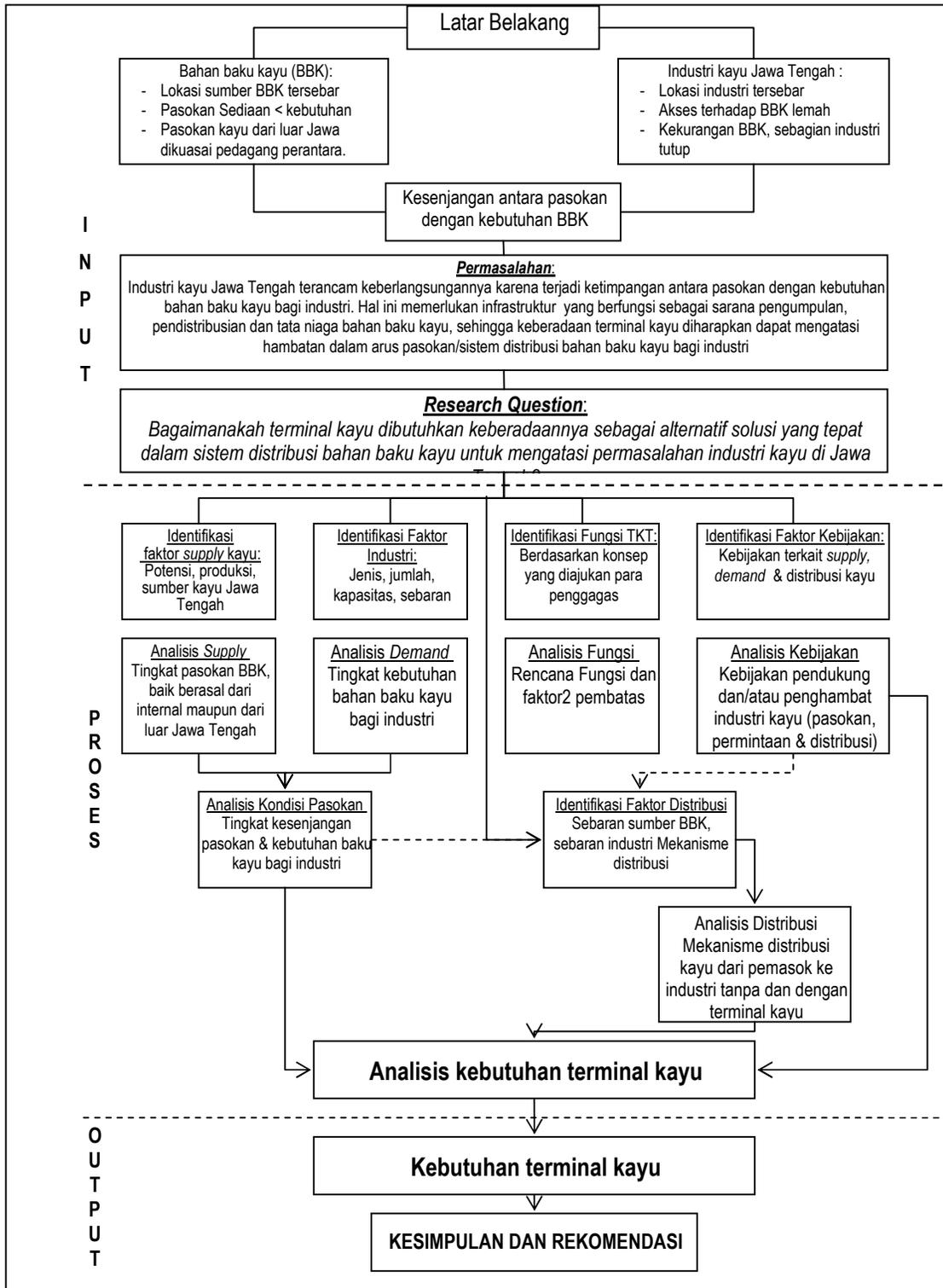


Sumber: Hasil analisis (2007)

**GAMBAR 1.3**  
**POSISI PENELITIAN**

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan/sasaran dan ruang lingkup serta posisi penelitian sebagaimana telah diuraikan di muka maka penelitian ini berpijak pada kerangka pemikiran seperti dalam Gambar 1.4.



Sumber: Analisis Peneliti (2007)

**GAMBAR 1.4**  
**KERANGKA PEMIKIRAN KAJIAN**

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan**

#### **1.7.1.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini bertolak dari kondisi empiris yaitu adanya permasalahan bahan baku kayu bagi IPKM terutama industri kecil dan menengah di wilayah Jawa Tengah. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak terkait berencana untuk membangun terminal kayu terpadu di Semarang. Untuk menemukan jawaban apakah pembangunan terminal kayu merupakan solusi bagi kelangsungan industri maka dilakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

Metode penelitian yang sesuai digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sudjarwo (2001: 51), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berpola penggambaran apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data, terlepas apakah data itu kualitatif ataupun kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Wirartha (2006: 155) menyatakan bahwa penelitian deskriptif menuturkan dan mentafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, sikap dan pandangan yang menggejala saat sekarang, hubungan antar variabel pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, pertentangan yang terjadi adalah antara yang membutuhkan dan data hasil analisis yang menunjukkan tidak dibutuhkannya pembangunan terminal kayu.

Keunggulan metode tersebut adalah dapat mengumpulkan data yang bernilai statistik, melukiskan keadaan suatu objek pada suatu saat tertentu, mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa, menemukan data yang menunjukkan *appearance* dari suatu realitas, dan

mengumpulkan data yang dapat menunjukkan realisasi suatu gagasan/ide atau peraturan (Widodo dan Mukhtar, 2000: 15). Ditinjau dari sifat penelitiannya maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif (Arikunto, 1998).

### **1.7.1.2 Tahapan Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses dari serangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Wirartha, 2006 : 181). Sebelumnya, Arikunto (1998: 15) menyebutkan bahwa selain terencana dan sistematis, penelitian juga harus memenuhi syarat mengikuti konsep ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana penelitian (Proposal/Pra-Tesis), terdiri dari langkah-langkah merumuskan permasalahan dan *research question*, menetapkan tujuan dan sasaran, membuat kerangka pikir, mengkaji teori-teori yang relevan, melakukan kajian wilayah, memilih pendekatan, metode penelitian dan membuat instrumen pengumpulan data, serta merancang jadwal pelaksanaan penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian, berupa kegiatan pengumpulan data, baik primer maupun sekunder; mengidentifikasi variabel pasokan bahan baku kayu (volume produksi kayu di wilayah Jawa Tengah, sebaran wilayah produsen, dan volume kayu dari luar yang masuk ke Jawa Tengah); mengidentifikasi variabel dari sisi kebutuhan kayu oleh industri (jumlah unit industri, kapasitas industri, dan volume penggunaan bahan baku); mengkaji pola distribusi produksi dan konsumsi kayu di Propinsi Jawa Tengah; mengkaji mekanisme pemenuhan bahan baku; menelaah kebijakan peredaran dan industri kayu;

serta mengkaji kebutuhan dibangunnya terminal kayu sebagai fasilitas penunjang keberlangsungan industri kayu Jawa Tengah.

3. Penyusunan laporan hasil penelitian (Tesis).

## **1.7.2 Metode Analisis**

### **1.7.2.1 Lingkup Analisis Substansi**

Untuk mencapai sasaran penelitian ini, maka analisis yang dilakukan mencakup:

a. Analisis pasokan (*supply*) dan kebutuhan bahan baku kayu (BBK). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya volume pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu, baik pada tingkat regional Jawa Tengah, nasional dan global yang akan berpengaruh terhadap kebutuhan terminal kayu. Variabel analisis terdiri dari volume (produksi/pasokan) dan sumber kayu. Analisis kebutuhan (*demand*) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dari sisi kebutuhan bahan baku kayu oleh industri terhadap kebutuhan terminal kayu. Variabel analisisnya adalah volume kebutuhan bahan baku kayu, jumlah unit dan kapasitas industri kayu Jawa Tengah.

Analisis pasokan dan kebutuhan dilakukan dengan membandingkan besaran pasokan kayu dan kebutuhan oleh industri pengolahannya di Jawa Tengah. Dari hasil analisis pasokan dan kebutuhan BBK, maka dapat diketahui neraca bahan baku kayu Jawa Tengah yaitu volume dan sumber kayu yang diproduksi dari Jawa Tengah serta kayu dari luar Jawa. Jika volume produksi BBK dari sumber surplus maka terminal kayu memungkinkan untuk mendapatkan pasokan sehingga dibutuhkan untuk dibangun. Tetapi jika dari daerah penghasil kayu juga mengalami defisit maka terminal kayu akan kesulitan mendapatkan pasokan sehingga pembangunannya tidak akan efektif.

- b. Analisis peredaran (distribusi) bahan baku kayu dari pemasok kepada industri. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui sistem distribusi bahan baku kayu bagi industri tanpa terminal kayu (*existing*) maupun bila melalui terminal kayu. Hasil analisis distribusi berupa bagan distribusi bahan baku tanpa terminal kayu dan bagan distribusi dengan terminal kayu. Variabel yang dianalisis terdiri dari asal kayu, tujuan, volume, mekanisme atau proses, perangkat dan pelaku (distributor/pedagang) serta jarak dan biaya angkut dari sumber ke lokasi rencana terminal kayu. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan bagan distribusi bahan baku kayu tanpa terminal kayu (*existing*) dan dengan terminal kayu. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap sebaran industri kayu baik berdasarkan jumlah unit industri maupun kapasitasnya.
- c. Analisis fungsi terminal kayu dilakukan terhadap konsep fungsi terminal kayu terpadu yang dikemukakan para pengagas dengan memperhatikan faktor-faktor pembatasnya. Dari analisis ini dapat diketahui fungsi yang paling memungkinkan bagi terminal kayu terpadu.
- d. Analisis kebijakan terkait dengan aspek distribusi bahan baku kayu dan industri pengolahan kayu dan mebel. Faktor yang dianalisis adalah kebijakan penghambat dan pendorong keberlangsungan industri kayu Jawa Tengah. Dari analisis ini diharapkan dapat diketahui peluang pembangunan terminal kayu berdasarkan peraturan/kebijakan yang ada.
- e. Analisis kebutuhan terminal kayu terpadu dilakukan terhadap persepsi responden dan variabel-variabel yang dihasilkan dari keempat analisis sebelumnya (a – d) serta aspek finansial pembangunan terminal kayu terpadu.

Berdasarkan analisis pasokan, kebutuhan, peredaran/distribusi bahan baku kayu serta kebijakan terkait, akan dilakukan sintesis sehingga dapat diketahui apakah terminal kayu merupakan fasilitas yang dibutuhkan bagi keberlangsungan industri kayu Jawa Tengah.

#### **1.7.2.2 Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data dapat dibaca (*readable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*). Kegiatan pengolahan data, baik kualitatif maupun kuantitatif, diawali dengan tabulasi yaitu proses pembuatan tabel induk yang memuat susunan data penelitian berdasarkan klasifikasi yang sistematis sehingga lebih mudah dianalisis (Wirartha, 2006: 259). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Kedua jenis data tersebut berasal dari data primer dan data sekunder. Data kuantitatif diproses dengan cara menjumlahkan, membandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase untuk mengetahui status kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Atau, data dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data, untuk selanjutnya dibuat tabel, baik yang berhenti sampai tabel saja maupun untuk pengambilan kesimpulan ataupun untuk kepentingan visualisasi datanya (Arikunto, 1998: 246).

#### **1.7.2.3 Analisis Data**

Analisis data adalah penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian (Arikunto, 1998: 240). Analisis dilakukan sesuai jenis datanya, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Wirartha (2006: 261) menegaskan bahwa para ahli umumnya sependapat bahwa kedua jenis analisis mampu menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

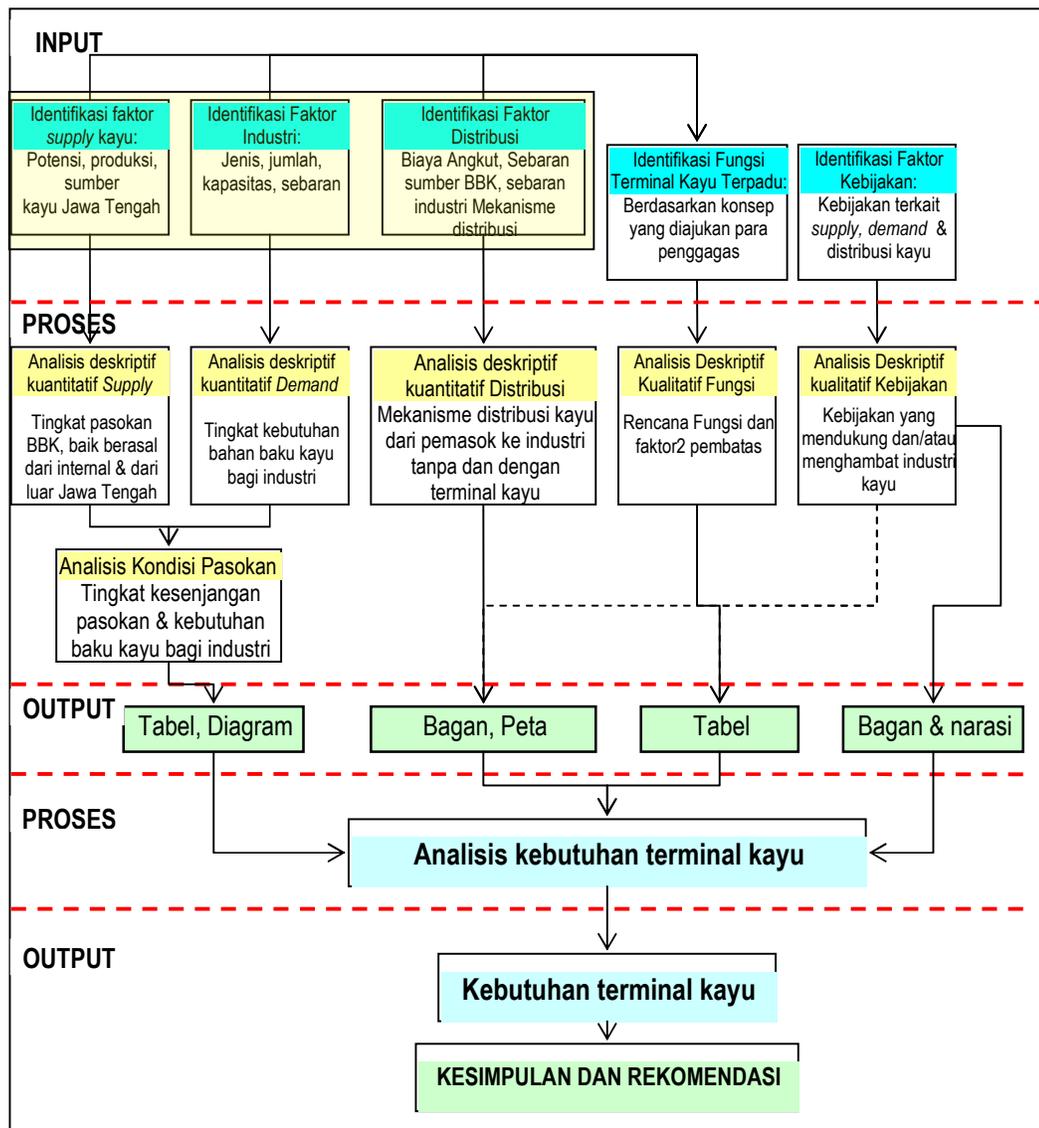
Pilihan untuk menganalisis data kuantitatif mana yang paling sesuai tergantung pada tujuan penelitian dan keadaan datanya Wirartha (2006: 261). Data-data yang dianalisis secara kuantitatif antara lain adalah data produksi kayu, sebaran, jarak, kapasitas industri, dan penggunaan bahan baku. Sedangkan data-data yang dianalisis secara kualitatif adalah data hasil wawancara dan pada analisis kebijakan. Disamping itu, terdapat pula data yang dianalisis oleh kedua metode, baik oleh metode kuantitatif maupun kualitatif atau dilakukan secara simultan, pertama secara kuantitatif selanjutnya secara kualitatif, seperti data sebaran produksi dan industri kayu. Analisis kualitatif pada dasarnya merupakan analisis yang menggunakan pemikiran logis atau analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya Wirartha (2006: 261).

#### **1.7.2.4 Kerangka Analisis**

Guna menghindari melebar nya analisis sehingga keluar dari sasaran dan tujuan penelitian, maka diperlukan kerangka analisis yang berfungsi sebagai kerangka kerja logis (*logical frame work*) dalam penelitian. Kerangka analisis menggambarkan proses analisis terhadap *input* data sehingga menghasilkan *output* dari setiap variabel yang dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

*Input* utama dalam penelitian ini adalah kondisi yang dihadapi oleh industri kayu di Jawa Tengah yaitu terbatasnya pasokan bahan baku kayu dan mekanisme (tata niaga) pasokan dikuasai para pedagang perantara. Di sisi lain, kapasitas industri lebih besar dari pasokan bahan baku, lokasi industri juga tersebar dan akses industri terhadap bahan baku lemah. Fakta tersebut memunculkan ide perlunya dibangun terminal kayu yang berpusat di Semarang. Tetapi apakah dengan dibangunnya prasarana tersebut benar-benar merupakan suatu solusi, memerlukan kajian/penelitian yang akan menganalisis, selain kedua faktor tersebut (sisi pasokan dan kebutuhan bahan baku), juga melakukan analisis

terhadap aspek distribusi, fungsi terminal kayu dan kebijakan terkait. Sehingga dari seluruh analisis tersebut dapat disimpulkan kebutuhan dibangunnya terminal kayu. Secara diagramatis, kerangka analisisnya digambarkan dengan bagan seperti pada Gambar 1.5.



Sumber: Analisis Peneliti (2007)

**GAMBAR 1.5.**  
**KERANGKA ANALISIS KEBUTUHAN TERMINAL KAYU**

### **1.7.3 Kebutuhan Data**

#### **1.7.3.1 Jenis Data dan Variabel**

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif (Riduwan, 2002: 5). Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 1998: 99). Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti dari sumber data, yaitu subjek dimana data diperoleh, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Berdasarkan sifat atau jenisnya, data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Riduwan (2002: 5), data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau kata-kata. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka.

Variabel sering dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teori (Wiratha, 2006: 220). Ringkasan identifikasi variabel, jenis data yang diperlukan dan sumber serta relevansinya dengan sasaran penelitian disajikan dalam Tabel I.1.

#### **1.7.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data dikumpulkan dengan bantuan instrumen pengumpulan data yang sesuai. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah (Arikunto, 1995 *dalam* Riduwan, 2002: 24). Data primer digali dari wawancara terstruktur (terpimpin) terhadap responden dengan instrumen panduan wawancara (*interview giude*). Data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber dan instansi terkait (Tabel I.1).

**TABEL I.1.**  
**IDENTIFIKASI VARIABEL SERTA KEBUTUHAN, KEGUNAAN DAN SUMBER DATA**

No.	Sasaran penelitian	Variabel	D a t a			
			Kebutuhan	Jenis data	Guna	Sumber
1	Identifikasi sumber-sumber, potensi dan produksi serta peta distribusi bahan baku kayu	Pasokan: - Volume - Sumber - Biaya angkut	- Volume produksi kayu per wilayah	Sekunder	Analisis pasokan	- Dinas Kehutanan - Perhutani
			- Jarak sumber produksi ke Semarang	Sekunder	Analisis pasokan	BPS
2	Mengetahui distribusi dan kapasitas industri serta kebutuhan bahan baku kayu.	Permintaan: - Volume - Sumber - Biaya angkut	- Sebaran dan Kapasitas industri per wilayah	Sekunder	Analisis permintaan	Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan
			- Kebutuhan bahan baku	Sekunder	Analisis permintaan	Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan
3	Mengetahui mekanisme atau sistem distribusi bahan baku dari sumber pasokan ke industri.	Distribusi: - Asal - Tujuan - Volume - Pelaku - Mekanisme - Perangkat	- Fungsi terminal - Asal & Tujuan bahan baku - Pelaku peredaran / distributor/pedagang - Volume kayu beredar - Mekanisme pemenuhan bahan baku - Perangkat peredaran/distribusi kayu	Primer	Analisis distribusi	- Dinas Kehutanan, - Perhutani - Asosiasi Industri Kayu
4	Mengetahui kebijakan terkait peredaran kayu dan kesediaan lahan.	Kebijakan Pendukung dan Penghambat Industri, peredaran kayu serta ketersediaan lahan untuk TKT	- Peraturan mengenai peredaran kayu - Peraturan terkait industri kayu	Sekunder	Analisis kebijakan	Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Bappeda
5	Mengetahui tingkat kebutuhan terminal kayu	- Pasokan - Permintaan kayu - Peredaran - Kebijakan	Data-data pasokan, permintaan, peredaran dan kebijakan	Primer	Analisis kebutuhan terminal kayu	Hasil analisis terhadap variabel

*Sumber : Hasil identifikasi Peneliti (2007)*

Responden penelitian ini dipilih dari pihak-pihak yang terkait dengan industri kayu dan rencana pembangunan terminal kayu terpadu (TKT), dengan metode *purposive sampling* (pemilihan sampel secara bertujuan), yaitu sampel responden telah ditentukan/direncanakan dari awal yaitu yang memenuhi kriteria: (1) berkompeten dalam industri pengolahan kayu dan mebel, baik sebagai pemasok, kalangan industri, asosiasi, LSM dan instansi pemerintah; atau (2) direkomendasikan oleh pihak yang berkompeten. Responden yang diambil dalam penelitian ini tercantum dalam Tabel I.2. Tabel tersebut juga menampilkan karakteristik responden sebagai justifikasinya.

**TABEL I.2**  
**DAFTAR DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN**

Responden (Kode)		Karakteristik
<b>I. Produsen/Pemasok kayu:</b>		
1.1.	Perhutani (P1)	Merupakan BUMN Kehutanan sebagai pengelola hutan negara di P. Jawa, pemasok utama kayu Jati.
1.2.	Petani Hutan Rakyat (P2)	Petani penghasil kayu rakyat. Responden dipilih di Kab. Purbalingga karena data dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tahun 2006 menunjukkan bahwa Kab. Purbalingga sebagai penghasil kayu rakyat terbesar di Jawa Tengah. Responden berlokasi di Desa Limbangan Kec. Kutasari Kab. Purbalingga. Saat wawancara responden didampingi oleh Kepala Desa.
1.3.	Pedagang Kayu lokal (P3)	Merupakan pengepul, pemilik depo/sawmill yang mengolah kayu rakyat, sebagai pemasok kayu bulat atau kayu gergajian dari asal kayu rakyat, berlokasi di Desa Jambu Kec. Bedono Kab. Semarang. Referensi dari Dinas Kehutanan Jateng.
1.4.	Pedagang Kayu Antar Pulau (P4)	Merupakan pemasok sekaligus industri pengolahan kayu luar Jawa terutama jenis merbau dari Papua, termasuk unsur pimpinan di perusahaan. Referensi dari Kepala Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Wilayah Semarang.
<b>II. Konsumen BBK (Kalangan Industri &amp; Asosiasi/Praktisi industri kayu):</b>		
2.1.	Industri besar (I1)	Industri pengolahan kayu terpadu skala besar, produk woodworking.
2.2.	Industri menengah (I2)	Merupakan industri wood working skala menengah.
2.3.	Industri kecil (I3)	I.3.1. Industri mebel untuk ekspor, subkontrak dengan 20 pengrajin I.3.2. Industri mebel ekspor
2.4.	Asosiasi (A)	A.1. Tim Klaster Industri Mebel Jawa Tengah A.2. Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan (Asmindo) Jawa Tengah A.3. Kompartemen Industri Kehutanan Kadin Jawa Tengah
<b>III. Instansi Pemerintah ( Regulator)</b>		
1.1.	Dinas Kehutanan (D1)	Instansi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam masalah kehutanan di Propinsi Jawa Tengah.
1.2.	Dinas Perindag (D2)	Instansi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam masalah perindustrian di Propinsi Jawa Tengah.
1.3.	Bappeda Provinsi (D4)	Instansi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam masalah perencanaan terkait industri di Propinsi Jawa Tengah.
1.4.	Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BP2HH) Wilayah Semarang	Instansi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang peredaran hasil hutan untuk Wilayah Semarang dan sekitarnya.
<b>IV. LSM terkait dengan industri kayu (M)</b>		Masyarakat Industri Kehutanan Jawa Tengah
<b>Jumlah responden</b>		<b>16</b>

*Sumber: Rancangan Peneliti (2007)*

## **BAB II**

### **INDUSTRIALISASI, PERAN INDUSTRI KAYU DAN KEBUTUHAN TERMINAL KAYU**

#### **2.1 Proses Industrialisasi di Indonesia**

Industrialisasi merupakan proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendorong perubahan struktur ekonomi (Tambunan, 2001: 41). Industrialisasi di Indonesia dimulai sejak dicanangkannya program Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I). Sejak itu hingga krisis ekonomi tahun 1997, pendapatan per kapita masyarakat meningkat cukup pesat setiap tahunnya. Kendati pengembangan industri Indonesia masih dalam tahap awal, namun keyakinan akan besarnya kemampuan Indonesia untuk mengembangkan industrinya yang berdaya saing kuat dengan berbagai peluangnya, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor (Sastrosunarto, 2006: 11).

Industri pemanfaatan sumber daya hutan pernah menjadi salah satu sektor penggerak utama perekonomian Indonesia pada era tahun 1980–1990an. Pada masa tersebut Indonesia berhasil merebut pasar hasil hutan kayu tropis dunia melalui ekspor aneka produk kayu sehingga sektor industri ini memberikan kontribusi terbesar sektor non migas terhadap penerimaan devisa negara (Wie, 1996; Ikhwan, 1998). Seiring dengan intensifnya pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak diimbangi dengan keberhasilan pembangunan hutan tanaman, manfaat yang diperoleh pun terus berkurang bahkan saat ini telah timbul permasalahan dalam industri perkayuan yaitu kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan bahan baku kayu bagi industri.

## 2.2 Industri dan Pembangunan Wilayah

Peranan suatu wilayah sebagai komponen ekonomi nasional direpresentasikan oleh sektor industri dan struktur industri yang terdapat pada masing-masing wilayah (Adisasmita, 2005: 33). Berdasarkan pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa industri memiliki peran kunci dalam pembangunan wilayah. Dengan demikian unsur-unsur yang terkait dengan keberlangsungan industri perlu dikembangkan sehingga industri tetap menjalankan peran dan fungsinya, yaitu: 1) Industri sebagai tempat usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan sumber daya alam; 2) Industri sebagai penyebab perkembangan penduduk; 3) Industri sebagai pusat pertumbuhan; 4) Industri sebagai sumber pendapatan daerah; dan 5) Industri sebagai tempat kesempatan kerja. Oleh karena itu segala sesuatu yang menunjang perkembangan industri, termasuk pembangunan infrastrukturnya perlu direncanakan dengan baik.

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. *Development is not static concept. It is continuously changing* (UN, 1975 dalam Tjokroamidjojo & Mutopadidjaya, 1982: 1). Pembangunan adalah orientasi pada pertumbuhan, fisik dan kuantitatif juga adalah orientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial dan pelestarian lingkungan. Konsep pembangunan dengan berbagai dimensinya yang diterapkan pada suatu wilayah sering menemukan kenyataan bahwa konsep tersebut memerlukan modifikasi atau penyesuaian ke arah karakteristik lokal (*local specific*). Teori ini dapat menjelaskan mengapa isu pembangunan terminal kayu muncul di Jawa Tengah, karena salah satu karakteristik lokal Jawa Tengah berkenaan dengan industri adalah produk industri kayu terutama mebel Jawa Tengah yang telah memiliki kekhasan.

Ruang lingkup pembangunan luas sekali, melingkupi semua sektor yaitu ekonomi (pendapatan, kesejahteraan, lapangan kerja dsb), sosial (pendidikan, kebudayaan, kebiasaan, nilai budaya, dsb.), serta fisik (lingkungan, infrastruktur/prasarana, sarana, tata guna lahan dsb.). Pembangunan terminal kayu merupakan bagian dari pembangunan fisik wilayah/kota yaitu infrastruktur yang akan memiliki fungsi khusus sebagai pusat koleksi dan distribusi barang berupa kayu. Dalam konteks rencana pembangunannya oleh para pihak terkait, terminal kayu dianggap sebagai salah satu alternatif dengan mengalokasikan sumber daya (dana & lahan) yang memiliki orientasi ke depan (tata niaga kayu) untuk menjaga kesinambungan industri kayu.

### **2.3 Industri Kayu**

Menurut sub sektor dalam Tabel Input-Output Badan Pusat Statistik (BPS) industri kayu merupakan komoditi dari klasifikasi agroindustri sektor kehutanan (Kuncoro, 2007: 242). Selanjutnya, industri kayu dibedakan berdasarkan hasil produksinya, yaitu industri primer dan industri sekunder (lanjutan). Industri primer adalah industri yang mengolah kayu gelondongan (log) menjadi barang setengah jadi yaitu kayu gergajian, kayu lapis dan kayu serpih. Sedangkan industri sekunder (lanjutan) adalah industri yang mengolah lebih lanjut produk dari industri primer (pengerjaan kayu/*wood working*, mebel, dll) (Rachman, 2000). Peran pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap industri kayu juga dibagi dua, yaitu industri primer oleh Departemen Kehutanan dan industri sekunder oleh Departemen Perindustrian, masing-masing beserta dinas di daerah.

### 2.3.1. Posisi Industri Kayu dalam Bangun Sektor Industri Indonesia

Industri kehutanan (kayu) masih prospektif untuk dikembangkan. Persoalan bahan baku yang selalu dikeluhkan kini mulai diatasi dengan pasokan kayu dari hutan tanaman industri, hutan rakyat dan jatah produksi tebangan yang ditetapkan Departemen Kehutanan. Masih prospektifnya industri kayu karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara lain dalam memproduksi kayu. Hutan tanaman di Indonesia dapat dipanen pada umur 7 (tujuh) tahun sedangkan di Eropa 13-14 tahun. Total nilai investasi pada industri kayu saat ini mencapai 27,7 miliar dollar AS (Kompas, 2007b).

Hasil studi terhadap fenomena deindustrialisasi dengan studi kasus Jepara dan Bali, Kuncoro (2007: 388-390) membuktikan bahwa secara makro industri perabotan dan perlengkapan kayu mengalami pertumbuhan, baik untuk jumlah pekerja maupun perusahaan. Walaupun industri kayu di Jepara mengalami penurunan, tetapi terjadi sebaliknya di Bali. Artinya bahwa industri tersebut tumbuh pula di luar daerah tersebut. Hal ini menunjukkan tidak terjadi deindustrialisasi pada sub sektor industri kayu tersebut. Fenomena ini juga memperkuat prospek industri kayu saat ini dan masa depan. Deindustrialisasi adalah menurunnya peran industri dalam perekonomian secara menyeluruh.

Dalam pengembangan industri, Pemerintah telah memiliki konsep umum dan visi untuk menuju kondisi industri yang diinginkan di masa yang akan datang yang disebut sebagai Bangun Sektor Industri Tahun 2025. Bangun Sektor Industri Tahun 2025 adalah gambaran keadaan sektor industri yang sudah mapan, dimana sektor ini telah menjadi mesin penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional, sekaligus tulang punggung ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya nasional, yang memiliki struktur keterkaitan dan kedalaman yang kuat, serta memiliki daya saing yang tangguh di pasar internasional. Visi tersebut

ditetapkan dengan mempertimbangkan cabang-cabang industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan, serta mempertimbangkan sepenuhnya modal dasar, dan keinginan masyarakat dalam membangun industri serta perekonomiannya di masa yang akan datang. Cabang-cabang industri tertentu yang akan diprioritaskan pengembangannya dipilih dengan seksama dengan tujuan agar lebih terfokus pada sasaran tertentu, serta lebih mudah diukur kriteria keberhasilannya, sehingga menjadi pilar-pilar industri andalan masa depan.

Pilar-Pilar Industri Andalan Masa Depan meliputi (Departemen Perindustrian, 2005):

1. Pilar Industri Agro, antara lain yaitu industri pengolahan kelapa sawit; pengolahan hasil laut; pengolahan karet; pengolahan kayu, pengolahan tembakau; pengolahan kakao dan coklat, pengolahan buah, pengolahan kelapa, dan pengolahan kopi.
2. Pilar Industri Alat Angkut, (industri otomotif, perkapalan, kedirgantaraan, dan perkeretaapian).
3. Pilar Industri Telematika, (industri perangkat/*devices*, infrastruktur/jaringan dan aplikasi/*content*).

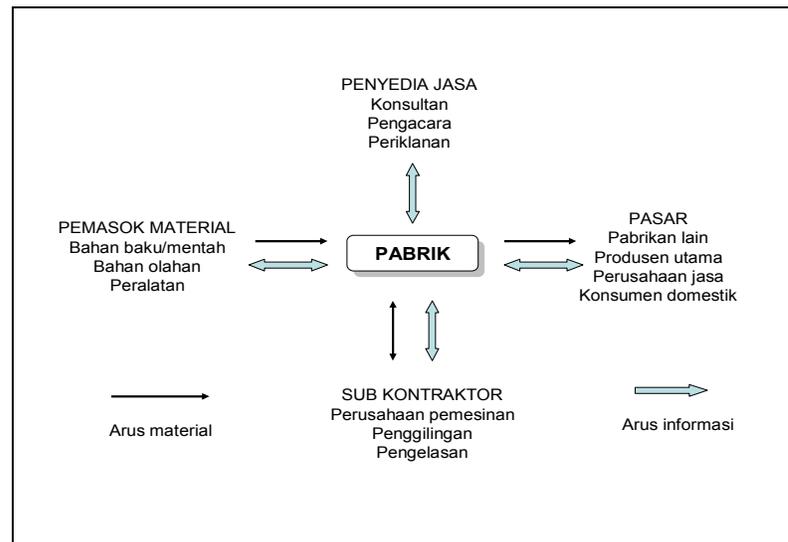
Pilar-pilar industri yang diprioritaskan di masa mendatang akan lebih mengandalkan pada sumber daya manusia berpengetahuan dan terampil, sumber daya alam yang terbarukan, serta teknologi. Dalam rangka membangun pilar-pilar industri masa depan dengan menumbuhkan industri yang akan memotori pertumbuhan, pendekatan pembangunan sektor industri dilaksanakan melalui: peningkatan nilai tambah dan produktivitas, pengembangan klaster industri, pembangunan industri yang berkelanjutan, persebaran industri dengan penekanan pengembangan industri kecil dan menengah pada setiap tahap atau rantai.

Dalam industri kehutanan di Indonesia hal mendesak yang perlu direalisasikan adalah revitalisasi dan restrukturisasi industri mengingat terdapat ketidakseimbangan antara kapasitas industri saat ini dan ketersediaan bahan baku yang lestari dari hutan alam dan hutan tanaman. Namun dalam proses tersebut arah perkembangan industri perlu ditentukan (diantisipasi) sehingga proses revitalisasi tersebut dapat berjalan secara optimal. Dalam penentuan arah tersebut, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, dengan semakin menurunnya kontribusi industri perkayuan karena berkurangnya bahan baku perlu diimbangi oleh hasil hutan yang lain sehingga penerimaan devisa dari sub sektor kehutanan tidak menurun secara drastis. Kedua, produk industri hasil hutan Indonesia tetap memiliki daya saing pasar yang tinggi. Kebijakan pengembangan industri pengolahan hasil hutan selama ini cenderung untuk melihat perkembangan industri dari perspektif nasional atau makro, sedangkan aspek pengembangan secara kewilayahan (regional) kurang tersentuh. Kebijakan pengembangan industri dalam perspektif kewilayahan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keunggulan suatu wilayah baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya (Dwiprabowo, 2004).

### **2.3.2 Kaitan Ke Depan dan Ke Belakang serta Rantai Pasokan Dalam Industri Kayu**

Setiap aktivitas industri memiliki keterkaitan dengan aktivitas lainnya, baik ditinjau dari segi input, proses, maupun hasilnya. Untuk melihat kaitan dengan aktivitas ekonomi di depannya (*forward linkage*) serta kaitan ke belakangnya (*backward linkage*) dapat dilihat secara individual, dan akan semakin besar kaitannya apabila dilihat secara agregat. Healy & Ilbery (1996) menjelaskan

kaitan suatu proses produksi dan aktivitas lainnya dengan model seperti pada Gambar 2.1.

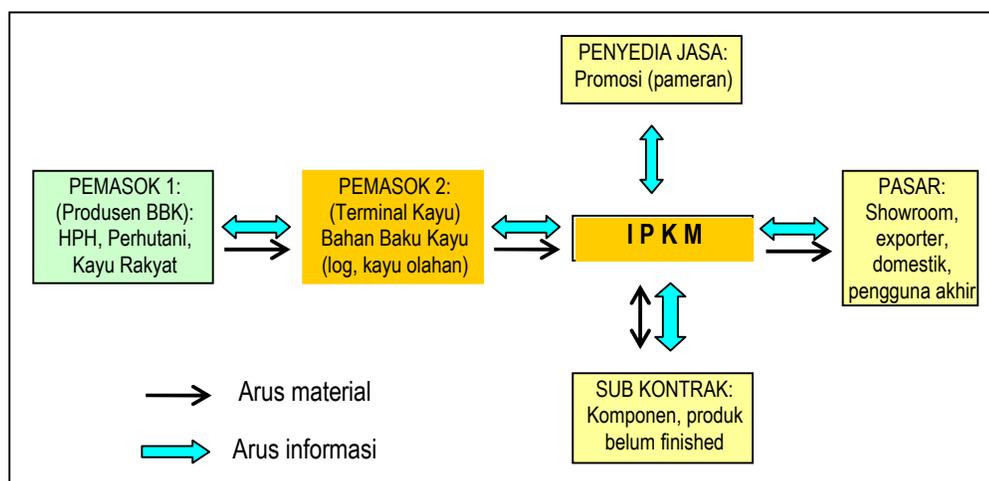


Sumber: Healy & Ilbery (1996)

### GAMBAR 2.1 KAITAN UTAMA SUATU INDUSTRI DENGAN KEGIATAN LAIN

Healy & Ilbery (1996) menyatakan bahwa terdapat dua macam kaitan utama dari suatu kegiatan produksi, yaitu aliran bahan dan arus informasi. Bersamaan dengan keduanya adalah arus uang dan kadang-kadang arus tenaga kerja. Jadi dua faktor utama tersebut berkaitan dengan bahan baku, pengolahan bahan, peralatan, penyedia jasa, kaitan dengan sub kontrak, dan kaitan dengan pemasaran. Faktor-faktor yang termasuk input dalam suatu proses produksi disebut sebagai *backward links*, sementara faktor-faktor atau unsur-unsur output disebut sebagai *forward links*. Berdasarkan teori ini maka industri kayu tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan pemasok bahan baku dan pasar. Dalam konteks ini, terminal kayu merupakan fasilitas yang akan berperan dalam pasokan

bahan baku kayu. Jika ditelusuri lebih lanjut maka pemasok (terminal kayu) terkait dengan aktivitas produksi kayu. Aktivitas produksi kayu dimulai dari penebangan, jika dari hutan alam dan dimulai dari penanaman jika dari hutan tanaman. Mengacu pada Gambar 2.1 di atas, maka kaitan ke belakang dan ke depan dari industri kayu dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 2.2.



Sumber: Sintesis Peneliti (2007)

## GAMBAR 2.2 KAITAN UTAMA INDUSTRI KAYU DENGAN KEGIATAN LAIN

Hasil pengolahan data I-O, Kuncoro *et al.* (1996) dalam Kuncoro (2007: 243-244) membuat pola keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward links*) agroindustri dalam matriks dan mengelompokkannya ke dalam 4 klasifikasi. Berdasarkan klasifikasi tersebut, industri kayu termasuk ke dalam agroindustri yang memiliki kaitan ke depan dan ke belakang mengalami perubahan dari tahun 1980 sampai tahun 1990 (Tabel II.1). Tingginya kaitan tersebut menunjukkan tingginya penyebaran dampak perubahan subsektor tersebut terhadap subsektor yang lain.

Berkenaan dengan arus barang tersebut, arus barang (*supply*) penting dijaga kelancarannya antara lain dengan tersedianya fasilitas yang berfungsi sebagai tempat koleksi dan distribusi barang, yaitu terminal. Untuk keberlangsungan industri kayu saat ini, para pihak terkait menganggap perlu adanya fasilitas terminal kayu tersebut untuk koleksi dan distribusi bahan baku kayu bagi industri.

**TABEL II.1**  
**HUBUNGAN ANTARA KAITAN KE DEPAN DAN KE BELAKANG**  
**AGROINDUSTRI**

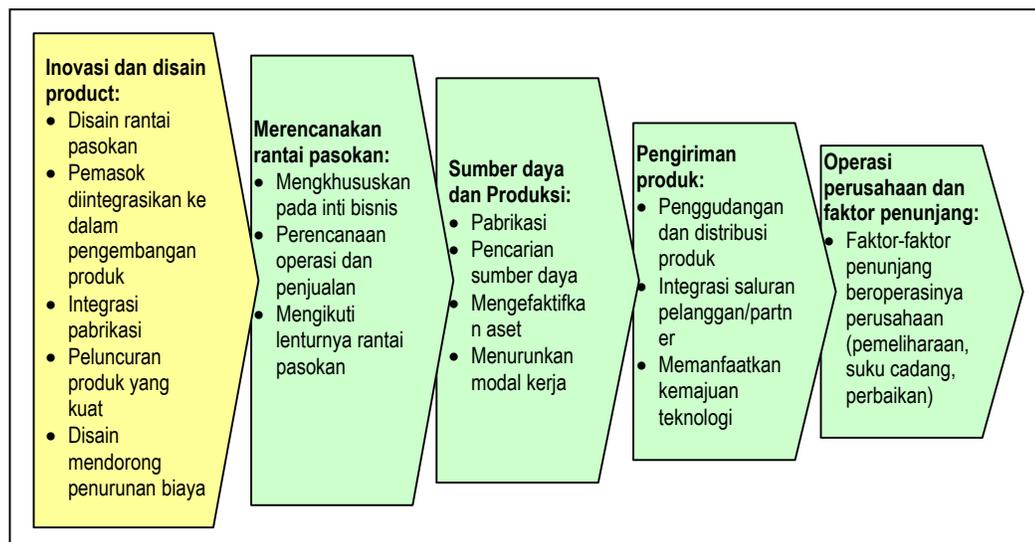
Tahun	Industri	Kaitan ke	
		Depan	Belakang
1980	Kayu	Rendah	Rendah
	Hasil hutan	Tinggi	Rendah
1985	Kayu	Tinggi	Rendah
	Hasil hutan	Rendah	Rendah
1990	Kayu	Tinggi	Rendah
	Hasil hutan	Tinggi	Rendah

Sumber: Kuncoro, etal. (1996) dalam Kuncoro (2007 :244-246)

Keterkaitan antara pasar/konsumen, industri, pemasok dan sumber bahan baku yang melibatkan berbagai pihak, maka hal tersebut dapat dilihat sebagai suatu rantai pasokan. Keterlibatan beberapa pihak dalam pasokan inilah dikenal dengan *Supply Chain Management* (Siagian, 2005: 7). Heizer & Rander (2004) dalam Siagian (2005: 7) menguraikan bahwa manajemen rantai pasokan (*supply chain management*) merupakan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah yang selanjutnya diolah menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi dan barang jadi kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi.

Kerangka aksi dalam manajemen rantai pasokan yang dikemukakan Hamilton (2007), menekankan bahwa salah satu kegiatan inovasi dan pengembangan produk adalah mengintegrasikan pemasok ke dalam pengembangan produk (Gambar 2.3). Hal ini berarti bahwa pengembangan produk tergantung pada keterlibatan pemasok/produsen kayu. Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa aksi-aksi selanjutnya dalam rantai pasokan tergantung pada aksi pertama (warna kuning). Dengan demikian, kegiatan dan proses di IPKM tergantung keberhasilan pada aksi pertama yang didalamnya terutama adalah aksi penanaman hutan dalam rangka memproduksi kayu.

Kayu sebagai bahan mentah dapat diperoleh jika ada upaya untuk memproduksinya. Dengan demikian upaya untuk memproduksi kayu, yaitu kegiatan penanaman pohon merupakan bagian dari mata rantai pasokan.



Sumber: Hamilton (2007)

**GAMBAR 2.3**  
**KERANGKA TINDAK DALAM MANAJEMEN RANTAI PASOKAN**

### 2.3.3 Skala Industri

Secara umum ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan besar-kecilnya industri disebut skala industri. Terdapat perbedaan dalam batasan skala industri di Indonesia yang digunakan oleh institusi yang berbeda yaitu Bank Indonesia berdasarkan *asset netto* yang dimiliki, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan industri berdasarkan jumlah pekerja per usaha industri serta Departemen Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggunakan batasan jumlah modal yang ditanam (Wie, 1996).

Lain halnya dengan batasan skala industri pengolahan kayu. Pada industri primer, yang menjadi dasar pengelompokkan industri besar, sedang dan kecil pada industri kayu adalah kapasitas yang dimiliki industri. Kapasitas adalah kemampuan suatu pabrik untuk memproduksi atau mengolah kayu (input) menjadi kayu gergajian (output), dinyatakan dalam satuan Volume/Waktu ( $m^3$ /tahun,  $m^3$ /bulan,  $m^3$ /hari,  $m^3$ /jam). Industri kayu termasuk industri besar apabila kapasitasnya  $> 6.000 m^3$ /tahun, termasuk industri sedang bila kapasitasnya  $2000 - 6000 m^3$ /tahun dan kecil apabila kapasitasnya  $< 2000 m^3$ /tahun. Sedangkan pada industri sekunder (lanjutan) skala industri mengikuti ketentuan Departemen Perindustrian.

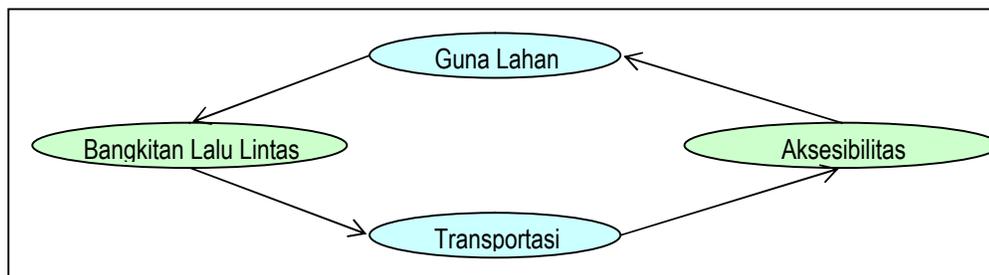
## 2.4 Guna Lahan, Transportasi dan Terminal Kayu

### 2.4.1 Guna Lahan dan Transportasi

Pembangunan terminal kayu memerlukan lahan yang sesuai untuk aktivitas yang ditimbulkannya yaitu pengumpulan dan pendistribusian kayu. Keterkaitan antara lahan dengan berbagai penggunaan di atasnya membentuk suatu pola penggunaan lahan yang sesuai dengan aktivitasnya. Menurut Chapin (1995: 197), pola penggunaan lahan menggambarkan suatu sistem aktivitas yang

terbentuk oleh kegiatan sehari-hari individu, rumah tangga, perusahaan dan institusi pada suatu keadaan. Tamin (1998) menjelaskan hubungan antara transportasi dengan penggunaan lahan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah siklus (Gambar 2.4).

Berdasarkan Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa terminal kayu merupakan bagian dari sistem transportasi. Pembangunan terminal kayu pada guna lahan yang sesuai dapat membangkitkan lalu lintas dari aktivitas pengumpulan kayu dari berbagai wilayah produksi dan pendistribusiannya ke wilayah-wilayah dimana industri pengolahan kayu berada. Kegiatan pengumpulan dan pendistribusian kayu merupakan kegiatan transportasi dan keberadaan terminal kayu, sebagaimana diharapkan para pihak, dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh industri kayu dengan memudahkan aksesibilitas kepada bahan baku.



*Sumber: Tamin (1998)*

**GAMBAR 2.4**  
**SIKLUS HUBUNGAN TRANSPORTASI DENGAN**  
**PENGGUNAAN LAHAN**

Konsep terminal kayu secara mikro merupakan konsep tempat yang menjadi pusat kegiatan bagi tempat-tempat lain dimana pusat tersebut memiliki keterkaitan fungsional antara terminal kayu sebagai pusat koleksi dan distribusi kayu dengan wilayah sekelilingnya, baik sebagai sumber bahan baku maupun

industri pengguna bahan baku tersebut. Dengan demikian, pendekatan analisis guna lahan yang dapat membantu menjelaskannya adalah teori tempat pusat yang dikembangkan oleh Walter Christaller (1933) dan August Losch (1936).

Elemen dalam Teori Tempat Pusat, setelah disesuaikan dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu tempat pusat yang dibentuk oleh fungsi yang bersifat memusat (*central function/profession*), sehingga fungsi (barang/jasa) yang ada beberapa titik tertentu saja. Dalam hal ini tempat dimaksud adalah terminal kayu (*Wood Center*).
- Adanya sejumlah tertentu produksi kayu dan industri yang mendukung keberadaan fungsi tertentu tersebut sehingga memiliki batas ambang (*threshold*).
- Jarak di mana penyedia kayu dan industri yang masih mau untuk melakukan perjalanan untuk mendapatkan memasok atau membeli kayu (*range of goods*).
- Terminal kayu yang dibangun adalah satu unit sehingga tidak membentuk segitiga pelayanan dan pola heksagonal, tetapi wilayah pelayanan yang dianggap optimum dapat diprediksi.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh Bowersox (1981), Morlok (1978) dan Papacostas (1987), Kodoatie (2005: 259) menyimpulkan bahwa transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain yang terpisah secara spasial, baik dengan atau tanpa sarana/alat angkut. Perpindahan tersebut melalui jalur perpindahan yaitu prasarana baik alami (udara, sungai, laut)

maupun *manmade* (jalan raya, rel, pipa), obyek yang diangkut dapat berupa orang maupun barang, alat/sarana angkutan (kendaraan, kapal, kereta, pipa), dengan sistem pengaturan dan kendali tertentu (manajemen lalu lintas, sistem operasi, maupun prosedur perangkutan).

Permasalahan transportasi dapat dengan mudah dipahami dan dicari alternatif pemecahannya secara baik melalui pendekatan sistem transportasi. Sistem transportasi secara menyeluruh (makro) dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem yang lebih kecil (mikro) yang masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi. Sistem transportasi mikro tersebut terdiri dari susunan kegiatan, sistem jaringan prasarana transportasi, sistem pergerakan lalu lintas dan sistem kelembagaan (Tamin, 2000: 28). Transportasi sebagai sistem mencakup sub sistem prasarana berupa jalur dan simpul tempat pergerakan, sub sistem sarana berupa kendaraan atau alat pergerakan, dan sub sistem pengendalian atau pengaturan yang memungkinkan pergerakan tersebut efisien, lancar, aman dan teratur (Kodoatie, 2005).

#### **2.4.2 Terminal Kayu**

Berdasarkan pengertian sistem transportasi maka terminal adalah infrastruktur yang merupakan bagian dari sistem/jaringan transportasi yang merupakan simpul tempat pergerakan. Karena yang dipindahkan/diangkut dalam transportasi adalah orang atau barang, maka terminal sebagai simpul pergerakan juga terdiri dari terminal penumpang (orang) dan terminal barang. Menurut Direktora Jenderal Industri Agro dan Kimia (2006), terminal kayu merupakan kawasan terpadu meliputi pergudangan dan areal-areal lain yang berfungsi

sebagai sarana-prasarana pendukung dengan tujuan untuk menampung, menyimpan dan mendistribusikan kayu sebagai bahan baku industri pengolahan kayu dari sumber bahan baku dan ke industri pengolahannya dalam suatu peredaran yang tetap dan terintegrasi.

Dalam sistem kebutuhan teknologi transportasi yang dikemukakan oleh William (1977) dalam Kodoatie (2005: 259), terminal merupakan bagian dari sub sistem transportasi untuk memenuhi kebutuhan dan kualitas pelayanannya. Terminal berfungsi sebagai titik awal dan akhir, transfer, pemeliharaan dan bongkar-muat. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Dengan demikian terminal kayu adalah terminal yang menjadi simpul pergerakan kayu. Rencana pembangunan terminal kayu bisa menjadi bagian dari perencanaan sistem transportasi, karena terminal kayu merupakan bagian dari sub sistem perencanaan prasarana (jalan raya, jalan rel, pelabuhan udara, dan terminal).

Terminal kayu merupakan bagian dari terminal atau pelabuhan barang (kargo). Contoh yang baik mengenai hal ini adalah terminal kayu (*wood terminal*) di Pelabuhan Luka Sibenik, Kroasia. Terminal kayu tersebut memiliki jangkauan layanan untuk daratan Eropa yang dihubungkan oleh jalur Šibenik-Benkovac-Obrovac-Karlovac-Zagreb, terdiri dari bangunan tertutup seluas 13.500 m<sup>2</sup> dan area terbuka beraspal seluas 55.000 m<sup>2</sup>. Terminal yang direncanakan untuk masa pakai 100 tahun tersebut berfungsi menangani bahan baku dan produk barang dari

kayu, mulai dari muat-bongkar bahan baku dan produk kayu, pengeringan kayu, sortasi, penggergajian, hingga *packing* dan *labelling* ([www.lukasibenik.hr](http://www.lukasibenik.hr)). Swedia memiliki sebuah sistem distribusi kayu terintegrasi dengan terminalnya yang terbesar di Swedia, Tunadal, sehingga transportasi dan distribusi produk kayu mereka lebih efisien dalam menghadapi kompetisi. Sistem distribusi tersebut merupakan bagian dari aktivitas perusahaan kehutanan terbesar, The Svenska Cellulosa AB Sweden (SCA) yang memiliki cabang di Amerika, Kanada dan Eropa (Segerström, 1968).

Di Indonesia konsep pembangunan terminal kayu yang pernah muncul akhir dekade 70-an sampai pertengahan tahun 80-an ditujukan untuk menekan biaya distribusi kayu. Namun konsep tersebut belum pernah terwujud sampai saat ini. Dalam konsepnya, sistem distribusi terpadu tersebut melalui pembangunan sistem pemusatan kayu (*wood center*) yang rencananya dulu akan dibangun di luar Jawa sebagai pusat pengumpulan kayu dari daerah penghasil dan pelabuhan muat tujuan Jawa/Bali. Sedangkan Pelabuhan Wood Center di Jawa akan berfungsi sebagai pusat pemasukan/pengumpulan, bongkar-muat dan pusat penyebaran kayu ke konsumen di Jawa. Di samping itu, Wood Center akan dilengkapi armada khusus antar pulau (Direktorat Tertib Pengusahaan Huta, 1981).

Soerjohadikoesoemo (1980) menjelaskan bahwa Pemusatan Kayu merupakan sub sistem dari sistem distribusi. Dilihat dari macam kegiatannya, sistem pemusatan kayu terdiri dari unsur-unsur kegiatan menerima kayu, menyorti, melangsir, menimbun, menyusun *party* dan mengirim. Ditinjau dari

fungsi dan prosedurnya, sistem pemusatan kayu terdiri dari unsur-unsur pengendalian dan pengolahan pesanan, pengendalian persediaan, pengendalian kredit/pengawasan pembayaran, pengawasan terhadap penerimaan dan dokumen kayu, pengendalian penyerahan/pengiriman kayu kepada langganan.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan terminal kayu, Pemerintah pun pernah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 Tentang Penyertaan Modal Negera Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu. Saat itu produksi kayu bulat dari hutan alam Indonesia pada posisi puncak-puncaknya sehingga sebagian besar diekspor dalam bentuk gelondongan (log). Jadi, upaya pembangunan terminal kayu terpadu saat itu dianggap tepat, karena masalahnya bukan kekurangan kayu melainkan untuk mendapatkan sistem distribusi bahan baku kayu yang bisa menekan biaya angkut. Namun upaya tersebut gagal karena beberapa penyebab terutama kerja ilegal dalam pengusahaan hutan.

*Gagalnya terminal kayu Marunda Jakarta disebabkan oleh banyaknya kayu ilegal dan manajemen dikelola seperti Perusda (Ketua Tetap Kompartemen Industri Kehutanan, Kadin Jawa Tengah, 2007, wawancara).*

*Dulu Dephut akan membangun Terminal Kayu di Marunda (untuk daerah DKI dan Jabar), Wonosari, Kendal untuk Jateng dan Gresik untuk Jatim. Tetapi mengapa tidak jalan? Sebab dengan Terminal Kayu (Wood Center) penatausahaan kayu akan transparan, sementara pihak-pihak yang melakukan illegal logging tidak mau hal tersebut diketahui secara transparan (Kepala Sub Dinas Tertib Pengusahaan Hutan, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, 2007, wawancara).*

Isu pembangunan terminal kayu di Indonesia sebagai salah satu alternatif solusi bagi industri kayu kembali bergulir di wilayah industri kayu utama Pulau Jawa yaitu Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Pemerintah Propinsi Jawa Timur

akan membangun terminal kayu terpadu di kabupaten Gresik. Pembangunan terminal ini untuk mengatasi banyaknya pungutan liar perdagangan kayu yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab, karena adanya pungutan yang terus menerus berjalan sejak lama, baik di laut maupun di darat sehingga merugikan pemerintah maupun pengusaha kayu itu sendiri, karena ini biayanya lebih tinggi dari pada pungutan resmi yang masuk ke kas negara ([www.d-infokom-jatim.go.id](http://www.d-infokom-jatim.go.id)).

Rencana pembangunan terminal bahan baku kayu terpadu juga terdapat di Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan industri mebel. Jawa Tengah hanya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku kayu untuk industri mebelnya sekitar 200 m<sup>3</sup>/bulan, padahal kebutuhannya sekitar 800 m<sup>3</sup>/bulan. Menurut Yakub Firdaus, Ketua Asosiasi Permebelen Indonesia (ASMINDO) Jawa Tengah, keberadaan terminal tersebut untuk menghindari biaya pungutan pembelian kayu oleh para pengusaha mebel yang selama ini dikeluhkan sangat tinggi. Selain itu, harga kayu akan semakin murah karena biaya-biaya yang ditimbulkan dari pembelian bahan baku kayu lebih efisien. Misalnya, tidak ada biaya transportasi keluar pelabuhan dan kegiatan bongkar-muat (Suara Merdeka, 2004).

Menurut Firdaus (2007), Terminal Kayu Terpadu (*wood center*) Jawa Tengah yang akan dibangun di Semarang sebagai “*pilot project*” nasional akan berfungsi untuk melayani kebutuhan pasokan bahan baku industri, dengan tujuan memberi kepastian dan kemudahan industri untuk memperoleh bahan baku industri, jalur industri legal dan tata niaga kayu lebih efisien. Berdasarkan pada sejarahnya sebagaimana beberapa kutipan di atas, konsep terminal kayu diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan distribusi bahan baku kayu. Jadi bukan untuk mengatasi keterbatasan pasokan bahan baku kayu bagi industri.

## 2.5 Pasokan dan Permintaan Kayu

Fakta lapangan berkenaan dengan pasokan kayu dan distribusinya bagi industri kayu di Jawa Tengah yang menghadapi masalah, menuntut adanya analisis kondisi faktual menyangkut pasokan-permintaan (*supply-demand analysis*), kebijakan dan kebutuhan prasarana.

Dalam pengertian secara umum, penawaran atau penyediaan kebutuhan (pasokan/*supply*) adalah kondisi yang menunjukkan gabungan seluruh produk yang ditawarkan oleh produsen pada periode tertentu dan pada komposisi jenis produk tertentu Putong (2002: 38). Berdasarkan pengertian tersebut maka pemenuhan atau penawaran kayu dapat diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan gabungan seluruh produk kayu yang ditawarkan oleh penyedia kayu (di Jawa Tengah: Perhutani (BUMN), rakyat dan pedagang kayu antar pulau) pada periode tertentu dan pada komposisi jenis kayu tertentu. Jadi, analisis pasokan kayu adalah analisis terhadap variabel-variabel dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pasokan kayu, yaitu:

- (1) produksi kayu dari produsen (Perhutani dan rakyat)
- (2) volume kayu dari luar yang masuk ke Jawa Tengah
- (3) sebaran produksi
- (4) mekanisme pasokan.

Sedangkan pengertian permintaan (*demand*) dalam pengertian secara umum permintaan adalah gabungan seluruh barang yang diminta oleh konsumen. Maka pengertian permintaan atau kebutuhan kayu adalah gabungan seluruh kebutuhan kayu bagi industri di Jawa Tengah, baik industri kecil, menengah maupun industri besar.

Berlakunya hukum penawaran dan permintaan pada bahan baku kayu, hal ini berarti bahan baku kayu mengikuti mekanisme pasar. Oleh karena mengikuti mekanisme pasar, maka kayu termasuk barang privat (*private goods*). Sedangkan barang privat memiliki sifat-sifat (McEachern, 2001: 322-323; Burhan, 2006: 244-245):

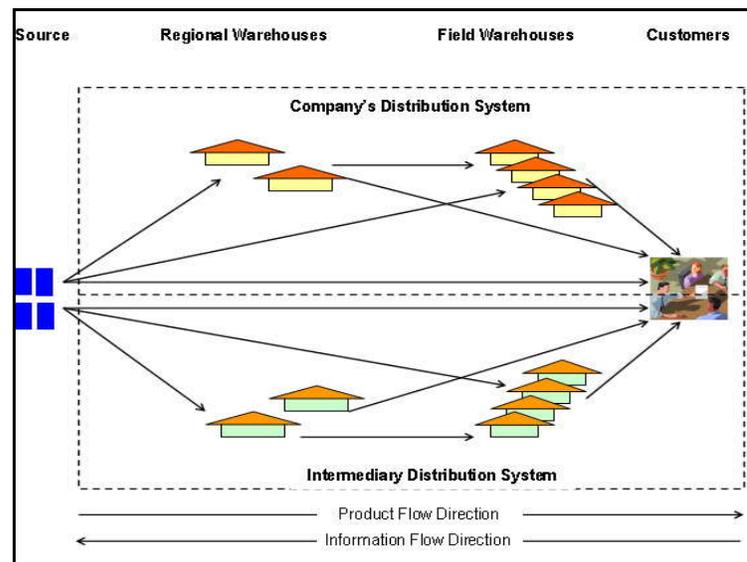
- (a) *Rivalrous consumption*, dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.
- (b) *Excludable consumption*, dimana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga), dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut (*excludable*).
- (c) *Scarcity/depletability/finite*, yaitu kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Kelangkaan dan ketersediaan dalam jumlah yang diskrit atau terbatas inilah yang menimbulkan kedua sifat sebelumnya.

Berdasarkan sifat-sifat barang swasta tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadinya rivalitas antar calon konsumen dalam mengkonsumsi barang yang ditunjukkan oleh persaingan diantara IPKM Jawa Tengah dalam memperoleh bahan baku kayu, dimana industri kecil-menengah diklaim sebagai pihak yang kalah karena sulit mengakses bahan baku. Bahan baku kayu hanya dapat diperoleh oleh industri yang memiliki kemampuan untuk membeli atau membayar, sementara industri kecil yang tidak memiliki daya beli tidak dapat memperoleh bahan baku kayu tersebut. Kelangkaan bahan baku kayu ditunjukkan dengan besarnya defisit baik pada tingkat regional Jawa Tengah, nasional maupun global. Barang privat biasanya memang diadakan untuk mencari profit atau laba. Karena sifat-sifatnya tadi, barang privat dapat menjaga efisiensi pasar dalam

pengadaannya. Efisiensi inilah yang menarik minat sektor swasta dan menimbulkan pemahaman bahwa barang privat adalah barang yang diproduksi oleh sektor swasta. Meskipun begitu, pemerintah pun sebenarnya dapat berlaku sebagai sektor swasta dan menjadi bagian dari pasar dalam penyediaan barang privat untuk tujuan-tujuan tertentu.

## 2.6 Sistem Distribusi

Jaringan sistem distribusi barang secara umum dapat dinyatakan seperti skema pada Gambar 2.5 (Suwignjo, 1998). Dalam sistem jaringan distribusi, barang dari sumber pemasok harus dikirim ke konsumen dalam jumlah dan waktu yang tepat, biaya yang wajar dan kondisi yang baik. Berdasarkan skema pada Gambar 2.5 tersebut, terminal kayu dapat difungsikan sebagai bagian dari sistem perusahaan distribusi (*company's distribution system*) atau sistem distribusi perantara (*intermediary distribution system*).



Sumber: Suwignjo (1998)

**GAMBAR 2.5**  
**SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI BARANG**

Industri pengolahan kayu termasuk kelompok agroindustri (Departemen Perindustrian, 2005). Menurut Dillon (1998), produk agroindustri antara lain bersifat *bulky/voluminous* (volume besar) yang akan berpengaruh terhadap sistem distribusinya dan memerlukan saluran distribusi. Saluran distribusi produk agroindustri dibutuhkan terutama karena adanya perbedaan yang menimbulkan celah-celah atau kesenjangan di antara produksi dan konsumsi yaitu adanya *geographical gap, time gap, quantity gap, variety gap, dan communication & information gap*.

Kesenjangan tersebut terjadi juga pada industri kayu yaitu perbedaan jarak geografis antara sumber bahan baku dengan industri, adanya celah waktu antara pasokan dengan konsumsi kayu oleh industri. Secara kuantitas telah terjadi kesenjangan antara pasokan dengan permintaan bahan baku kayu. Adanya perbedaan keragaman baik jenis kayu maupun produk yang dikehendaki dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Kesenjangan informasi dan komunikasi antara lain ditunjukkan oleh lemahnya akses industri terutama industri kecil terhadap sumber bahan baku kayu. Dengan akan dibangunnya terminal kayu diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut.

## **2.7 Kebijakan**

Kebijakan yang terkait dengan rencana pembangunan terminal kayu adalah kebijakan yang menyangkut produksi, distribusi dan pemanfaatan kayu bagi industri. Intinya adalah kebijakan tentang peredaran kayu. Adapun kebijakan yang menyangkut rencana pembangunan terminal adalah kebijakan mengenai tata ruang (tata guna lahan) di mana terminal kayu direncanakan. Jadi analisis

kebijakan dilakukan terhadap semua kebijakan dalam bentuk peraturan yang telah dibuat pemerintah terkait dengan produksi, distribusi dan pemanfaatan kayu bagi industri (peredaran kayu) dan tata guna lahan. Teknik analisis demikian, bila mengacu pada Muhadjir (2004: 155) disebut sebagai teknik analisis verifikasi, karena kebijakan terkait dengan peredaran kayu dan tata guna lahan, dikeluarkan oleh pemilik otoritas pada masing-masing bidang.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu bagi industri serta peredaran/distribusinya. Berdasarkan kebijakan yang ada maka dapat dilakukan analisis dengan teknik verifikasi sehingga diharapkan dapat diketahui kebijakan yang mengarah pada kebutuhan pembangunan terminal kayu sebagai fasilitas penunjang industri kayu Jawa Tengah..

## **2.8 Sintesis Kajian Literatur**

Penelitian ini bertolak dari kondisi empiris yang dihadapi industri kayu di Jawa Tengah yang mengalami ketimpangan (*gap*) bahan baku kayu bagi industri. Alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya adalah pembangunan terminal kayu. Kajian dilakukan terhadap solusi tersebut dengan melakukan analisis pada sisi pasokan (produksi) bahan baku kayu, permintaan bahan baku oleh industri, sistem distribusi kayu dan penelaahan kebijakan terkait peredaran dan pemanfaatan bahan baku kayu di Jawa Tengah.

Berdasarkan kajian literatur di atas diketahui bahwa setiap aspek kajian mengandung variabel dan indikatornya yang akan digunakan dalam analisis.

Aspek kajian dan variabel yang dianalisis dalam setiap aspek kajian ini disajikan pada Tabel II.2.

**TABEL II.2**  
**SINTESIS ASPEK KAJIAN DAN VARIABEL**

No.	Aspek kajian	Variabel	Referensi
1	Pasokan (produksi) kayu	1.1. Volume 1.2. Sumber kayu 1.3. Biaya angkut	Healy & Ilbery (1996) Putong (2002) Aristo (2005) Kuncoro (2007)
2	Permintaan bahan baku kayu oleh industri	2.1. Volume 2.2. Jarak sumber ke terminal kayu 2.3. Biaya angkut	Putong (2002), Aristo (2005)
3	Sistem distribusi	3.1. Jarak sumber terminal kayu ke industri 3.2. Mekanisme distribusi	Suwignjo (1998) Dillon (1998) Soerjohadikoesoemo (1980)
4	Kebijakan dan ketersediaan lahan/lokasi	3.1. Pendukung 3.2. Penghambat	Muhadjir (2004)

*Sumber: Sintesis Peneliti (2007)*

## **BAB III**

### **KARAKTERISTIK INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DAN MEBEL JAWA TENGAH**

#### **3.1 Hutan Sebagai Sumber Bahan Baku Kayu Jawa Tengah**

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, hutan di Jawa Tengah terdiri dari hutan negara seluas 647.133 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No.359/Menhut-II/2004) yang dikelola Perum Perhutani (19,90 persen dari total luas Jawa Tengah) dan hutan rakyat yang diperkirakan saat ini seluas 224.462 Ha. Ditinjau dari segi daya saing daerah, sumber daya hutan merupakan salah satu tolok ukur dalam indikator daya saing daerah pada aspek infrastruktur dan sumber daya alam. Hasil studi Bank Indonesia (Abdullah *et al.*, 2002: 231) terkait sumber daya hutan Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada tingkat nasional, posisi Jawa Tengah menempati urutan ke-11 berdasarkan luasannya. Namun jika dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa, posisi Jawa Tengah berada pada urutan ke-2 setelah Jawa Timur.

Menurut fungsinya, hutan tersebut terbagi dalam hutan produksi (88,52 persen), hutan lindung (11,35 persen) dan suaka alam/hutan wisata (0,13 persen). Pada tahun 2005, dari hutan produksi dihasilkan kayu jati (pertukangan) tercatat sebanyak 159 ribu meter kubik, turun sebesar 58,19 persen dibanding tahun 2004. Sedangkan produksi kayu rimba mengalami peningkatan sebesar 16,80 persen dari 130 ribu kubik tahun 2004 menjadi 151 ribu kubik tahun 2005 (BPS, 2006).

#### **3.2 Bahan Baku Kayu Bagi Industri**

Faktor produksi yang menjadi isu utama industri pengolahan kayu dan mebel (IPKM) Jawa Tengah saat ini adalah keterbatasan pasokan bahan baku

kayu. Keadaan pasokan bahan baku kayu di Jawa Tengah dapat dilihat dari besarnya kayu yang beredar. Berdasarkan sumbernya kayu yang beredar di Jawa Tengah berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu dari luar Jawa dan produksi dari internal Jawa Tengah sendiri. Kayu dari luar Jawa berasal dari wilayah penghasil kayu utama seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Di samping itu mulai tahun 2002, Jawa Tengah melakukan impor kayu olahan dan mulai tahun 2006 impor kayu bulat (log). Kayu produksi internal Jawa Tengah terdiri dari kayu produksi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan kayu rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Jawa Tengah dan Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (BP2HH) Wilayah Semarang yang disajikan pada Tabel III.1, volume masing-masing dari sumber pasokan rata-rata dalam 5 (lima) terakhir adalah sebagai berikut : kayu luar Jawa dan impor sebesar 0,80 juta m<sup>3</sup>/tahun, kayu produksi Perhutani Unit I Jawa Tengah 0,40 juta m<sup>3</sup>/tahun dan kayu rakyat sekitar 1 m<sup>3</sup>/tahun 360.81 (selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1). Sehingga total pasokan kayu Jawa Tengah rata-rata sebesar 2,18 juta m<sup>3</sup>/tahun.

**TABEL III.1**  
**VOLUME KAYU BULAT YANG BEREDAR DI JAWA TENGAH (m<sup>3</sup>)**

No	Sumber Kayu	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006
1	Luar Jawa & impor	435.871	1.182.550	1.054.572	1.307.134	434.422
2	Perhutani Jawa Tengah	586.131	341.864	348.579	375.482	293.761
3	Kayu Rakyat	1.000.000*	1.000.000*	1.000.000*	1.000.000*	924.445
	Jumlah	2022002.302	2524414.126	2403151.277	2682616.411	1.652.628

Keterangan: \*)Kayu rakyat tahun 2002-2005 merupakan perkiraan produksi minimum berdasarkan data Masyarakat Industri Kehutanan (MIK, 2007) yang menyebutkan produksi kayu rakyat 1 – 1,7 juta m<sup>3</sup> /tahun dan Ditjen Industri Kimia dan Agro menyebutkan 1,7 juta m<sup>3</sup> /tahun.

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perum Perhutani Unit I (2007), diolah

Menurut jenisnya, kayu dari luar Jawa pada umumnya termasuk kelompok jenis meranti (meranti, bangkirai, keruing dan merbau). Jenis kayu impor antara lain pinus dan oak, kayu produksi Perhutani didominasi kayu jati dan mahoni serta kayu rakyat sebagian besar merupakan jenis kayu sengon. Kelompok jenis meranti dan sengon digunakan sebagai bahan baku industri *woodworking* dan panel kayu. Adapun kayu jati merupakan bahan baku utama industri mebel yang merupakan produk utama Jawa Tengah.

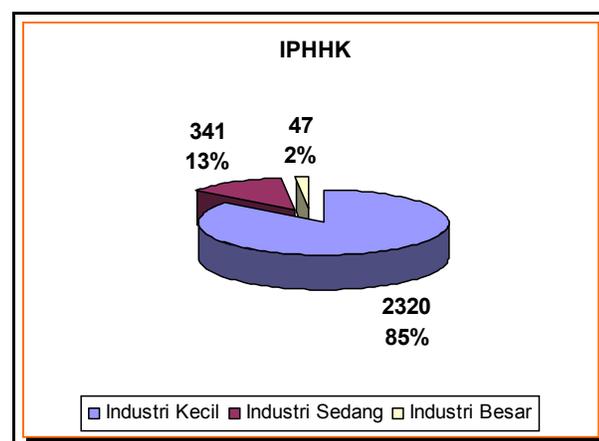
Sistem pengadaan bahan baku kayu oleh industri secara umum mengikuti mekanisme pasar. Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber bahan baku kayu di Jawa Tengah berasal dari tiga sumber yaitu hutan rakyat, Perhutani dan kayu dari luar Jawa melalui Pedagang Kayu Antar Pulau. Pada umumnya industri sedang dan besar pengadaan bahan bakunya dengan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu yang kontraknya dapat diperbaharui, selain melalui pembelian bebas, baik dengan mengikuti lelang atau bukan lelang. Kayu dari Perhutani dijual dengan sistem lelang. Sedangkan industri kecil pada umumnya melalui pembelian bebas, sehingga resiko tidak mendapatkan pasokan lebih besar.

Industri kayu di suatu daerah pada prakteknya mendapatkan bahan baku tidak hanya dari daerah di mana industri berada, akan tetapi seringkali berasal dari daerah lain, bahkan yang jaraknya sangat jauh. Industri kayu yang berada di Semarang, bahan bakunya bukan dari Semarang, melainkan dari luar Jawa, hutan rakyat dan Perhutani yang sumbernya dari wilayah lain. Situasi ini menggambarkan bahwa industri kayu di Jawa Tengah sangat menyebar dan belum terkonsentrasi pada suatu wilayah.

### 3.3 Industri Pengolahan Kayu Jawa Tengah

#### 3.3.1 Sebaran Industri

Industri pengolahan kayu di Jawa Tengah berdasarkan prosesnya dikelompokkan menjadi industri primer dan industri lanjutan (sekunder). Industri primer didominasi oleh industri penggergajian sedangkan industri lanjutan didominasi oleh industri mebel. Industri pengolahan kayu primer disebut Industri Primer Hasil Hutan (IPHHK). Berdasarkan kapasitasnya IPHHK terdiri dari 3 (tiga) skala industri yaitu besar, menengah dan kecil. Gambar 3.1 menunjukkan komposisi IPHHK Jawa Tengah serta Tabel III.2 merinci sebaran IPHHK Jawa Tengah berdasarkan kapasitasnya. Berdasarkan jenis industrinya IPHHK tersebut hampir seluruhnya (99,52%) merupakan industri penggergajian (*sawmill*) dan sisanya adalah industri venir 0,37% serta industri kayu lapis (*plywood*) 0,11%. Di samping industri primer, di Jawa Tengah juga terdapat banyak unit industri sekunder yang pada umumnya merupakan lanjutan dari industri primer.



Sumber: Dinas Perindustrian Jawa Tengah (2006), diolah.

**GAMBAR 3.1**  
**KOMPOSISI JUMLAH IPHHK JAWA TENGAH 2006 BERDASARKAN**  
**SKALA INDUSTRI NYA**

**TABEL III.2**  
**JUMLAH IPHHK MENURUT KAPASITAS PRODUKSI PER**  
**KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah IPHHK menurut kapasitas produksi				Jumlah
		< 2000 m <sup>3</sup> /th	2000-6000 m <sup>3</sup> /th	> 6000 m <sup>3</sup> /th	Lainnya	
1	Banjarnegara	122	25	1	-	148
2	Banyumas	18	35	2	39	94
3	Batang	78	9	2	-	89
4	Bloora	128	5	1	20	154
5	Boyolali	79	3	-	-	82
6	Brebes	199	14	2	5	220
7	Cilacap	334	31	2	-	367
8	Demak	1	10	3	-	14
9	Grobogan	144	-	-	-	144
10	Jejara	3	4	2	453	462
11	Karanganyar	60	9	2	39	110
12	Kebumen	78	2	2	1	83
13	Kendal	110	8	1	2	121
14	Klaten	30	5	-	8	43
15	Kudus	22	4	1	1	28
16	Magelang	-	6	1	-	7
17	Pati	34	5	-	-	39
18	Pekalongan	20	42	-	-	62
19	Pemalang	95	8	-	-	103
20	Purbalingga	66	7	4	-	77
21	Purworejo	131	13	1	43	188
22	Rembang	190	1	-	-	191
23	Semarang	70	9	1	72	152
24	Sragen	40	2	-	7	49
25	Sukoharjo	111	4	2	3	120
26	Tegal	13	8	1	-	22
27	Temanggung	27	27	9	2	65
28	Wonogiri	63	6	-	62	131
29	Wonosobo	54	33	4	-	91
30	Kota Semarang	-	6	3	102	111
<b>Jumlah</b>		<b>2.320</b>	<b>341</b>	<b>47</b>	<b>859</b>	<b>3.567</b>

Catalan :

\* Industri Lainnya adalah industri yang belum mencantumkan kapasitas produksinya dalam M<sup>3</sup>/Th

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (2006)

Jumlah unit industri mebel se-Jawa Tengah menurut Dinas Perindustrian Jawa Tengah yang dikutip Ditjen Industri Agro adalah sebanyak 42.336 unit yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota dimana 9 (sembilan) kabupaten/kota di antaranya memiliki jumlah unit industri mebel > 1000 unit (Tabel III.3).

**TABEL III.3**  
**KABUPATEN/KOTA UTAMA INDUSTRI MEBEL JAWA TENGAH**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha
1	Kabupaten Jepara	9,876
2	Kabupaten Klaten	5,243
3	Kabupaten Sragen	5,071
4	Kabupaten Semarang	4,839
5	Kabupaten Sukoharjo	3,259
6	Kabupaten Blora	2,839
7	Kota Surakarta	2,093
8	Kabupaten Wonogiri	1,484
9	Kabupaten Boyolali	1,110

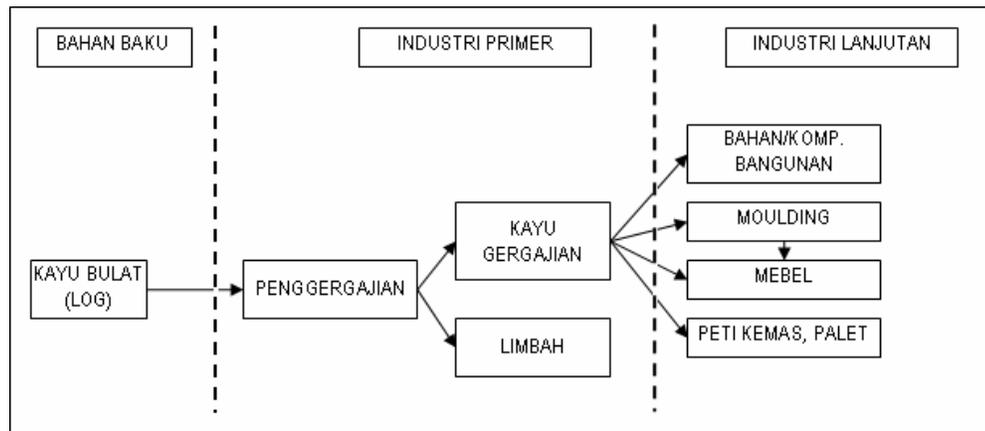
*Sumber: Ditjen Industri Kimia dan Agro (2006)*

### 3.3.2 Proses Pengolahan Kayu di Industri

Berdasarkan proses pengolahan terhadap bahan bakunya, industri pengolahan kayu dibagi menjadi dua kelompok yaitu industri primer dan industri sekunder. Industri primer adalah industri yang mengolah atau mengkonversi pertama kali kayu bulat (log) menjadi kayu olahan, baik yang berupa kayu gergajian, kayu serpih, venir dan kayu lapis. Industri yang mengolah lebih lanjut produk dari industri primer disebut sebagai industri sekunder atau industri lanjutan (Rachman, 2000).

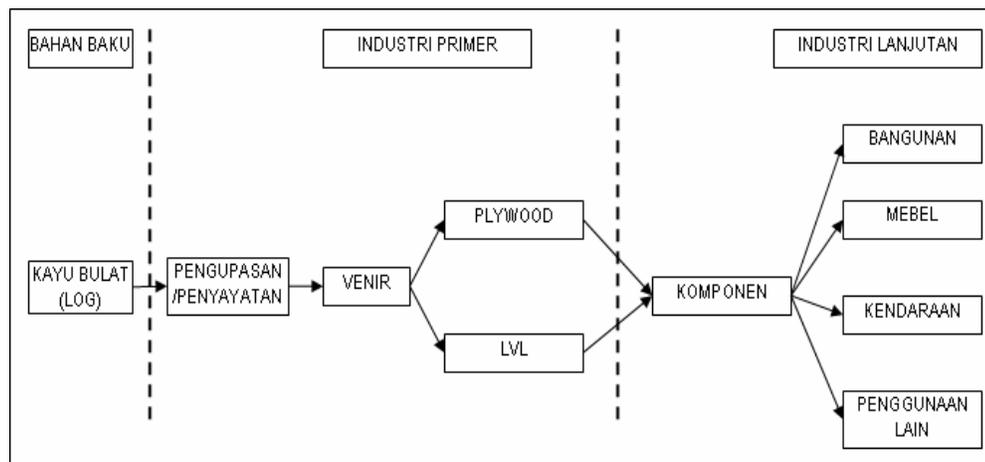
Saat ini, pada umumnya industri pengolahan kayu menghasilkan beberapa jenis produk atau suatu industri primer juga telah terintegrasi dengan industri lanjutannya. Inilah yang dimaksud dengan industri terpadu. Namun demikian, yang langsung berkaitan dengan ketersediaan (pasokan) bahan baku kayu (log) adalah industri primer sehingga industri primer inilah yang telah diatur oleh Pemerintah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya dan kewenangan pembinaannya oleh Departemen Kehutanan.

Proses pengolahan kayu yang terjadi di industri pengolahan kayu untuk masing-masing jenis produknya diilustrasikan seperti pada Gambar 3.2.



Sumber: Rachman (2000), dimodifikasi

(a)



Sumber: Santoso (2007, pers.comm)

(b)

### GAMBAR 3.2

**GARIS BESAR PROSES DI INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU:**  
**(a) Proses Di Industri Penggergajian dan Lanjutannya**  
**(b) Proses Di Industri Venir, Plywood dan Laminated Veneer Lumber (LVL) serta Industri Lanjutannya**

Gambar 3.2 di atas memperlihatkan bahwa industri pengolahan kayu yang terkait langsung dengan pasokan bahan baku (log) semestinya adalah industri

primer (hulu). Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi dikotomi penggunaan bahan baku kayu bundar oleh industri pengolahan kayu. Sehingga muncul anggapan sebagaimana dinyatakan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia (2006), bahwa konsumsi kayu bulat selama ini lebih banyak ( $\pm 70\%$ ) diserap oleh industri kayu hulu (primer), seperti kayu lapis dan kayu gergajian. Sedangkan kedua jenis produk tersebut sebagian bukan sebagai bahan baku industri lanjutan, melainkan merupakan produk yang langsung dapat digunakan seperti untuk bahan bangunan. Bahkan kayu lapis merupakan komoditas kayu olahan yang langsung dapat diekspor. Sementara itu, industri hilir (lanjutan) dengan berbagai jenis produknya memperoleh alokasi hanya  $\pm 30\%$  kayu bulat. Dengan semakin bekurangnya produksi kayu bulat, adanya dikotomi tersebut semakin menyulitkan industri lanjutan (hilir) untuk memperoleh pasokan bahan baku.

Industri lanjutan yang banyak terdapat di Jawa Tengah adalah industri pengerjaan kayu (*woodworking*) yang menghasilkan berbagai produk moulding dan komponen serta industri mebel. Industri *woodworking* biasanya merupakan industri berskala besar sedangkan industri mebel sebagian besar merupakan industri kecil-menengah (IKM). Industri primer pun sebagian besar merupakan IKM (Gambar 3.1). IKM inilah yang mengalami kesulitan akses terhadap bahan baku karena harga bahan baku kayu (*log*) semakin mahal akibat ketersediaannya semakin terbatas padahal kebutuhan bahan baku oleh setiap unit industri kecil-menengah mebel tidak sebesar industri hulu.

*Saat ini industri permebelan memerlukan kebijakan yang membantu ketersediaan bahan baku (pasokan) bahan baku kayu dengan harga yang terjangkau dan mudah*

*diperoleh. Kebijakan FAK-B<sup>1</sup> dirasakan memberatkan terutama IKM karena mereka hanya memerlukan bahan baku kayu tidak dalam jumlah besar. Isu illegal logging juga berakibat kayu-kayu dari tanaman rakyat sulit dipasok ke industri mebel, seringkali dianggap illegal saat kayu tersebut ditebang dan diangkut” (Ketua Asmindo Jawa Tengah).*

*Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55 Tahun 2006 harus dicari solusinya karena tidak semua industri (terutama industri kecil) bisa beli kayu langsung sehingga menyulitkan kalau harus dengan FAKB, mereka juga membeli bahan baku kayu dalam jumlah kecil. Oleh karena itu P55 ini perlu penyempurnaan” (Ketua Masyarakat Industri Kehutanan/MIK, Jawa Tengah).*

Kebutuhan bahan baku kayu setiap unit industri pengolahan kayu dan mebel yang kecil tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri, karena para pemasok kayu lebih menyukai pembelian kayu dalam partai besar. Dari sudut pandang ini, keberadaan Terminal Kayu Terpadu (TKT) untuk membantu IKM dibutuhkan karena TKT dapat melayani pembelian bahan baku kayu sesuai kebutuhan, baik dalam partai kecil atau bahkan eceran serta dalam partai besar. Ketua MIK menyatakan:

*TKT sangat diperlukan karena memiliki manfaat sebagai penyedia kayu yang legal bagi industri Perkayuan; memberikan perlindungan hukum di pasar internasional; serta membantu seluruh industri perkayuan agar mendapatkan kemudahan akses bahan baku sesuai kebutuhan, kemudahan koordinasi dan efisiensi dengan semua pihak atau instansi terkait, kepastian harga bahan baku kayu yang kompetitif, kemudahan akses bahan baku bagi IKM, adanya standarisasi bahan baku yang dibutuhkan industri, kepastian hukum dalam kebijakan pemerintah, mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah dan dukungan dari perbankan yang terlanjur menganggap industri kehutanan sun set industri, sehingga industri kehutanan dapat kembali jadi andalan utama devisa..*

### **3.4 Sebaran Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dan Jaraknya Terhadap Kota Semarang**

Secara administratif Propinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota (Peta pada Gambar 1.2). Berdasarkan Tabel III.2 dan Tabel III.3 serta

<sup>1</sup> FAK-B (Faktur Angkutan Kayu Bulat) merupakan dokumen legalitas angkutan kayu sesuai kebijakan terbaru Departemen Kehutanan mengenai Tata Usaha Kayu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.55/2006.

Lampiran 2 terlihat bahwa IPKM di Jawa Tengah tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan beberapa konsentrasi berdasarkan jumlah unit industrinya di beberapa Kabupaten/Kota. Kondisi persebaran IPKM di wilayah Jawa Tengah tentu akan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam rencana pembangunan terminal kayu.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, maka faktor yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pembangunan terminal kayu adalah jarak antara masing-masing wilayah kota/kabupaten tersebut sebagai daerah produsen dan industri pengolahan kayu dengan lokasi dimana pembangunan terminal kayu direncanakan. Jika terminal kayu akan dibangun di sekitar Kota Semarang maka jarak antara Kota Semarang dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah disajikan dalam Tabel III.4. Jarak antara lokasi terminal kayu dengan kota-kota lainnya di Jawa Tengah akan menentukan besar-kecilnya biaya angkut bahan baku kayu dan ke terminal dan ke industri.

**TABEL III.4**  
**JARAK DARI SEMARANG KE KOTA-KOTA LAIN DI JAWA TENGAH**

NAMA KOTA	Banjarnegara	Batang	Bloora	Boyolali	Brebes	Cilacap	Demak	Jepara	Karanganyar	Kebumeh	Kendal	Klaten	Kudus	Magelang	Pati	Pekalongan	Pemalang	Purbalingga	Purwodadi	Purwokerto	Puworejo	Rembang	Salatiga	Semarang	Sragen	Sukoharjo	Surakarta	Tegal	Temanggung	Ungaran	Wonogiri	Wonosobo
Semarang	146	93	147	75	178	282	26	70	174	162	29	113	51	75	75	100	135	201	67	221	118	111	48		129	113	102	165	77	27	133	119

Sumber: BPS Jawa Tengah (2006)

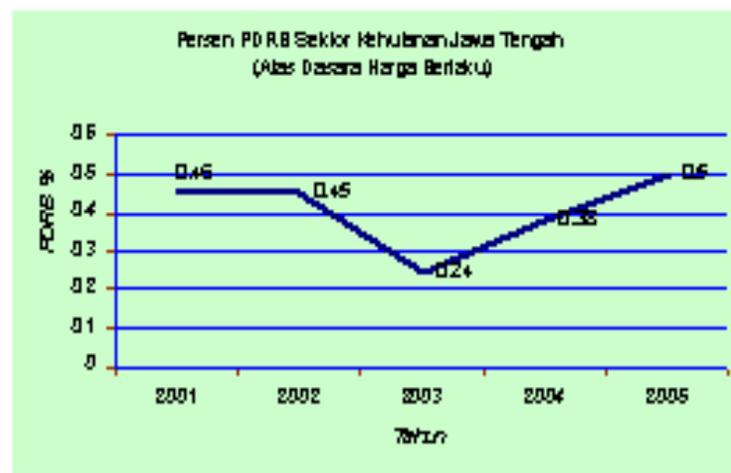
### 3.5 Peran Industri Kayu dan Institusi Terkait di Jawa Tengah

#### 3.5.1 Peran Industri Kayu Berdasarkan PDRB

Industri kayu di Jawa Tengah sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan bahan baku kayu. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya

pasokan kayu lantaran terlalu ketatnya implementasi operasi pemberantasan *illegal logging* di sejumlah provinsi di Indonesia. Langkah penyelamatan perlu dilakukan karena selama ini Jateng dikenal sebagai sentra industri kayu. Bahkan, ekspor terbesar sampai 30% dari Pelabuhan Tanjung Emas berupa permebelan. Beberapa langkah penyelamatan yang perlu dilakukan antara lain mengikuti lelang kayu di Papua dan propinsi lainnya serta membangun terminal kayu di Semarang (Suara Merdeka, 2005).

Dalam Buku Statistik Jawa Tengah Dalam Angka, lapangan usaha kehutanan merupakan sub sektor dari pertanian. Secara makro, kontribusi sub sektor kehutanan terhadap perekonomian regional Jawa Tengah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun fluktuatif, namun dalam tiga tahun terakhir (2003 – 2005) PDRB dari lapangan usaha kehutanan menunjukkan peningkatan (Gambar 3.3).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah)

**GAMBAR 3.3**  
**PDRB SEKTOR KEHUTANAN JAWA TENGAH**  
**LIMA TAHUN TERAKHIR**

### **3.5.2 Institusi Terkait**

Institusi terkait dengan industri kayu di Jawa Tengah terdiri dari instansi pemerintah dan swasta. Instansi pemerintah yang terkait adalah Dinas Kehutanan sebagai regulator kehutanan serta pembinaan produsen dan peredaran kayu serta industri primer hasil hutan. Dinas Perindustrian terkait sebagai regulator dan pembinaan industri sekunder kehutanan (kayu). Sebagai wadah perusahaan industri kayu, terdapat asosiasi yaitu Asmino (Asosiasi Industri Mebel Indonesia) Jawa Tengah. Di bawah organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah juga terdapat Kompartemen Industri Kehutanan. Adapun wadah semua masyarakat Jawa Tengah yang terkait industri kehutanan terdapat institusi MIK (Masyarakat Industri Kehutanan). Semua institusi tersebut merupakan responden penelitian ini (Tabel I.2 hal. 22).

## **3.6 Permasalahan IPKM Jawa Tengah dan Terminal Kayu**

### **3.6.1 Permasalahan IPKM dan Usulan Solusinya**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat enam permasalahan umum yang dihadapi industri pengolahan kayu dan mebel (IPKM) Jawa Tengah. Permasalahan dapat diklasifikasikan setelah ditelusuri dengan teknik pohon masalah sebab-akibat, sampai ditemukan akar atau inti masalahnya. Tabel III.5 merinci keenam permasalahan tersebut dengan masing-masing karakteristiknya. Namun demikian, keenam permasalahan tersebut belum menunjukkan urutan prioritas permasalahannya. Analisis terhadap permasalahan industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah tersebut disajikan pada Bab IV.

**TABEL III.5**  
**PERMASALAHAN UMUM INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DAN**  
**MEBEL JAWA TENGAH**

No.	Permasalahan Umum
(1)	Kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan bahan baku kayu (BBK) dimana kebutuhan lebih besar dibanding pasokan yang mengakibatkan industri kekurangan BBK, harga BBK terus mengalami kenaikan, dan tidak ada kepastian/jaminan pasokan BBK
(2)	Kebijakan/peraturan dari pemerintah dirasa memberatkan, sering berubah-ubah, membingungkan, kurang jelas, cenderung menimbulkan biaya, kurang realistis, dan tidak menyeluruh
(3)	Iklm usaha kurang kondusif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- persaingan harga, produk yang sama bisa dijual dengan harga berbeda termasuk pada saat pameran yang diikuti oleh sesama anggota asosiasi,</li> <li>- kesulitan modal kerja dan pengembangan usaha,</li> <li>- biaya tenaga kerja mahal,</li> <li>- tidak ada perlindungan/jaminan kelangsungan berusaha,</li> <li>- isu <i>illegal logging</i>, pasokan BBK terhambat</li> <li>- masih adanya pungutan liar oleh oknum aparat,</li> <li>- kondisi spekulasi, pelaku usaha yang memiliki modal besar dapat melakukan penimbunan BBK</li> </ul>
(4)	Kompetensi SDM: kinerja dan kualitas tenaga kerja, mentalitas pengusaha, kekurangiapan untuk sertifikasi
(5)	Teknologi, dimana teknologi pengolahan kayu kurang maju, kualitas produk rendah, kurangnya informasi/sosialisasi hasil penelitian tentang bahan baku alternative dan terjadi perubahan <i>trend</i> pasar.
(6)	Kelembagaan dan sarana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- peran asosiasi kurang optimal,</li> <li>- tidak ada sistem/sarana distribusi secara terpadu</li> </ul>

Sumber: Data primer

Untuk mengatasi permasalahan industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah para pihak mengemukakan banyak solusi yang perlu ditempuh, baik menyangkut kebijakan, kelembagaan, fasilitas - termasuk usulan pembangunan terminal kayu - maupun permodalan yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan industri pengolahan kayu dan mebel (IPKM) Jawa Tengah. Solusi terhadap permasalahan IPKM Jawa Tengah yang dikemukakan para pihak terkait disajikan pada Lampiran 1, sedangkan analisis dan pembahasannya pada Bab IV.

### 3.6.2 Rencana Pembangunan Terminal Kayu

Penguasaan distribusi kayu dari luar Jawa oleh Pedagang Kayu Antar Pulau mengakibatkan sulitnya IKM kayu Jateng memperoleh bahan baku. Di samping itu, pasokan bahan baku kayu (BBK) sering menghadapi permasalahan hukum karena kayu yang diterima dianggap kurang memenuhi kelengkapan persyaratan legalitas. Dengan adanya Terminal Kayu Terpadu nantinya diharapkan dapat mengubah mekanisme distribusi BBK dan berfungsi untuk (MIK, 2007):

- a) menjembatani industri dengan sumber BBK
- b) menyeimbang: *stock* (kayu bulat/log dan kayu gergajian) dan harga BBK.
- c) menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan BBK
- d) membantu kemudahan pengrajin/IKM kayu untuk memperoleh BBK
- e) menjamin legalitas.

Dengan fungsi yang dimiliki terminal kayu tersebut maka terminal kayu yang akan dibangun bersifat terpadu dalam layanannya. TKT berupa konsorsium semua pihak terkait dengan industri kayu. Di dalamnya akan terdapat unsur Pemda (Dinas terkait), Dewan Industri Kehutanan, pihak keamanan, pelaku usaha dan LSM. Kayu yang keluar dari TKT terjamin kualitas dan kontinuitasnya karena akan ada kerjasama dengan Pemda asal sumber kayu luar Jawa. Di samping itu terjamin pula aspek legalitasnya karena kayu yang masuk TKT adalah kayu yang sah telah memenuhi semua aspek legalitasnya. Hal ini terjadi karena manajemen TKT akan membuat MOU (Memorandum Of Understanding) dengan berbagai pihak terkait baik secara teknis maupun administrasi di daerah sumber (asal) kayu.

Pengrajin dan IKM sering menjadi subkontraktor produk kayu dari perusahaan besar tetapi sering bermasalah dalam bahan baku kayu yang diolah.

Kayu yang diolah oleh pengrajin dan IKM seringkali kurang memenuhi standar terutama kadar airnya yang masih tinggi karena tidak dioven. Dengan adanya Terminal Kayu Terpadu (TKT) yang dilengkapi dengan unit usaha (jasa) pengolahan primer (penggergajian dan pengeringan/oven), masalah tersebut diharapkan dapat teratasi karena TKT tidak hanya menyediakan kayu bulat melainkan juga kayu gergajian bahkan kayu gergajian yang telah dioven sehingga bisa langsung diolah lebih lanjut menjadi produk sekunder berupa mebel, dll.

Menurut rencana yang diusulkan para pengagasnya, sebagai *pilot project* TKT akan dibangun di sekitar Kota Semarang. Pemilihan rencana lokasi tersebut tentu saja karena berbagai pertimbangan antara lain bahwa Kota Semarang memiliki nilai strategis sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, pusat layanan bagi kota/kabupaten lainnya di Jawa Tengah, pusat pertumbuhan wilayah, serta pusat perdagangan dan jasa. Kegiatan ekspor-impor dan perdagangan antar wilayah, termasuk produk industri kayu, dilakukan dari Semarang. Kayu dari luar Jawa yang masuk ke Jawa Tengah melalui Semarang (Pelabuhan Tanjung Emas), demikian juga produk kayu olahan diekspor melalui Semarang (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, 2006). Hal ini menjadikan Kota Semarang dan sekitarnya dipertimbangkan sebagai lokasi dalam rencana pembangunan terminal kayu Jawa Tengah.

Berdasarkan catatan nilai ekspor hasil kehutanan tahun 2005 dari Kota Semarang menempati urutan kedua (19,60 juta dollar Amerika) setelah ekspor industri lainnya (396,98 juta dollar) (Bappeda dan BPS Kota Semarang, 2005).. Dengan pertimbangan ini pula, nampaknya pembangunan terminal kayu direncanakan lokasinya di sekitar Kota Semarang. Namun demikian, jika terminal kayu akan berlokasi di daerah tersebut maka perlu diperhatikan ketersediaan lahan, kesesuaian ruang dan arah kebijakan pembangunan wilayah.

## **BAB IV**

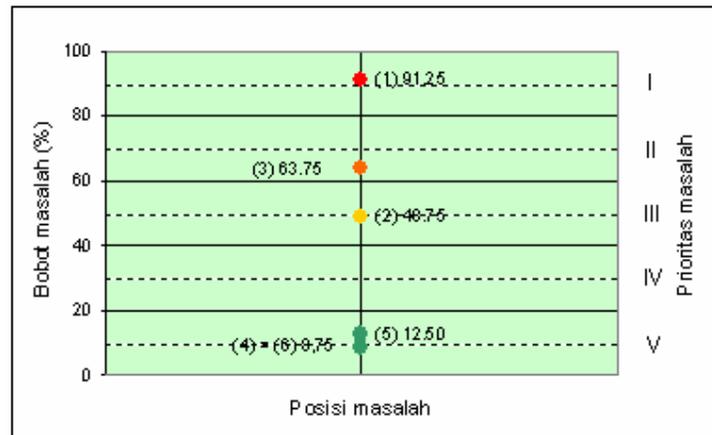
### **ANALISIS KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TERMINAL KAYU TERPADU JAWA TENGAH**

#### **4.1 Analisis Pasokan dan Kebutuhan Bahan Baku Kayu**

##### **4.1.1 Masalah Utama Industri Pengolahan Kayu dan Mebel**

Permasalahan yang terangkum dalam Tabel III.5 (hal. 59) belum menunjukkan permasalahan mana yang paling penting, penting, biasa, kurang penting dan tidak penting atau bukan merupakan masalah. Hal tersebut dapat diketahui setelah kepada setiap kelompok permasalahan diberikan bobot. Berdasarkan urutan prioritas masalah dari responden maka dihitung frekuensi dan persentase terhadap skor maksimum kemudian dibuat lima skala prioritas (I – V) dengan kriteria: 0 – 20 % = Prioritas V (Sangat Tidak Penting), > 20 – 40 % = Prioritas IV (Tidak Penting), > 40 – 60% = Prioritas III (Biasa), > 60 – 80 % = Prioritas II (Penting) dan > 80 – 100 % = Prioritas I (Sangat Penting), maka diketahui tingkat (prioritas) permasalahan umum industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah.

Berdasarkan skala Likert, hasil perhitungan (Lampiran 6) menunjukkan bahwa keenam kelompok permasalahan industri pengolahan kayu dan mebel IPKM Jawa Tengah (Tabel III.5) masuk dalam empat prioritas yaitu Prioritas-I (bobot masalah 91,25%) adalah permasalahan nomor (1), Prioritas-II adalah permasalahan No. (3), Prioritas III adalah permasalahan no (2) dan Prioritas-V yang terdiri dari permasalahan No. (4), (5) dan (6). Oleh karena tidak ada IV maka permasalahan Prioritas-V menjadi Prioritas-IV (Gambar 4.1).



Keterangan: (1), (2), ..., (6) = No. urut masalah mengacu pada Tabel III.5  
 Sumber: Analisis Peneliti (2007)

#### **GAMBAR 4.1** **PRIORITAS PERMASALAHAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU** **DAN MEBEL JAWA TENGAH**

Dengan demikian permasalahan utama industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah secara garis besar terdiri dari 4 kelompok masalah utama, berturut-turut yaitu:

- (1) Kesenjangan antara pasokan dengan kebutuhan bahan baku kayu (BBK) dimana kebutuhan lebih besar dibanding pasokan yang mengakibatkan industri kekurangan BBK, harga BBK terus mengalami kenaikan, dan tidak ada kepastian/jaminan pasokan BBK.
- (2) Iklim usaha kurang kondusif yang disebabkan oleh:
  - persaingan harga, produk yang sama bisa dijual dengan harga berbeda termasuk pada saat pameran yang diikuti oleh sesama anggota asosiasi,
  - kesulitan modal kerja dan pengembangan usaha,
  - biaya tenaga kerja mahal,
  - tidak ada perlindungan/jaminan kelangsungan berusaha,

- isu *illegal logging*, pasokan BBK terhambat
  - masih adanya pungutan liar oleh oknum aparat,
  - kondisi spekulasi, pelaku usaha yang memiliki modal besar dapat melakukan penimbunan BBK
- (3) Kebijakan/peraturan dari pemerintah dirasa memberatkan, sering berubah-ubah, membingungkan, kurang jelas, cenderung menimbulkan biaya, kurang realistis, dan tidak menyeluruh.
- (4) Kompetensi sumber daya manusia (SDM), teknologi serta kelembagaan dan sarana/prasarana.

Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya kesesuaian permasalahan bahan baku kayu pada skala regional Jawa Tengah dengan permasalahan industri kayu secara nasional. Bahkan masalah defisit bahan baku kayu telah menjadi permasalahan industri kayu secara global.

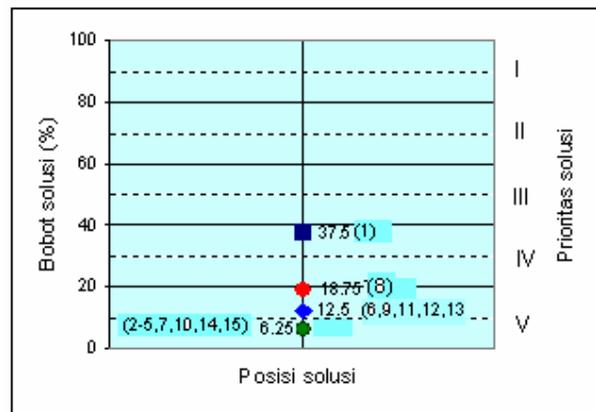
Kurangnya pasokan bahan baku kayu bagi industri telah lama berlangsung di Indonesia sejak berkurangnya produksi kayu dari hutan alam. Hasil analisis terhadap permasalahan umum industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah pada penelitian ini menunjukkan konsistensi permasalahan utama yang dihadapi industri pengolah kayu. Sedangkan dua permasalahan umum lainnya yaitu kebijakan dan iklim usaha yang kurang kondusif serta kompetensi SDM, teknologi, kelembagaan dan sarana/prasarana, kemungkinan bisa berbeda dengan wilayah lain.

Di samping terjadinya defisit bahan baku kayu sebagai masalah utama, permasalahan terkait bahan baku baik dari sisi pasokan maupun dari sisi permintaan (industri) yang dikemukakan responden adalah:

1. *Kesenjangan antara kebutuhan dengan pasokan bahan baku kayu (BBK) mengakibatkan harga naik (mekanisme pasar). Di samping itu, harga juga tidak stabil (berubah-ubah dalam jangka waktu pendek) sehingga pelaku usaha/industri yang memiliki modal, melakukan spekulasi terus-menerus dengan melakukan penimbunan BBK sedangkan industri kecil kesulitan mendapatkannya. Tidak stabilnya harga kayu juga menyulitkan industri untuk (Perhutani, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Bappeda, BP2HH, PT JLA, PT Hartco, MIK, Asmino, CV Rejaya, Petani Kayu Rakyat)*
2. *Selain berkurang pasokannya, bahan baku kayu juga menurun kualitasnya sehingga sebagian kurang memenuhi standar (Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian).*
3. *Adanya pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat yang dirasakan memberatkan terutama bagi pelaku usaha kecil (CV Andewa, CV Rejaya, BP2HH).*
4. *Kurangnya pembinaan dari instansi terkait dan perlunya bimbingan pemerintah (Tim Klaster, CV Andewa, Petani Kayu Rakyat).*
5. *Penanaman lebih lambat dibanding penebangan (CV Andewa).*
6. *Peraturan Menhut No. P55 dan P51 kurang realistis; Peraturan dokumen FAKB/FAKO hanya mungkin dimiliki oleh industri besar dan perlu disederhanakan sehingga IKM pun bisa memilikinya. Proses administrasi sering lebih lambat sedangkan insuriti harus tetap beroperasi (Tim Klaster, Cv Dyan Indra, Asmino, Kadin, MIK).*
7. *Bahan baku kayu yang digunakan terutama untuk industri mebel masih jati dan mahoni "minded", kurang diversifikasi BBK sedangkan BBK substitusi belum terjamin kontinuitas pasokannya (Kadin, CV Dyan Indra, Dinas Perindustrian).*
8. *Isu illegal logging menyulitkan IKM untuk memperoleh BBK; Industri yang memperoleh BBK ilegal dapat menjual produknya dengan harga lebih murah sehingga merusak tatanan industri yang bekerja dengan BBK legal (Asmino, Kadin).*
9. *Tidak ada sarana prasarana yang mendukung/menjamin pasokan BBK secara kontinyu dengan harga yang disepakati pihak suplayer dan industri. Tidak ada fungsi penyangga BBK (stock buffer) dari Pemerintah, saat ini yang berlaku benar-benar mekanisme pasar (CV Rejaya, Kadin).*

Wawancara juga menghasilkan banyak solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan IPKM Jawa Tengah. Banyaknya solusi yang dikemukakan menunjukkan kompleksitas permasalahan yang saling terkait dan permasalahan terkait bahan baku saja terangkum ada 9 permasalahan. Dari seluruh solusi yang dikemukakan para pihak terkait (responden hanya mengemukakan usulan solusi tanpa memberikan tingkat kepentingannya), dapat ditentukan tingkat kepentingannya berdasarkan besarnya frekuensi solusi. Artinya semakin sering suatu solusi disebut, menunjukkan semakin penting dan prioritas

solusi tersebut menurut responden, maka dapat dihitung bobotnya berdasarkan perbandingan antara frekuensi dengan jumlah responden. Dari perhitungan diperoleh bahwa nilai tertinggi untuk solusi adalah frekuensi = 6 dan bobotnya adalah 37,5%, bahwa diperlukan suatu institusi yang menjembatani antara sisi pasokan bahan baku kayu (BBK) dengan kebutuhannya oleh industri. Pembangunan Terminal kayu Terpadu merupakan solusi yang tepat sebagai jembatan pemasok BBK dengan industri. Jika dilihat bobotnya, solusi tersebut tidak mutlak atau kurang meyakinkan karena  $< 50\%$  (Gambar 4.2). Artinya, pembangunan terminal kayu terpadu bukan satu-satunya solusi yang harus ditempuh karena jika solusi tersebut dilakukan secara parsial maka semua bobotnya rendah.



*Sumber: Analisis Peneliti (2007)*

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nomor urut solusi yang mengacu pada Lampiran 1

#### **GAMBAR 4.2** **PRIORITAS SOLUSI PARSIAL** **INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU DAN MEBEL JAWA TENGAH**

Dalam skala prioritas, secara parsial semua solusi dari bobot tertinggi sampai terendah masing-masing termasuk prioritas IV (solusi no. 1) dan lainnya

prioritas V (Gambar 4.2). Artinya, secara parsial tidak ada solusi yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara simultan. Oleh karena solusi tersebut muncul dari para pihak terkait industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah itu sendiri tidak ada solusi lain yang lebih prioritas, maka secara berurutan ketiga kelompok prioritas solusi tersebut menjadi prioritas pertama, dan kedua. Namun dalam implementasinya perlu ditempuh secara terpadu.

Sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 1 diketahui bahwa secara umum solusi yang dikemukakan cenderung lebih pada sisi industri, sedangkan solusi yang menyinggung sisi produksi/pasokan kayu yaitu dengan upaya penanaman hutan sebagai upaya mendasar yang harus dilakukan untuk menghasilkan kayu, hanya dikemukakan oleh dua responden (bobot 15%). Hal ini bisa ditafsirkan bahwa sisi industri beranggapan kayu terus diproduksi dan penanaman atau reforestasi terus berjalan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Laju deforestasi hutan Indonesia mencapai minimal 1,6 juta hektar per tahun (Siregar, 2003), bahkan lebih dari 2,5 juta hektar per tahun (Purnama *et al.*, 2003). Sementara itu, pembangunan hutan tanaman tidak secepat laju eksploitasi dan deforestasi.

Realisasi pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dari tahun 1989/1990 sampai tahun 2004 baru mencapai 3,25 juta hektar atau rata-rata sekitar 200 ribu hektar per tahun (Departemen Kehutanan, 2005)<sup>1</sup>. Hal ini menimbulkan kekhawatiran program revitalisasi industri kehutanan yang dicanangkan Departemen Kehutanan sejak tahun 2005 dengan memperluas hutan tanaman industri terancam gagal. Rendahnya realisasi penanaman akan

---

<sup>1</sup> Data pembangunan hutan tanaman atau penanaman kembali areal hutan yang tercatat secara resmi dalam jumlah luasan yang signifikan adalah pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan praktek penanaman hutan sejak sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) atau sejenisnya diterapkan di areal hutan alam, tidak ada kejelasan data realisasinya.

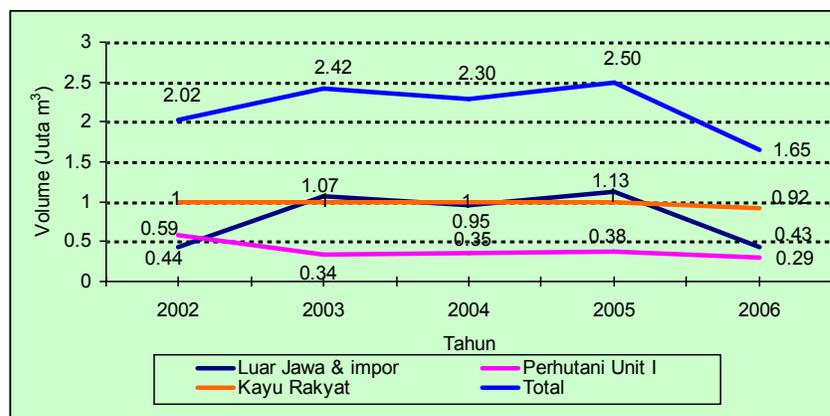
menyulitkan percepatan peralihan penggunaan bahan baku dari hutan alam ke HTI. Padahal Departemen Kehutanan sudah memutuskan menghentikan eksploitasi hutan alam pada tahun 2014. Seluruh kebutuhan bahan baku industri kehutanan harus diambil dari HTI (Kompas, 2007c).

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan utama yaitu kurangnya pasokan bahan baku kayu bagi IPKM Jawa Tengah dan analisis solusi terhadap masalah kekurangan bahan baku tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan terminal kayu tidak dapat menyelesaikan permasalahan, dengan alasan:

- (1) Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mendasar/utama IPKM Jawa Tengah adalah kekurangan pasokan. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kesesuaian permasalahan bahan baku kayu pada skala regional Jawa Tengah dengan permasalahan industri kayu secara nasional. Bahkan masalah defisit bahan baku kayu telah menjadi masalah secara global. Kekurangan pasokan merupakan akibat dari semakin berkurangnya produksi kayu dari hutan. Artinya, jika produksi kayu dari hutan mencukupi untuk pasokan bahan baku maka, IPKM Jawa Tengah tidak akan kekurangan pasokan.
- (2) Solusi yang dikemukakan para pihak terkait tidak menunjukkan bahwa pembangunan terminal kayu merupakan solusi yang sangat penting. Artinya, sesungguhnya ada solusi yang sangat penting yang tidak dominan terungkap berkaitan dengan poin (1) diatas yaitu bagaimana meningkatkan produksi kayu dari hutan. Satu-satunya cara yaitu melakukan penanaman.

#### 4.1.2 Pasokan Kayu Regional, Nasional dan Global

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani dan BP2HH, diketahui bahwa kayu yang beredar di Jawa Tengah pada tahun 2006 menurun volumenya disebabkan oleh berkurangnya kayu yang masuk dari luar Jawa dan produksi kayu Perum Perhutani Unit I (Gambar 4.3).

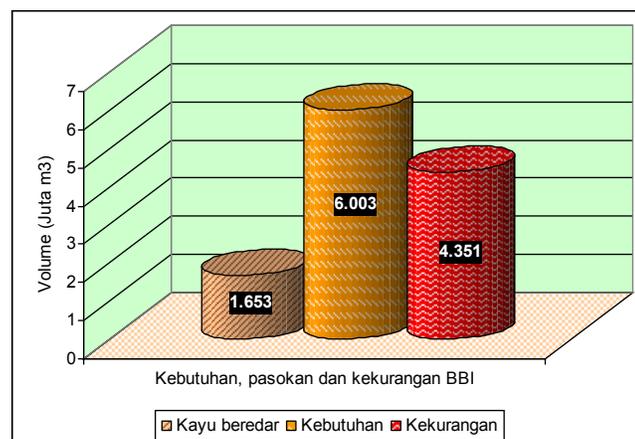


Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perum Perhutani Unit I (2007), diolah

**GAMBAR 4.3.**  
**VOLUME PEREDARAN KAYU DI JAWA TENGAH TAHUN 2002 – 2006**

Data mengenai pasokan bahan baku dan kebutuhannya bagi IPKM Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besaran volumenya. Menurut Laporan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia (2006), kebutuhan bahan baku untuk industri perkayuan di Jawa Tengah mencapai 6,6 juta  $M^3$  per tahun. Kemampuan areal produksi di Jawa Tengah hanya menghasilkan bahan baku kayu sebesar 2,05 juta  $M^3$  per tahun, yang berasal dari kawasan hutan Perum Perhutani sebanyak 0,35  $M^3$  dan dari kayu rakyat sebesar 1,77  $M^3$ , sehingga terdapat kekurangan bahan baku kayu sekitar 4,55  $M^3$  per tahun. Defisit kayu Jawa Tengah menurut MIK (2007) rata-rata sebesar 3,96 juta  $m^3$ /tahun.

Gambar 4.4 (data rinci pada Lampiran 3 serta Lampiran 4) menunjukkan bahwa total pasokan kayu Jawa Tengah tahun 2006 adalah sebesar 1,65 juta m<sup>3</sup> sedangkan industri pengolahannya membutuhkan bahan baku kayu sekitar 6 juta m<sup>3</sup> sehingga terjadi defisit bahan baku kayu bagi industri sebesar 4,35 juta m<sup>3</sup>. Meskipun dengan data-data yang berbeda, akan tetapi semuanya menunjukkan bahwa pasokan bahan baku kayu bagi industri di Jawa Tengah mengalami defisit sekitar 4 juta m<sup>3</sup>/tahun.



Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (2006), diolah

**GAMBAR 4.4.**  
**KESENJANGAN ANTARA PASOKAN DAN KEBUTUHAN BAHAN**  
**BAKU KAYU BAGI IPHHK JAWA TENGAH TAHUN 2006**

Besarnya defisit bahan baku kayu bagi industri di Jawa Tengah telah mengakibatkan berbagai dampak mulai dari penurunan kapasitas sampai penutupan industri. Menurut Firdaus (2007), rencana pembangunan terminal kayu merupakan salah satu upaya penyelamatan industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah agar industri minimal bisa bertahan untuk menghindari dampak sosial antara lain PHK massal.

Namun permasalahannya adalah defisit kayu bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, akan tetapi merupakan masalah nasional bahkan masalah global. Defisit bahan baku kayu bagi industri di Indonesia telah berlangsung sejak menurunnya produksi log dari hutan alam. Menurut analisis Greenomics (2004) pada periode 1991-2001 kemampuan pasokan hutan alam bagi industri adalah 88%, sedangkan pada periode 2002-2004 telah merosot menjadi hanya 20%. Meskipun dengan data yang berbeda-beda antar instansi/institusi terkait industri kehutanan, sebagaimana pernah ditunjukkan dalam laporannya oleh Tim Adhoc Restrukturisasi Usaha Di Bidang Kehutanan yang dibentuk Menteri Kehutanan tahun 2003, namun secara umum menunjukkan bahwa industri pengolahan kayu Indonesia mengalami defisit bahan baku kayu. Sebagai gambaran, menurut Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Suhariyanto, 2003), industri pengolah kayu, yang didominasi oleh industri penggergajian dan kayu lapis, kebutuhan bahan bakunya mencapai 63,50 juta m<sup>3</sup>/tahun, padahal produksi kayu nasional hanya 11,42 juta m<sup>3</sup> (tahun 2003). Sehingga pada tahun 2003 defisit bahan baku kayu mencapai 52,08 juta m<sup>3</sup>. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa defisit bahan baku kayu bagi industri di Indonesia mencapai sekitar 42 juta karena kebutuhan bahan baku bagi industri sebesar 55,55 juta m<sup>3</sup> sedangkan kemampuan pasokan 13,55 (Lampiran 2). Menurut Balfas (2005) dalam berbagai forum disebutkan bahwa kekurangan bahan baku kayu untuk industri di Indonesia mencapai 50 juta m<sup>3</sup>/tahun.

Berdasarkan data Departemen Kehutanan tahun 2004 (Lampiran 2), daerah penghasil kayu utama di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua menunjukkan neraca produksi kayu dan kebutuhan industrinya yang negatif. Hal ini berarti di seluruh wilayah tersebut juga kekurangan bahan baku kayu dan tidak mampu memenuhi kebutuhan industri kayu di wilayahnya sendiri.

Beberapa fenomena yang muncul misalnya seperti yang dikemukakan Kepala Sub Dinas Tertib Pengusahaan Hutan (TPH) Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang mengatakan:

*Di daerah-daerah yang dulu sebagai penghasil kayu juga sekarang kesulitan kayu. Contoh baru-baru ini saya dengar Kalimantan Tengah untuk membangun perumnas saja kesulitan kayu.*

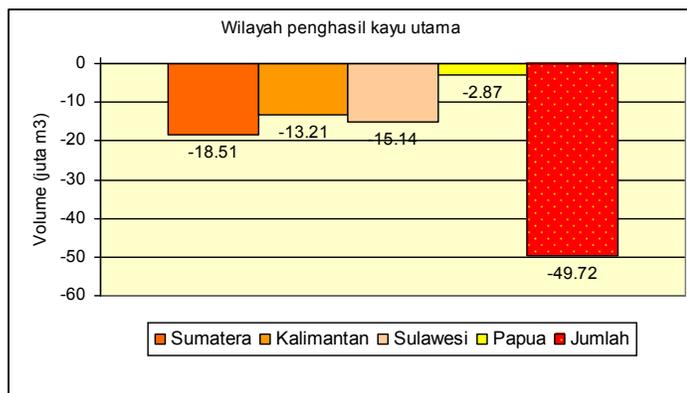
Kompas (2005), antara lain memberitakan bahwa bagi Kalimantan Selatan (Kalsel), rontoknya industri perkayuan tampaknya sangat sulit dihindarkan. Keadaan ini terjadi karena hutan yang bisa dieksploitasi secara layak untuk pengusahaan hutan yang baik sudah habis. Sementara upaya pengembangan hutan tanaman industri (HTI) di Kalsel belum mampu menggantikan kayu hutan alam.

Pasokan bahan baku kayu ke Terminal Kayu Terpadu direncanakan berasal dari semua sumber yang ada saat ini yaitu (MIK, 2007):

1. Kayu luar dari Jawa
2. Kayu impor
3. Kayu produksi Perum Perhutani Jawa Tengah
4. Kayu rakyat.

Upaya untuk mengadakan kerjasama dengan propinsi lain sebagai daerah penghasil kayu di luar Jawa melalui kesepakatan bersama (MOU) untuk menyuplai kayunya melalui Terminal Kayu yang direncanakan perlu dibangun, sebagaimana harapan Masyarakat Industri Kehutanan Jawa Tengah, akan sulit direalisasikan. Apalagi daerah lain pun dapat melakukan hal serupa. Sebab di semua wilayah utama penghasil kayu, saat ini mengalami defisit. Total defisit sewilayah Sumatera mencapai 18,51 juta m<sup>3</sup>, Kalimantan 13,21 juta m<sup>3</sup>, Sulawesi 15,14 juta m<sup>3</sup> dan Papua 2,87 juta m<sup>3</sup> serta total kekurangan pada wilayah-wilayah utama tersebut mencapai 49,74 juta m<sup>3</sup> (Gambar 4.5). Kondisi demikian akan

mempersulit harapan terpenuhinya pasokan kayu dari luar Jawa ke Jawa Tengah, meskipun melalui Terminal Kayu.



Sumber: Departemen Kehutanan (2005), diolah  
Keterangan: Tanda minus (-) menunjukkan defisit

#### **GAMBAR 4.5. DEFISIT KEBUTUHAN BAHAN BAKU KAYU DI WILAYAH PENGHASIL KAYU UTAMA**

Kayu dari luar Jawa (terutama Kalimantan, Sulawesi dan Papua) masih didominasi kayu produksi hutan alam, masuk ke Jawa Tengah melalui empat Pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang), Pelabuhan KLI (Kendal), Pelabuhan Juana (Pati) dan Pelabuhan Tegal (Lampiran 3) yang memasok kayu bagi industri di wilayah setempat dan sekitarnya kecuali Pelabuhan KLI khusus menyuplai PT KLI sendiri. Industri primer yang menggunakan bahan baku kayu hutan alam tersebar di beberapa kota/kabupaten terutama di Kabupaten Pati, Kab. Demak, Kab. Tegal dan Kota Semarang (Tabel IV.2). Kayu impor digunakan oleh beberapa industri di sekitar Semarang.

Jika mengharapkan pasokan bahan baku kayu impor sebagaimana salah satu solusi yang terangkum sebagaimana disajikan pada Lampiran 1, pada situasi saat ini akan sulit untuk mendapatkan pasokan dalam jumlah signifikan. Tabel IV.1 memperlihatkan bahwa di negara-negara produsen kayu dunia (tropis dan

non tropis), secara agregatif masih terjadi keseimbangan antara produksi dengan konsumsi. Bahkan, jika dilihat selisih antara produksi kayu dengan konsumsi domestik, terjadi surplus rata-rata pada 5 tahun terakhir sebesar 8,38 juta m<sup>3</sup>/tahun. Hal ini memberi peluang untuk melakukan impor kayu bulat<sup>2</sup>. Namun demikian, hal ini berarti pula harus bersaing terutama dengan negara konsumen kayu di seluruh dunia karena situasi kayu bulat dunia mengalami defisit sangat besar yaitu 744,17 juta m<sup>3</sup>/tahun.

**TABEL IV.1**  
**SITUASI KAYU BULAT DUNIA TAHUN 2002 – 2006 (x 1000 m<sup>3</sup>)**

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006	Rata-rata
<b>A. NEGARA-NEGARA PRODUSEN KAYU</b>						
(1) Produksi	244693.30	233763.28	226542.46	232867.06	242150.99	236003.42
(2) Impor	4899.82	4630.71	4891.85	4841.48	5036.30	4860.03
(3) Ekspor	14399.81	14337.55	12879.89	12880.27	11683.30	13236.16
(4) Konsumsi Domestik	235193.32	224056.44	218554.42	224828.27	235504.00	227627.29
(5) Neraca kayu bulat = (1) + (2) – (3) – (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) Selisih Domestik = (1) – (4)	9499.98	9706.85	7988.05	8038.79	6647.00	8376.13
<b>B. NEGARA-NEGARA KONSUMEN KAYU</b>						
(1) Produksi	265468.96	266050.44	283288.03	287600.96	294292.08	279340.09
(2) Impor	99747.18	100978.36	110052.85	107207.17	108899.44	105377.00
(3) Ekspor	43369.05	41037.91	39395.78	40844.34	42776.53	41484.72
(4) Konsumsi Domestik	1010267.32	1022143.58	1056022.98	1107801.24	1080500.01	1055347.03
(5) Neraca kayu bulat = (1) + (2) – (3) – (4)	-688420.23	-696152.69	-702077.88	-753837.45	-720085.03	-712114.65
(6) Selisih Domestik = (1) – (4)	-744798.36	-756093.14	-772734.95	-820200.28	-786207.94	-776006.93
<b>C. SITUASI KAYU BULAT DUNIA</b>						
<b>= A(6) – B(6)</b>	<b>-735298.38</b>	<b>-746386.29</b>	<b>-746386.29</b>	<b>-746386.29</b>	<b>-746386.29</b>	<b>-744168.71</b>

Sumber: ITTO (2006), diolah

Hasil analisis pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu bagi IPKM Jawa Tengah menunjukkan terjadi defisit bahan baku kayu bagi industri sekitar 4 juta m<sup>3</sup>/tahun. Sementara itu, defisit kayu terjadi di mana-mana sehingga

<sup>2</sup> Tahun 2006 ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mulai masuk kayu bulat impor sebesar 5.950,93 m<sup>3</sup>.

mengharapkan pasokan kayu baik dari luar Jawa maupun impor melalui terminal kayu sulit direalisasikan selama permasalahan dan solusi mendasar tidak dilakukan.

Hasil sintesis CIFOR (2005) dari tiga studi yang dilakukan oleh 3 kelompok kerjasama yaitu (1) ITTO/FORDA tentang *Strategies For Development of Sust. Wood-based Industry*, (2) USAID/NRM-Bappenas-DFID/MFP: *Forest Future Scenarios Analysis*, dan (3) CIFOR & World Bank tentang *Generating Econ Growth, Rural Livelihoods, & Enviromental Benefits*, menghasilkan rumusan mengenai Restrukturisasi & Revitalisasi Industri Kehutanan Indonesia. Salah satu rumusan penting yang dihasilkan adalah Strategi Intervensi 3 (tiga) Fase yaitu Fase-1 (sampai tahun 2012): *Restrukturisasi*, Fase-2 (2013-2020): *Re-engineering*, dan Fase-3 (Sesudah 2020): *Revitalisasi*.

Berdasarkan hasil studi tersebut maka saat ini merupakan Fase-1 dimana tindakan yang harus dilakukan adalah mengintensifkan penanaman, meningkatkan produktifitas Hutan Tanaman Industri (HTI), mengurangi 'Forest Crime' & utang, membangun sumber alternatif serta mengurangi sementara produksi. Jika bertolak dari hasil sintesis tersebut, pembangunan terminal kayu yang hanya melihat permasalahan dari sisi industri saja, bertentangan dengan arus utama isu revitalisasi industri kehutanan. Dalam hal ini, perlu dikemukakan pendapat salah satu responden penelitian ini (P2) yang merupakan petani penghasil kayu rakyat, yang menyatakan:

*Saat ini kayu sangat kurang, kalau terminal kayu dibangun maka sebelum sampai ke Terminal kayu sudah habis. Sekarang ini orang datang langsung ke petani untuk membeli kayu yang masih berdiri. Pembangunan Terminal Kayu akan mubazir. Dananya lebih baik disalurkan untuk kegiatan penanaman hutan..*

Sebaliknya, jika saat ini aktifitas pembangunan hutan tanaman intensif dilakukan maka IPKM Jawa Tengah khususnya dan nasional pada umumnya tidak

akan kekurangan bahan baku kayu. Pada situasi demikian adanya fasilitas yang mengatur distribusi dan tata niaga bahan baku kayu dalam bentuk terminal kayu terpadu akan efektif.

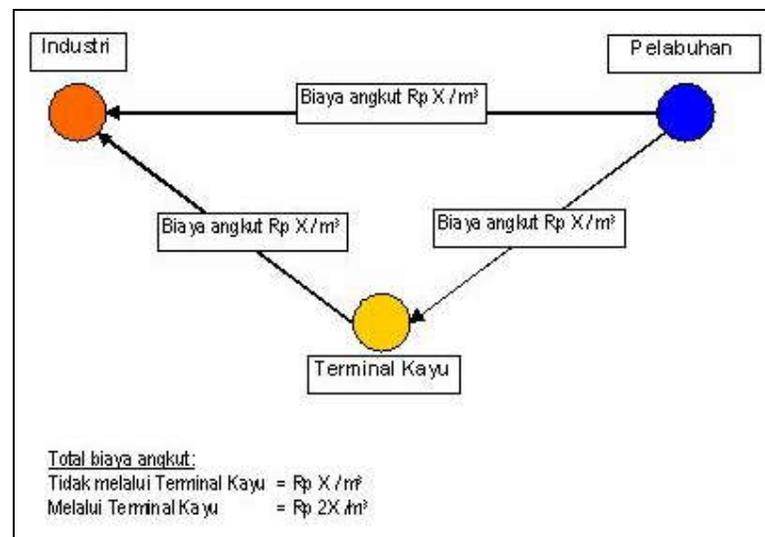
## **4.2 Analisis Distribusi Bahan Baku Kayu**

Menurut Ditjen Industri Agro dan Kimia (2006), terminal kayu merupakan kawasan terpadu yang meliputi pergudangan dan areal-areal lain yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana pendukung dengan tujuan untuk menampung, menyimpan dan mendistribusikan kayu sebagai bahan baku industri pengolahan kayu dari sumber bahan baku ke industri pengolahannya dalam suatu peredaran yang tetap dan terintegrasi. MIK (2007) memperinci bahwa yang dimaksud dengan terminal kayu terpadu yang direncanakan akan dibangun memiliki pengertian fisik maupun administratif. Dalam pengertian fisik, terminal kayu merupakan suatu tempat yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, memproses dan menyelesaikan administrasi dokumen serta merupakan titik pendistribusi bahan baku kayu bagi industri. Adapun terminal kayu dalam pengertian administratif merupakan salah satu bagian dari fungsi terminal kayu terpadu yaitu penyelesaian administrasi dokumen kayu untuk menjamin legalitasnya. Dengan terminal kayu, analisis bahan baku kayu perlu dilakukan terhadap faktor-faktor yang menyangkut distribusi yaitu biaya angkut, sebaran sumber bahan baku dan sebaran industri.

### **4.2.1 Faktor Biaya Angkut**

Apabila dihubungkan mekanisme distribusi dengan Terminal Kayu Terpadu (TKT/Wood Center) yang pilot proyeknya direncanakan akan dibangun di sekitar Kota Semarang, maka mekanisme distribusi kayu dapat dilihat dari dua

aspek yaitu secara fisik dan secara administratif. Secara fisik, kayu dari berbagai sumber ditampung di Terminal Kayu Terpadu (TKT/Wood Center), sebagian ada yang diproses, selanjutnya didistribusikan ke industri yang memerlukan bahan baku kayu. Secara administratif, penyelesaian dokumen legalitas kayu diselesaikan secara *one stop services* (OSS) sehingga kayu yang keluar dari terminal merupakan kayu legal yang diakui semua pihak/instansi terkait.



Sumber: Analisis Peneliti (2007)

**GAMBAR 4.6.**  
**PENGARUH TERMINAL KAYU TERHADAP BIAYA**

Berdasarkan mekanisme seperti pada Gambar 4.6, maka adanya pergerakan fisik kayu dari berbagai sumber ke terminal kayu kemudian didistribusikan ke industri, merupakan langkah yang akan menimbulkan biaya, baik biaya angkut maupun biaya bongkar-muat. Terminal kayu diprioritaskan untuk menampung kayu dari luar Jawa. Biaya angkut untuk jarak 0 – 20 km, berdasarkan data dari PT Kuda Sakti Semarang dan PT Pualam Emas Perkasa (2007), besarnya biaya angkut adalah sebesar Rp 22.000,- sampai Rp 35.000,- per

m<sup>3</sup> tergantung kesepakatan antara pemilik kayu dengan perusahaan jasa angkutan<sup>3</sup>. Untuk distribusi kayu di wilayah Semarang saja, bila kayu diangkut dari pelabuhan ke terminal kayu kemudian ke industri maka biaya angkut menjadi Rp 44.000,-/m<sup>3</sup>. Biaya angkut dan biaya bongkar muat di Terminal Kayu akan menjadi bagian dari harga kayu. Oleh karena itu, disamping menimbulkan biaya tambahan, mekanisme terminal kayu secara fisik juga tidak praktis, kecuali terminal kayu juga satu tempat dengan pelabuhan pendaratan. Dari mekanisme ini, keberadaan Terminal Kayu tidak praktis dan tidak efisien.

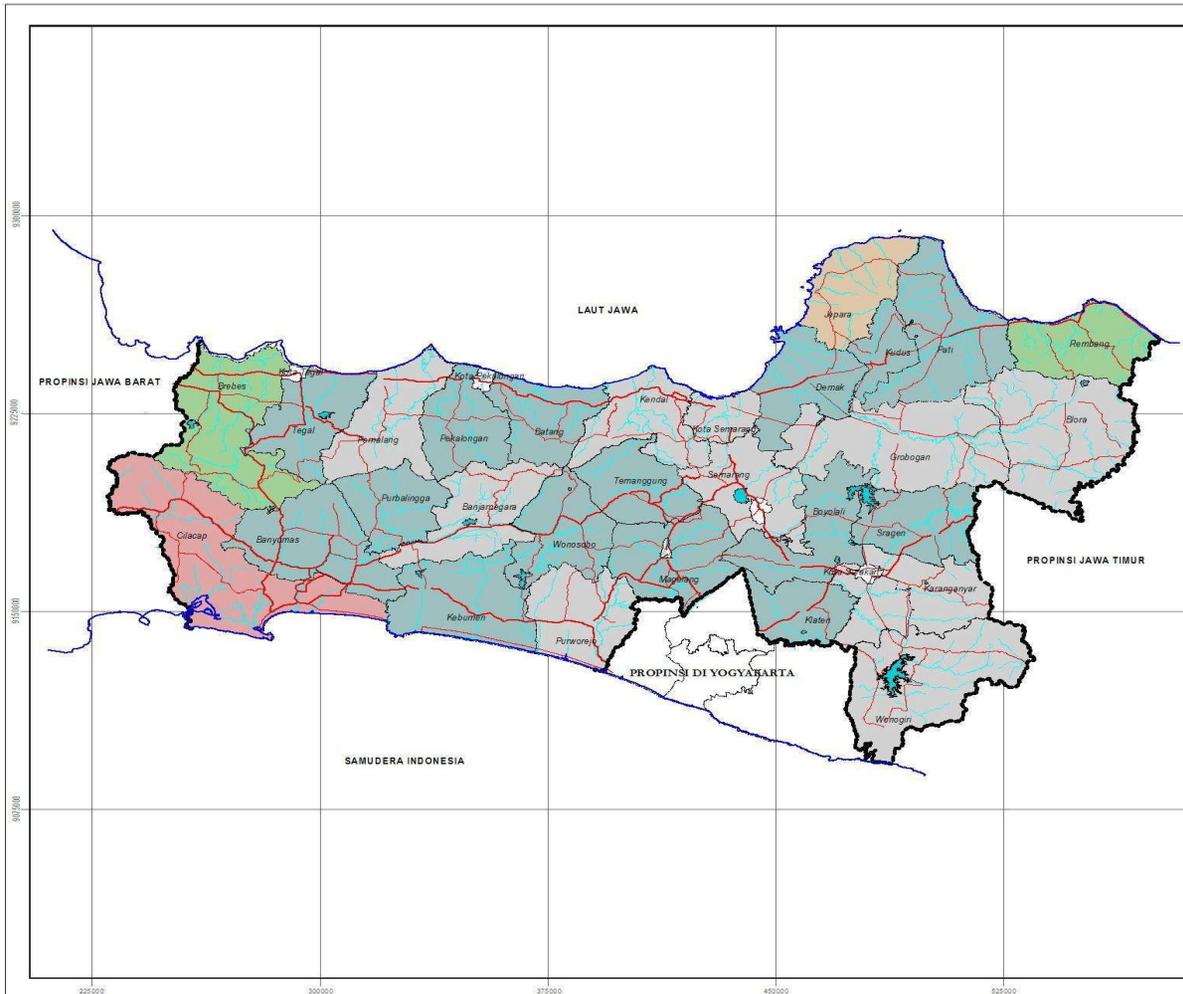
#### **4.2.2 Distribusi Jumlah Unit IPHHK**

Bila Terminal Kayu akan dibangun di daerah sekitar Semarang, maka jarak dengan daerah layanan akan menentukan besarnya biaya angkut, meskipun solusi terhadap masalah tersebut telah ada yaitu dengan rencana dibangunnya sub-sub terminal kayu di daerah layanan. Untuk menentukan arahan lokasi pembangunan terminal kayu, faktor sebaran industri, baik primer (IPHHK) maupun lanjutan (khususnya mebel) penting untuk dipertimbangkan. Peta pada Gambar 4.7 memperlihatkan sebaran Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Jawa Tengah.

Berdasarkan peta pada Gambar 4.7, jika jumlah sebaran IPHHK dipertimbangkan sebagai faktor utama arahan lokasi rencana pembangunan Terminal Kayu Terpadu, maka selayaknya rencana pilot pembangunan fasilitas tersebut diarahkan ke daerah-daerah yang sangat tinggi atau tinggi jumlah unit IPHHK-nya yaitu Kab. Jepara atau Kab. Cilacap dan bukan di sekitar Kota Semarang.

---

<sup>3</sup> Menurut Organda Cabang Pelabuhan Tanjung Emas, hingga saat ini tidak ada standar biaya angkut kayu bulat, sedangkan untuk kayu olahan telah ada standar biaya angkut berdasarkan kesepakatan para pihak penyedia jasa angkutan yang difasilitasi oleh Organda dan Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas.





**MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**TESIS**

Kajian Kebutuhan Pembangunan Terminal Kayu Terpadu  
Sebagai Fasilitas Penunjang Keberlangsungan Industri  
Pengolahan Kayu dan Mebel di Jawa Tengah

**Peta Sebaran Jumlah IPHHK Propinsi Jawa Tengah**

**LEGENDA**

-  Batas Propinsi
-  Batas Kabupaten
-  Jalan Arteri
-  Jalan Kolektor
-  Garis Pantai
-  Sungai
-  Danau

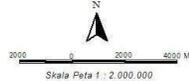
*Interval Jumlah IPHHK*

-  Sangat Rendah (7-98)
-  Rendah (99-189)
-  Sedang (189-280)
-  Tinggi (280-371)
-  Sangat Tinggi (371-462)

**INSET PETA**



Pulau Jawa

No Peta : 4.7	 <p>Skala Peta 1 : 2.000.000</p>
Hal : 79	

**Sumber :**  
- Bappeda Propinsi Jawa Tengah  
- Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah

### 4.2.3 Distribusi IPHHK Berdasarkan Penggunaan Bahan Baku

Tabel IV.2 merinci penggunaan bahan baku kayu oleh IPHHK dari hutan tanaman dan hutan alam. Dari Tabel IV.2 tersebut diketahui bahwa sebagian besar (98,37%) unit industri pengolahan kayu primer di Jawa Tengah mengolah kayu dari hutan tanaman. Hutan tanaman di Jawa Tengah terdiri dari hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan hutan rakyat. Dari Gambar 4.8 terlihat bahwa pada tahun 2006 produksi kayu rakyat memberikan kontribusi paling besar (55,94%) terhadap industri kayu Jawa Tengah. Sedangkan kayu dari luar Jawa dan impor hanya 26,29% dan Perhutani 17,78%.

Tingginya produksi kayu rakyat disebabkan oleh jenis kayu yang diproduksi merupakan kayu cepat tumbuh (FGS/fast growing species) terutama sengon (*Paraserianthes falcataria*) serta jenis kayu keras seperti jati (*Tectona grandis*), mahoni (*Swietenia sp.*) dan rimba campur yang dipanen lebih cepat. Meskipun demikian, seluruh kayu tersebut dapat diserap oleh industri. Besarnya kontribusi kayu rakyat terhadap industri kayu Jawa Tengah juga telah ditunjukkan oleh hasil penelitian Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri (Anonim, 2004), yang memperoleh data bahwa kayu sengon digunakan sebagai bahan baku oleh 53,6% industri pengolahan kayu Jawa Tengah.

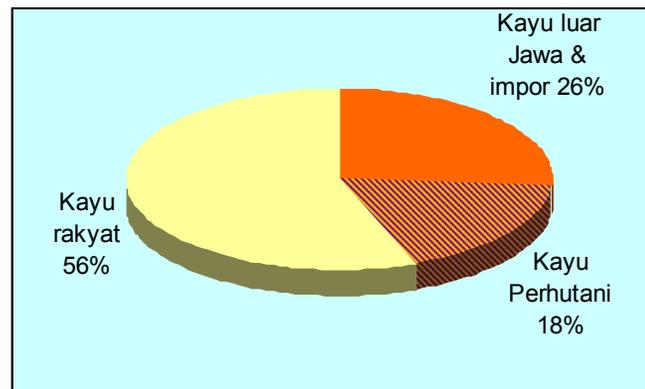
Besarnya kontribusi kayu rakyat menunjukkan besarnya produktifitas lahan hutan rakyat, mengingat luas lahan hutan rakyat Jawa Tengah hanya 283.988 Ha atau 8,73% dari luas daratan (Dinas Kehutanan Jawa Tengah, 2006). Daerah-daerah utama penghasil kayu rakyat tahun 2006 antara lain Purbalingga (150.356,665 m<sup>3</sup>), Wonogiri (117.805,393 m<sup>3</sup>), Cilacap (110.334,856 m<sup>3</sup>), Banyumas (92.165,012 m<sup>3</sup>) dan Batang (80.079,684 m<sup>3</sup>). Keadaan tersebut membuktikan bahwa usaha kayu rakyat terus berkembang. Menurut Hardjanto

(2003), usaha kayu rakyat telah dilakukan sejak sekitar empat puluh tahun, dimana sampai saat ini semakin berkembang akibat tumbuhnya berbagai jenis dan skala industri pengolahan kayu di setiap daerah. Usaha kayu rakyat berada pada posisi pertumbuhan walaupun hanya dengan kekuatan dan peluang yang relatif kecil.

**TABEL IV.2**  
**JUMLAH IPHHK MENURUT JENIS INDUSTRI DAN BAHAN BAKU PER**  
**KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006**

No	Kabupaten /Kota	Jumlah IPHHK									
		Penggajian		Veneer		Plywood		Lainnya		Jumlah	
		Kayu Alam	Kayu Tanaman	Kayu Alam	Kayu Tanaman	Kayu Alam	Kayu Tanaman	Kayu Alam	Kayu Tanaman	Kayu Alam	Kayu Tanaman
1	Banjarnegara	-	148	-	-	-	-	-	-	-	148
2	Banyumas	-	53	-	2	-	-	-	39	-	94
3	Batang	1	86	-	2	-	-	-	-	1	88
4	Blora	-	134	-	-	-	-	-	20	-	154
5	Boyolali	-	82	-	-	-	-	-	-	-	82
6	Brebes	-	215	-	-	-	-	-	5	-	220
7	Cilacap	-	367	-	-	-	-	-	-	-	367
8	Demak	13	1	-	-	-	-	-	-	13	1
9	Grobogan	-	144	-	-	-	-	-	-	-	144
1	Jepara	-	9	-	-	-	-	-	453	-	462
1	Karanganyar	-	70	-	1	-	-	-	39	-	110
1	Kebumen	-	82	-	-	-	-	-	1	-	83
1	Kendal	1	118	-	1	1	-	-	2	2	121
1	Klaten	-	35	-	-	-	-	-	8	-	43
1	Kudus	1	26	-	-	-	-	-	1	1	27
1	Magelang	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
1	Pati	22	17	-	-	-	-	-	-	22	17
1	Pekalongan	1	61	-	-	-	-	-	-	1	61
1	Pemalang	-	103	-	-	-	-	-	-	-	103
2	Purbalingga	2	72	-	3	-	-	-	-	2	75
2	Purworejo	-	145	-	-	-	-	-	43	-	188
2	Rembang	2	189	-	-	-	-	-	-	2	189
2	Semarang	-	80	-	-	-	-	-	72	-	152
2	Sragen	-	42	-	-	-	-	-	7	-	49
2	Sukoharjo	-	116	-	-	-	1	-	3	-	120
2	Tegal	8	14	-	-	-	-	-	-	8	14
2	Temanggung	-	62	-	-	-	1	-	2	-	65
2	Wonogiri	-	69	-	-	-	-	-	62	-	131
2	Wonosobo	-	91	-	-	-	-	-	-	-	91
3	Kota	6	2	-	1	-	-	-	102	6	105
	Jumlah	57	2.640	-	10	1	2	-	859	58	3.511

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (2006)



*Sumber: Data Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Perum Perhutani Unit I (2007), diolah*

#### **GAMBAR 4.8 KOMPOSISI KAYU YANG BEREDAR DI JAWA TENGAH**

Oleh karena sebagian besar jumlah unit industri di Jawa Tengah menggunakan kayu dari hutan tanaman, dan kayu hutan tanaman sebagian besar berasal dari hutan rakyat, maka kayu rakyat selayaknya mendapatkan perhatian untuk terus dikembangkan. Untuk mengembangkan usaha kayu rakyat, Hardjanto (2003) menyarankan perlunya dilakukan upaya komprehensif secara simultan. Dari sisi internal petani dapat ditempuh melalui pembentukan kelompok usaha bersama yang kuat dari sisi manajemen, teknologi budi daya dan pengolahan serta dari sisi eksternal adalah keijakan/peraturan perundangan yang kondusif bagi usaha baik menyangkut aspek produksi, pengolahan, pemasaran dan kelembagaannya.

Jika faktor sebaran jumlah industri yang menggunakan kayu dari hutan tanaman digunakan sebagai pertimbangan, maka rencana pembangunan pembangunan terminal kayu dapat diarahkan kepada daerah yang paling tinggi industrinya menggunakan kayu dari hutan tanaman, baik jumlah atau

kapasitasnya. Daerah yang memiliki jumlah unit industri yang menggunakan kayu dari hutan tanaman adalah Jepara (463 unit), Cilacap (367 unit) dan Brebes (220 unit). Sementara di Kota Semarang dan sekitarnya (Kendal, Kab. Semarang dan Demak) masing-masing terdapat 105, 121, 152 dan 1 unit. Sedangkan berdasarkan kapasitas produksinya, tiga daerah terbesar yang industri primernya menggunakan kayu tanaman adalah Temanggung ( $555.325 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ), Banjarnegara ( $361.310 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ) dan Cilacap ( $328.455 \text{ m}^3/\text{tahun}$ ). Adapun kapasitas industri primer di Semarang dan sekitarnya (4 daerah) hanya berjumlah  $160.798 \text{ m}^3/\text{tahun}$ . Peta pada Gambar 4.9 dan 4.10 menjelaskan secara lengkap sebaran industri tersebut.

Kayu dari luar Jawa pada umumnya merupakan kayu hutan alam yang digunakan untuk industri primer venir, kayu lapis dan LVL serta industri woodworking (moulding). Sedangkan keunggulan industri kayu Jawa Tengah terletak pada industri mebel. Industri mebel ini pula yang lebih memiliki prospek yang lebih baik dibanding industri pengolahan kayu lainnya di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar responden (93%) menyatakan bahwa industri mebel lebih prospektif. Sedangkan yang menyatakan kedua jenis industri tersebut (mebel dan pengolahan kayu lainnya) masih prospektif hanya 36% (6 responden). Bahkan Ketua MIK menyatakan bahwa industri woodworking dan pengolahan kayu lainnya, prospeknya relatif kurang bagus. Beberapa alasan masih prospektifnya industri mebel Jawa Tengah adalah:

1. Mebel telah menjadi produk budaya di Jawa Tengah sehingga merupakan aset penting yang perlu dikelola dengan baik.

2. Produk mebel Jawa Tengah, khususnya mebel ukir Jepara memiliki kekhasan/keunikan dalam disain. Sehingga produk mebel yang perlu dikembangkan adalah mebel yang memiliki ciri khas dan mebel buatan tangan (*hand-made furniture*).
3. Mebel yang menonjolkan ciri etnik atau lokal yang akan unggul dalam persaingan global<sup>4</sup>.

Tingginya nilai ekspor produk kayu Jawa Tengah berasal dari produk furnitur (mebel). Sedangkan produk mebel Jawa Tengah keunggulannya terletak pada disain ukir berbahan baku kayu jati Jawa Tengah yang memiliki karakteristik dan kualitas kayu yang unggul. Untuk mengembalikan kejayaan industri mebel Jawa Tengah maka upaya yang harus ditempuh adalah bagaimana menyediakan bahan baku kayu jati secara berkelanjutan dengan harga terjangkau oleh industri, terutama IKM, yang diolah oleh tenaga bersertifikat sehingga tetap dapat mempertahankan mutu yang baik dan mebel Jawa Tengah tetap unggul dari wilayah bahkan negara manapun.

Kayu jati berasal dari Perhutani dan rakyat serta akhir-akhir ini juga mulai masuk kayu jati dari luar Jawa (Sulawesi). Kayu jati Perhutani memiliki keunggulan karena telah dihasilkan dari sistem pengelolaan yang baku dan kayu jati yang dipanen pada umur masak tebang serta telah memiliki sistem pemasaran tersendiri yaitu penjualan melalui lelang, penjualan dengan perjanjian (kontrak) dan penjualan melalui warung kayu. Penjualan melalui warung kayu ditujukan untuk memasok pengrajin dan industri kecil (Gambar 4.12). Berdasarkan hal tersebut, rencana pembangunan Terminal Kayu Terpadu kiranya perlu

---

<sup>4</sup> Menurut Ketua ASMINDO Jawa Tengah, kalau kita bersaing dalam produk mebel yang menggunakan mesin-mesin modern maka akan kalah dengan negara pesaing seperti China karena mesin-mesinnya saja kita impor.

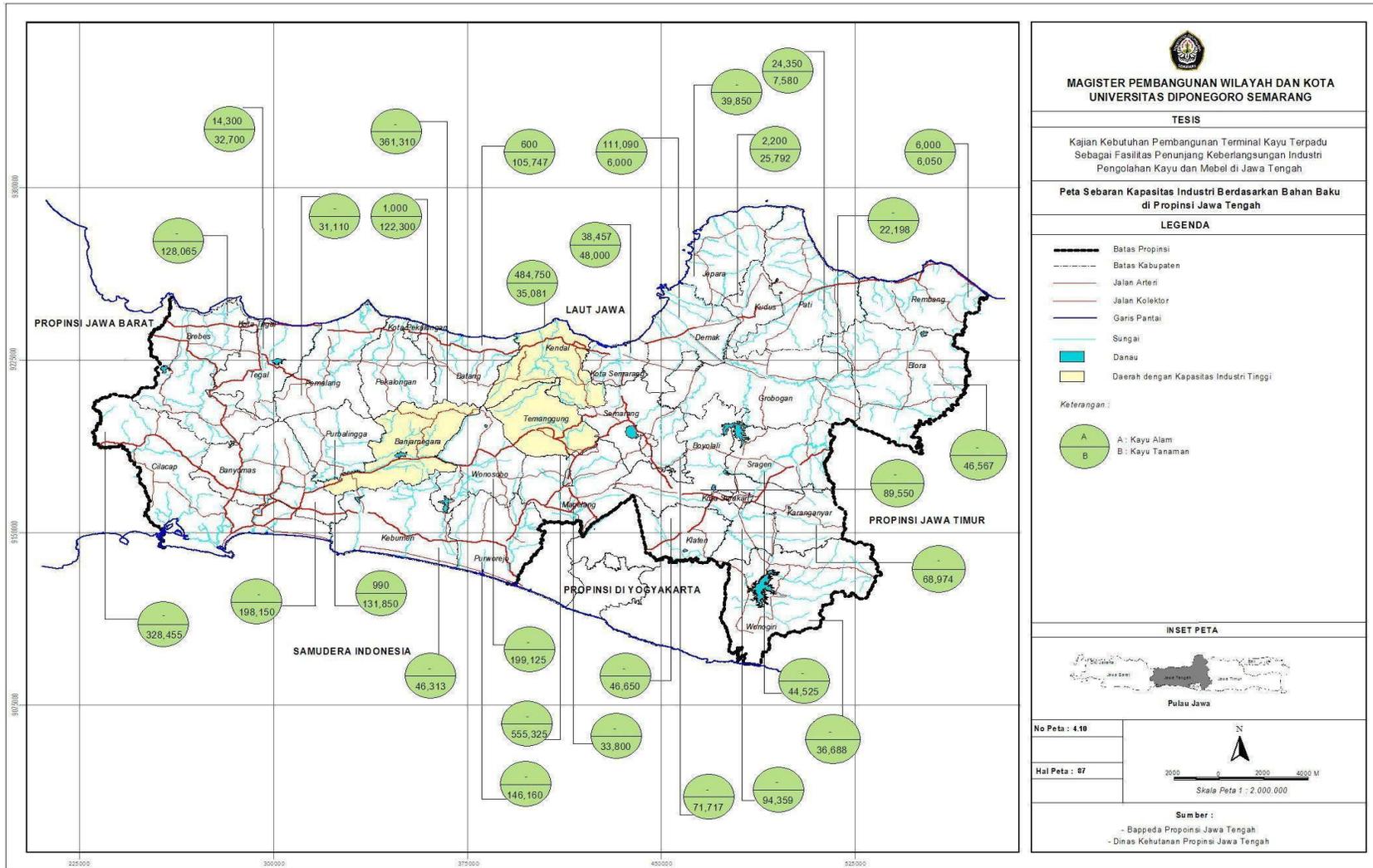
mempertimbangkan kondisi - seperti pasokan kayu dari luar Jawa - telah membentuk suatu tatanan pasokan kayu dari Perhutani ke pengguna.

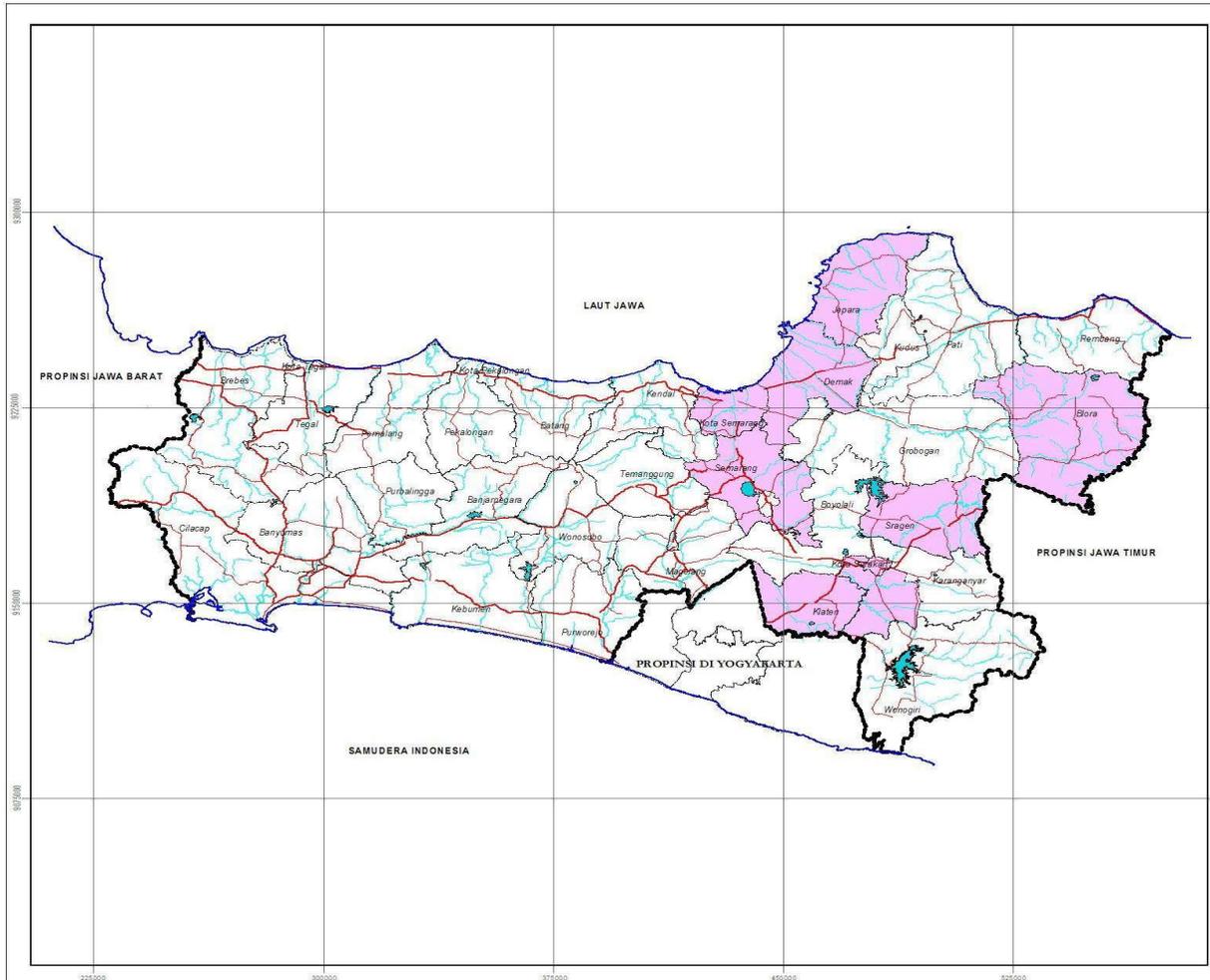
Berdasarkan uraian di atas maka rencana pembangunan Terminal Kayu Terpadu (TKT) perlu disesuaikan dengan industri yang baik prospeknya yaitu industri mebel yang telah menjadi ciri khas Jawa Tengah. Produk mebel tersebut adalah mebel ukir dan *hand-made furniture* atau mebel klasik yang selama ini dibuat dari kayu jati. Dengan semakin terbatasnya pasokan kayu jati yang berakibat pada tingginya harga kayu maka perlu dikembangkan jenis-jenis kayu alternatif yang terbukti dapat dibuat produk serupa. Ketua Asmino Jawa Tengah menyatakan bahwa:

*Berdasarkan sejarahnya, yang membuat unggul mebel Indonesia adalah mebel ukir jati sehingga mebel tersebut masih survive sampai sekarang, namun demikian, hand-made furniture tidak hanya bisa dibuat dari kayu jati. Kayu-kayu yang kurang dikenal seperti Raja Udang (Ki Hujan), kayu mangga, dll bisa dibuat mebel non-klasik (jati).*

Dalam rangka mewujudkan rencana terminal kayu, maka telah dilakukan kesepakatan dengan beberapa propinsi penghasil kayu di luar Jawa seperti dengan seluruh propinsi di Kalimantan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Riau (MIK, 2007). Jika TKT lebih difokuskan pada kayu luar Jawa, maka rencana pembangunannya tidak sinkron dengan upaya pengembangan produk unggulan Jawa Tengah, yaitu produk industri mebel terutama yang berbahan baku kayu jati. Dan kalau sebaran industri mebel sebagai arahan lokasi terminal kayu maka daerah dimana sebaran industri mebelnya dominan dapat dijadikan pertimbangan lokasi. Dalam hal ini sebaran klaster industri mebel layak dipertimbangkan sebagai arahan lokasi terminal kayu (Gambar 4.11). Dari peta terlihat bahwa Kota Semarang termasuk daerah yang memiliki klaster industri mebel, namun bukan yang utama.







**MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**TESIS**

Kajian Kebutuhan Pembangunan Terminal Kayu Terpadu  
Sebagai Fasilitas Penunjang Keberlangsungan Industri  
Pengolahan Kayu dan Mebel di Jawa Tengah

**Peta Sebaran Kluster Industri Mebel di Propinsi Jawa Tengah**

**LEGENDA**

- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau
- Industri Mebel

**INSET PETA**



Pulau Jawa

No Peta : 411

Hal Peta : 00



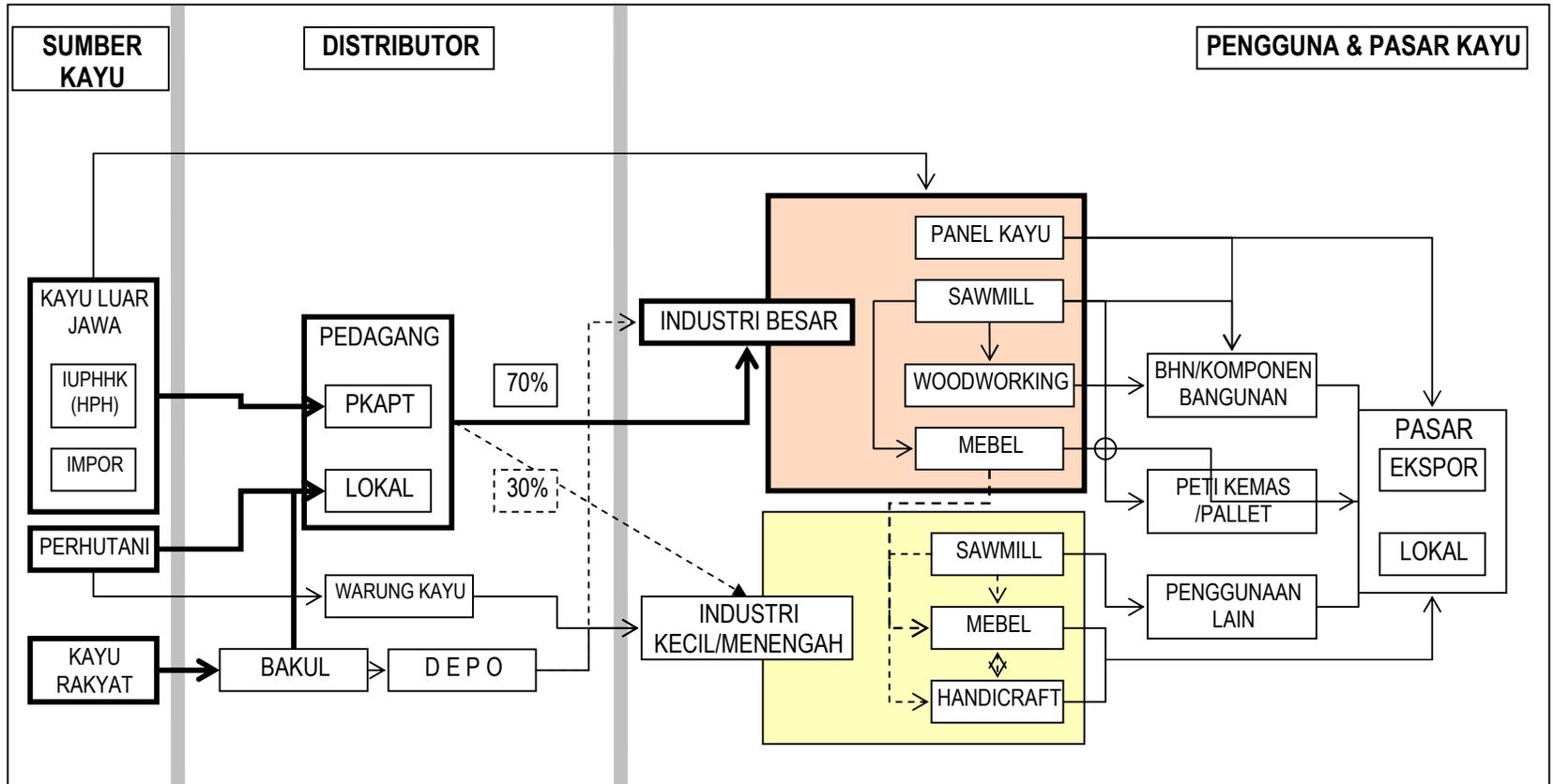
**Sumber :**

- Bappeda Propinsi Jawa Tengah
- Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah

#### 4.2.4 Saluran Distribusi Kayu

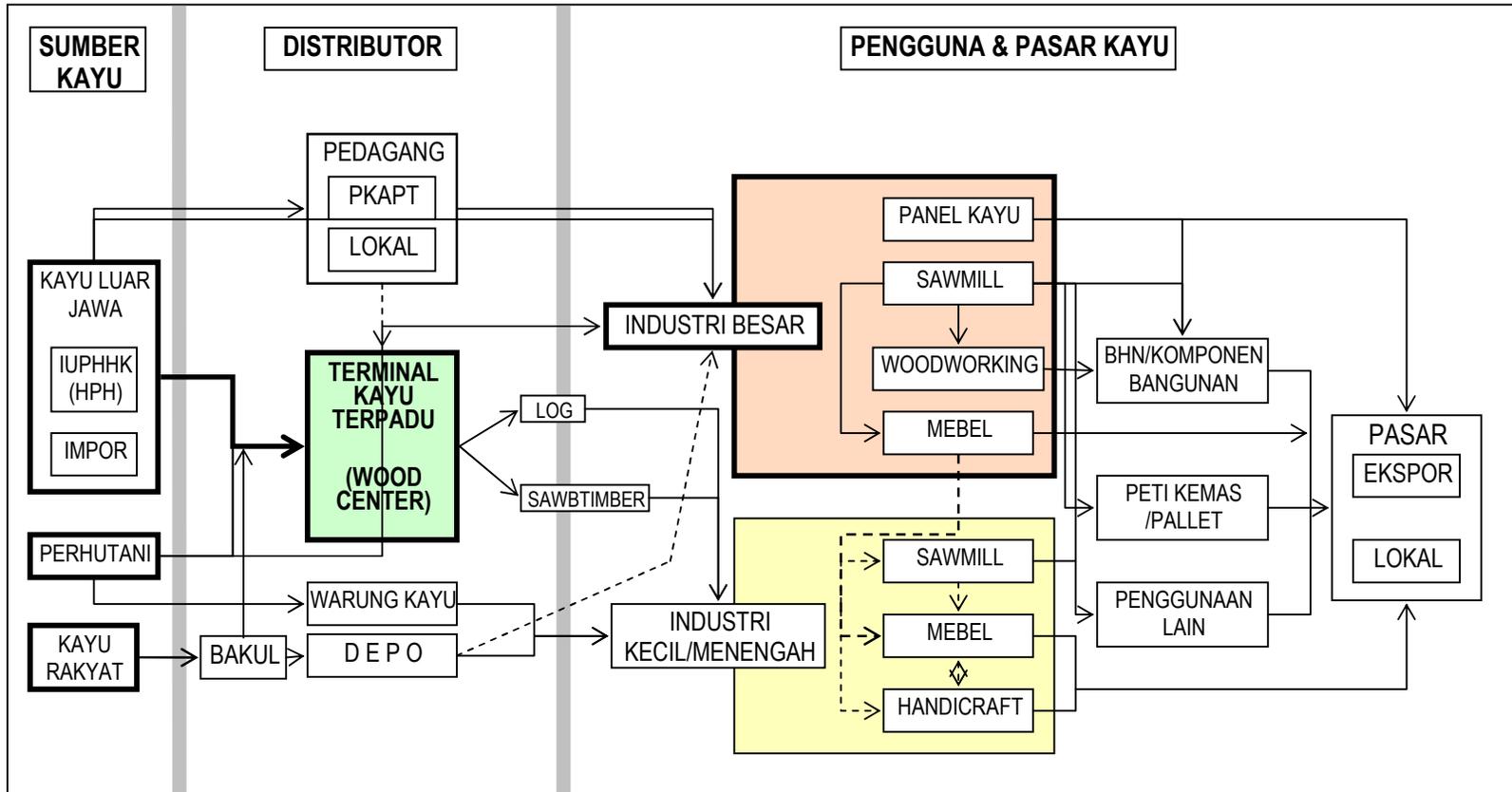
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kayu dari berbagai sumber, baik dari luar Jawa dan impor serta dari internal Jawa Tengah memiliki jalur/saluran distribusi seperti disajikan pada Gambar 4.12. Dari aspek saluran distribusi, rencana pembangunan Terminal Kayu Terpadu (TKT) akan mengubah saluran tersebut melalui penambahan satu titik distribusi. Apabila dibangun Terminal Kayu Terpadu, maka saluran distribusi tersebut menjadi seperti pada Gambar 4.13.

Salah satu alasan yang mendorong perlunya dibangun Terminal Kayu Terpadu (Wood Center) sebagaimana dikemukakan para pengagasnya adalah bahwa selama ini pasokan kayu kepada industri dikuasai oleh para pedagang. Menurut Ketua Masyarakat Industri Kehutanan (MIK) Jawa Tengah (2007), saluran distribusi kayu tersumbat karena dikuasai oleh para pedagang perantara. Ketua Tetap Kompartemen Industri Kehutanan, KADIN Jawa Tengah menyatakan bahwa selama ini jalur atau saluran distribusi kayu yang masuk dari luar Jawa ke Jawa termasuk untuk industri di Jawa Tengah melalui beberapa tangan pedagang antara (broker) sehingga hal ini menimbulkan harga bahan baku kayu menjadi tinggi dan pada umumnya hanya melayani industri besar. Hal tersebut diperkuat oleh Kepala Balai Pengendalian Peredaran Hasil Hutan yang menyatakan bahwa pangsa pasar pasokan kayu di Jawa Tengah yang dikuasai para pedagang perantara adalah sebesar 70%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah memperoleh bahan baku bagi industrinya dari para pedagang perantara tersebut.



Sumber: Data Primer, diolah

**GAMBAR 4.12.**  
**BAGAN DISTRIBUSI KAYU JAWA TENGAH TANPA TERMINAL KAYU TERPADU (EXISTING)**



Sumber: Data Primer, diolah

**GAMBAR 4.13**  
**BAGAN DISTRIBUSI KAYU JAWA TENGAH DENGAN TERMINAL KAYU TERPADU**

Besarnya porsi pasokan kayu ke Jawa Tengah yang dikuasai oleh para pedagang perantara merupakan konsekuensi dari sebagian besar (menurut Ketua Tetap Kompartemen Industri Kehutanan-KADIN Jawa Tengah: 95%) industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah tidak memiliki areal hutan. Industri demikian merupakan salah satu bentuk industri *foot loose* yang memiliki ketergantungan terhadap wilayah lain, dalam hal ini bahan baku kayunya.

Terminal Kayu Terpadu bertujuan menggeser peran para pedagang perantara karena dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya harga bahan baku kayu bagi industri. Anggapan ini bisa terjadi jika kayu yang diterima industri telah melewati beberapa tangan pihak pedagang. Ketua Tetap Kompartemen Industri Kehutanan-KADIN Jawa Tengah menjelaskan:

*Kayu dari HPH → Broker (B-1) → B-2 → B-3 → Industri*  
*Apabila Terminal Kayu terpadu dibangun maka mata rantai distribusi tersebut menjadi lebih pendek, yaitu:*  
*Kayu dari HPH → Terminal Kayu Terpadu → Industri*  
*Karena mata rantai menjadi lebih pendek maka harga akan lebih rendah.*

Penguasaan para pedagang terhadap pasokan bahan baku kayu telah berlangsung sejak industri pengolahan kayu dan mebel ada di Jawa Tengah. Kondisi demikian telah membentuk suatu tatanan yang kemungkinan sulit untuk diubah karena industri besar sebagai pengguna kayu itu sendiri merasa tidak mengalami permasalahan dengan mekanisme pasar yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini sebagian pelaku usaha meragukan efektifitas Terminal Kayu yang direncanakan dan menyatakan bahwa Terminal Kayu dapat mengganggu tatanan distribusi kayu yang telah terbangun selama ini. Di samping itu, menurut responden yang berperan sebagai suplayer kayu luar Jawa bahwa semua suplayer

kayu luar Jawa ke Jawa Tengah memiliki industri sendiri. Adapun kayu yang dijual ke industri lain merupakan bentuk kerjasama bisnis para pelaku usaha. Di kalangan industri besar ada semacam “asosiasi” tidak resmi sebagai wahana komunikasi non formal di kalangan mereka termasuk komunikasi tentang bahan baku kayu yang dibutuhkan oleh suatu industri.

Rencana pembangunan Terminal Kayu Terpadu (TKT) berarti rencana mengubah jalur distribusi bahan baku kayu yang selama ini dikuasai para pedagang perantara. Biasanya para pedagang kayu membeli kayu dari hutan baik melalui IUPHHK (HPH), IPK, IPKM atau KOPERMAS<sup>5</sup> secara tunai. Di Papua pembayaran secara tunai tersebut dikenal dengan “transaksi kantong kresek” yaitu pembelian kayu oleh para pedagang secara tunai dengan uang yang dibawa ke areal hutan dengan wadah kantong kresek (Rachman, *et al.*, 2003). Pada situasi demikian jika TKT akan menggeser peran para pedagang tersebut maka sesuai mekanisme pasar, diperlukan biaya – bukan hanya MOU<sup>6</sup> antara Pemerintah Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah di mana kayu dihasilkan – untuk pembelian bahan baku kayu langsung dari sumbernya dengan cara yang sama. Ketua Kompartemen Industri Kehutanan Kadin Jawa Tengah menyatakan:

*Kesepakatan antara Pemerintah Jateng dengan Pemerintah Daerah Penghasil Kayu (G to G) perlu ditindaklanjuti oleh swasta/pelaku usaha (P to P).*

---

<sup>5</sup> IUPHHK = Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, sebelumnya disebut HPH = Hak Pengusahaan Hutan; IPK = Ijin Pemanfaatan Kayu, dari areal konversi. IPKM = Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat; KOPERMAS = Koperasi Pemberdayaan Masyarakat.

<sup>6</sup> Menurut MIK saat ini telah ada kesepakatan yang tertuang dalam MOU (Memorandum of Understanding) antara para pihak terkait industri kehutanan Jawa Tengah (Pemerintah & swasta) dengan pihak di wilayah penghasil kayu seperti Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sultra, Papua, Irjabar, Maluku dan Riau.

Jika bahan baku industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah sebagian besar menggunakan kayu hutan alam dan berasal dari luar Jawa, maka TKT dirasakan kebutuhannya untuk dibangun. Akan tetapi, berdasarkan data Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (2006) seperti tercantum pada Tabel IV.2 menunjukkan bahwa IPHHK di Jawa Tengah sebagian besar (98,37%) telah menggunakan kayu dari hutan tanaman. Hal ini berarti jika pembangunan TKT diutamakan untuk menampung kayu dari luar Jawa, maka rencana tersebut perlu ditinjau kembali.

### **4.3 Fungsi dan Kelembagaan Terminal Kayu**

Untuk melihat sejauh mana terminal kayu dibutuhkan, maka perlu diketahui fungsi yang akan dimiliki oleh terminal tersebut. Berdasarkan dokumen Terminal Kayu Terpadu (TKT) Jawa Tengah yang disusun oleh Masyarakat Industri Kehutanan (MIK), berikut ini diuraikan visi, misi, tugas, manfaat dan fungsi dari Terminal Kayu Terpadu Jawa Tengah. Fungsi TKT tercantum dalam Tabel IV.3.

*Visi pembangunan Terminal Kayu Terpadu (TKT) adalah terciptanya Jawa Tengah sebagai pusat industri pengolahan kayu nasional. didukung iklim usaha yang kondusif melalui Terminal Kayu Terpadu Jawa Tengah. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dimilikinya adalah:*

- 1. Menyiapkan Bahan Baku Kayu yang baik, Legal, Murah dan berkesinambungan serta sebagai sarana pengadaan berbagai jenis kayu yang dibutuhkan bagi industri perkayuan dan permeubelan.*
- 2. Menyiapkan Manajemen Koordinasi dan Distnbusi Kayu untuk meningkatkan Industri Perkayuan Jawa Tengah sehingga pengelolaan kayu dapat lebih maksimal dengan nilai tambah tinggi dan dapat terjaga kesinambungannya.*
- 3. Membantu memberikan informasi dan berbagai solusi terhadap pengadaan bahan baku industri kayu yang benar-benar legal.*
- 4. Membentuk Badan Suplai Bahan Baku (BSBB) melalui Terminal Kayu (satu atap) yang disiapkan bersama dan untuk kepentingan bersama.*
- 5. Turut serta menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.*

*TKT dalam melaksanakan misinya memiliki tugas sebagai berikut:*

1. *Menjaga dan mengamankan pasokan kayu secara legal dan sah menurut perundang-undangan yang berlaku.*
2. *Mengupayakan kelancaran dan kesinambungan pengadaan kayu dari para suplayer.*
3. *Menjaga agar para suplayer dapat mensuplay kayu sesuai kebutuhan industri, baik jenis, jumlah dan ukurannya.*
4. *Membantu dan turut serta mengawasi untuk mengamankan dokumen kayu yang sah dan legal, sesuai perundang-undangan yang berlaku.*
5. *Membantu koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam rangka pengamanan pengiriman kayu.*
6. *Menjaga sinergi antar semua tim koordinasi.*

*Sedangkan manfaatnya adalah:*

1. *Memberikan Kayu yang Legal pada Industri Perkayuan*
2. *Memberikan Perlindungan Hukum di Pasar Internasional*
3. *Membantu seluruh industri Perakayuan agar mendapatkan :*
  - a. *Kemudahan Akses Bahan Baku sesuai Kebutuhan*
  - b. *Kemudahan Koordinasi dan efisiensi dengan semua pihak atau instansi terkait.*
  - c. *Kepastian Harga bahan baku kayu yang kompetitif*
  - d. *Kemudahan Akses Bahan Baku bagi Industri Kecil dan Menengah.*
  - e. *Standarisasi bahan baku yang dibutuhkan industri.*
  - f. *Kepastian Hukum dalam kebijakan Pemerintah*
  - g. *Dukungan Penuh dari Pemerintah*
  - h. *Dukungan dari Perbankan yang terlanjur menganggap industri kehutanan sun set industri, sehingga industri kehutanan dapat kembali jadi andalan utama devisa.*

Berdasarkan visi, misi, tugas, manfaat dan fungsi dari Terminal Kayu Terpadu di atas, terlihat bahwa rencana membangun terminal kayu terpadu pada intinya merupakan upaya untuk menjaga keberlangsungan industri pengolahan kayu dan mebel di Jawa Tengah melalui penyediaan pasokan berbagai jenis kayu sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah. Sementara itu, permasalahan yang melingkupi industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah sangat kompleks sehingga membutuhkan solusi yang menyeluruh. Sebagaimana diuraikan dalam Sub Bab 4.1, masalah utamanya adalah kurangnya bahan baku. Sementara itu, kekurangan bahan baku kayu bagi industri bukan hanya terjadi di Jawa Tengah melainkan telah menjadi masalah nasional bahkan global. Jika pembangunan Terminal Kayu Terpadu dianggap sebagai suatu solusi, maka daerah lain pun akan melakukan hal yang sama.

**TABEL IV.3.**  
**FUNGSI TERMINAL KAYU TERPADU DALAM RANCANGAN**  
**PEMBANGUNAN**

No	Fungsi
1	KOORDINATOR = Mengkoordinir bagi semua industri bidang perikanan dan perkebunan
2	MEDIATOR = Mediator bila ada permasalahan dengan bahan baku kayu, baik antara suplayer dengan industri penerima, maupun dengan pihak terkait lainnya.
3	FASILITATOR = Fasilitator bagi semua instansi dan dinas terkait, agar membuat tenang, senang dan nyaman semua pihak yang termasuk dalam mata rantai industri perikanan dari hulu hingga hilir, bahkan bila memungkinkan sampai mau ekspor.
4	MOTIVATOR = Memotivasi industri agar dapat meningkatkan kapasitas industri perikanan, dengan memberikan rasa aman, nyaman dan kesinambungan suplay kayu, baik dari segi legalitas, kualitas maupun kuantitasnya.
5	INFORMATOR = Memberikan berbagai kemudahan informasi bahan baku kayu bagi industri perikanan di Jawa Tengah, yang mana setiap saat dapat langsung diketahui baik kebutuhan, jenis, kualitas maupun jumlah pasokan, sampai pada nilai eksportnya, sebagai informasi yang lengkap dan akurat.
6	DISTRIBUTOR = Menyediakan, mengatur dan menjaga distribusi bahan baku kayu agar benar-benar dimanfaatkan langsung bagi industri, bukan untuk dijual belikan yang berakibat harga tinggi.
7	REGULATOR = Menjaga dan mengawasi regulasi perputaran kayu, baik jumlah maupun legalitasnya, sekaligus memberi jalan keluar dari berbagai hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan.

*Sumber: MIK (2007)*

Jika ditelaah lebih lanjut, konsep fungsi Terminal Kayu Terpadu (TKT) pada Tabel IV.3 di atas memberikan gambaran bahwa Terminal Kayu merupakan lembaga *super body* yang akan melampaui tugas pokok dan fungsi beberapa instansi atau institusi terkait yang telah ada. Di samping itu fungsi tersebut terlalu luas sehingga dikhawatirkan tidak efektif. Sebagaimana juga dinyatakan oleh sebagian responden.

*Masih banyak pertanyaan yang belum dapat dijelaskan dengan konsep Terminal Kayu saat ini:*

1. *Bagaimana dan siapa Badan Pengelolanya? Hal ini sulit dibentuk dan kalaupun terbentuk dengan melibatkan terlalu banyak pihak maka terlalu banyak kepentingan*
2. *Dasar hukum Badan Pengelola tersebut apa? Biro Hukum Pemprop juga kesulitan menemukan dasar hukumnya.*

3. *Apa dan berapa keuntungan yang dapat diperoleh, karena investasinya cukup besar.*
4. *Masalah teknis:*
  - *Instalasi mesin, apakah dapat dijamin operasional secara kontinyu, apakah mesinnya modern (memiliki presisi tinggi) untuk meningkatkan efisiensi.*
  - *Lokasi: dimana TKT akan dibangun? Pada tanah milik siapa? Apakah ada yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan oleh TKT yang belum jelas badan hukumnya?*
  - *Bahan baku masih belum jelas padahal TKT memerlukan suplai yang kontinyu dalam jumlah yang dapat mencukupi kebutuhan industri. Dari mana bahan baku tersebut dapat diperoleh? Dari HPH dengan melakukan MOU sudah pasti akan bersaing dengan pihak/daerah lain?*
5. *Masalah sharing pendanaan, Pemerintah Pusat mau membantu asal Pemda juga memberikan sharing. Pemda tidak bisa begitu saja mengeluarkan dana pada sesuatu yang belum jelas badan hukumnya, selain itu dalam penganggarannya juga perlu persetujuan DPRD. Pihak swasta yang menjamin akan sharing juga belum jelas.*

*Ide Terminal Kayu pada saat sekarang akan sulit direalisasikan karena produksi kayu kita sudah sangat berkurang. Yang dulu saja tidak terwujud (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah).*

*Kita sering punya pengalaman buruk dengan adanya lembaga/sarana prasarana baru karena ketidaksiapan penyedia fasilitas baru tersebut dalam kelanjutannya. Misal pelajaran yang bisa kita ambil dari Gedung Pasar Lelang Mebel Jepara, tidak berfungsi karena tidak ada biaya operasional dan biaya-biaya lain yang menunjang berfungsinya gedung tersebut. Hal-hal tersebut mesti diperhatikan dalam rencana pembangunan Terminal Kayu agar tidak sekedar sebagai proyek” (Pimpinan Perusahaan Mebel Rejaya, Semarang).*

Dengan demikian, untuk membentuk lembaga tersebut diperlukan dukungan baik secara politik, manajerial dan finansial yang kuat. Analisis terhadap fungsi terminal kayu disajikan dalam Tabel IV.4.

---

<sup>7</sup> Ide Terminal Kayu atau *Wood Center* sebenarnya sudah ada sejak lama. Pada pertengahan tahun 1970-an sampai awal-awal tahun 1980-an sudah ramai didiskusikan dalam berbagai forum, bahkan sudah dilakukan *Feasibility Study*-nya. Untuk mendukung hal tersebut, pada tahun 1984 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pada tingkat Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyertaan modal pemerintah pada *Wood Center* yang akan dibangun di Marunda. Tetapi mengapa tidak berhasil? Sebab dengan Terminal Kayu (*Wood Center*) penatausahaan kayu akan transparan, sementara pihak-pihak yang melakukan illegal logging tidak mau hal tersebut diketahui secara transparan. Rencananya dulu Dephut akan membangun Terminal Kayu di Marunda (untuk daerah DKI dan Jabar), Wonosari, Kendal untuk Jateng dan Gresik untuk Jatim.

**TABEL IV.4**  
**ANALISIS RENCANA FUNGSI TERMINAL KAYU TERPADU**

No	Fungsi	Analisis
1	KOORDINATOR	<p>Fungsi 1 dan 2 ini merupakan fungsi dari asosiasi industri di bidang perikanan. Beberapa asosiasi yang telah ada antara lain ASMINDO (Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia), ISWA (Indonesia Sawmiller and Woodworking Association) yaitu asosiasi industri penggergajian dan pengerjaan kayu Indonesia, dan APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia), yaitu asosiasi khusus industri kayu yang bergerak pada produk panel (kayu lapis, LVL, dll). Apabila Terminal Kayu Terpadu memiliki fungsi tersebut maka akan <i>overlap</i> dengan fungsi asosiasi, meskipun saat ini asosiasi dirasakan kurang berperan, sebagaimana diungkapkan oleh responden penelitian ini:</p> <p style="text-align: center;"><i>Peran Asosiasi kurang optimal, sehingga pelaku usaha dan pengrajin sering menghadapi klaim. Hal ini akibat kurangnya pembinaan dari asosiasi dan instansi terkait (Direktur Rejaya). ISWA Jawa Tengah malah dirasakan vakum karena kesibukan pengurusnya (Ketua MIK).</i></p> <p>Jika asosiasi berperan optimal maka fungsi koordinasi dan mediasi dapat dijalankan oleh asosiasi. Adapun Terminal Kayu dapat fokus kepada usaha menjaga pasokan bahan baku kayu bagi industri.</p>
2	MEDIATOR	
3	FASILITATOR	Memfasilitasi semua dinas dan instansi terkait agar membuat tenang, senang dan nyaman semua pihak yang termasuk dalam mata rantai industri, merupakan fungsi besar suatu institusi. Melihat fungsi ini maka berarti kedudukan pengelola Terminal Kayu minimal sejajar atau mungkin lebih tinggi dengan instansi/dinas terkait. Masih perlu pengkajian dan kesepakatan lebih lanjut para pihak. Namun demikian, terminal dapat berfungsi sebagai fasilitator penyediaan bahan baku kayu yang legal, kontinyu, berkualitas dan sesuai kebutuhan industri.
4	MOTIVATOR	Memberikan dorongan kepada industri untuk dapat meningkatkan kapasitas adalah salah satu tugas atau fungsi dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian yaitu terkait fungsi pembinaan. Meningkatkan kapasitas dalam arti kapasitas produksi tergantung pada ketersediaan bahan baku yang justru saat ini sedang mengalami ketimpangan.
5	INFORMATOR	Fungsi penyediaan informasi merupakan salah satu fungsi memungkinkan untuk dimiliki oleh Terminal Kayu. Terminal kayu dapat menyediakan informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persediaan bahan baku kayu, baik kuantitas dan kualitas, jenis, bentuk, asal serta harga kayu.</li> <li>- Fasilitas yang dimiliki terminal, dan</li> <li>- Kebijakan terkait dengan peredaran dan industri kayu</li> </ul>
6	DISTRIBUTOR	Fungsi ini merupakan fungsi utama dari terminal kayu dimana terminal memberikan layanan distribusi termasuk pengurusan administrasi bahan baku kayu.
7	REGULATOR	Fungsi ini lebih tepat disebut advokasi, bukan regulator sebab fungsi regulator hanya dimiliki oleh instansi Pemerintah (Departemen atau Dinas terkait)

Sumber: MIK (2007), dianalisis

Berdasarkan analisis pada Tabel IV.4 di atas maka fungsi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan oleh Terminal Kayu Terpadu adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.5.

**TABEL IV.5**  
**FUNGSI TERMINAL KAYU TERPADU HASIL ANALISIS**

No	Fungsi
1	Fasilitasi = Memfasilitasi penyediaan bahan baku kayu yang legal, kontinyu, berkualitas dan sesuai kebutuhan industri. Terkait dengan legalitas, TKT memberikan kepastian kepada industri dan semua pihak bahwa kayu yang keluar dari TKT adalah kayu legal.
2	Infomasi = Terminal Kayu. Terminal kayu dapat menyediakan informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persediaan bahan baku kayu, baik kuantitas dan kualitas, jenis, bentuk, asal serta harga kayu.</li> <li>- Fasilitas yang dimiliki terminal, dan</li> <li>- Kebijakan terkait dengan peredaran dan industri kayu</li> </ul>
3	Distribusi = <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Kayu yang Legal pada Industri Perkayuan</li> <li>2. Memberikan Perlindungan Hukum di Pasar Internasional</li> <li>3. Membantu seluruh industri Perkayuan agar mendapatkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan akses bahan baku sesuai kebutuhan</li> <li>- Kepastian harga bahan baku kayu yang kompetitif</li> <li>- Kemudahan akses bahan baku bagi Industri Kecil dan Menengah.</li> <li>- Standarisasi bahan baku yang dibutuhkan industri.</li> <li>- Dukungan penuh dari pemerintah</li> <li>- Dukungan dari Perbankan yang terlanjur menganggap industri kehutanan sun set industri, sehingga industri kehutanan dapat kembali jadi andalan utama devisa.</li> </ul> </li> </ol>
4	Pengolahan = Memperjelas fungsi TKT sebagai penyedia bahan baku kayu sesuai kebutuhan industri. Tidak semua industri pengolahan kayu membutuhkan bahan baku dalam bentuk log, tetapi kayu gergajian. TKT menyediakan kayu gergajian yang telah dikeringkan (kiln drying) sehingga siap diolah lebih lanjut menjadi <i>finished product</i> seperti mebel. Selain penggergajian dan pengeringan proses yang dapat dilakukan di TKT adalah pengawetan untuk jenis-jenis kayu yang kurang awet.

*Sumber: Analisis Peneliti (2007)*

#### **4.4 Analisis Kebijakan**

##### **4.4.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. 55 dan No.51 Tahun 2006**

Keinginan untuk membangun fasilitas penunjang untuk keberlangsungan industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah tidak bisa terlepas dari kebijakan pemerintah sehingga perlu penyesuaian. Dalam penelitian ini kebijakan dalam bentuk peraturan yang banyak disorot adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara dan P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat

Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Kritik yang diungkapkan responden terhadap kedua peraturan tersebut terangkum sebagai berikut:

*Terdapat peraturan yang dianggap menghambat operasionalisasi industri perKayuan antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan No. 55 Tahun 2006 (P.55) khususnya dalam pengaturan penerbitan dan penggunaan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB). Meskipun demikian ada hal positifnya yaitu adanya pemberian kepercayaan kepada kalangan industri untuk menerbitkan dokumen angkutan secara self assesment<sup>8</sup>.*

*Dengan adanya P55, yang bisa beroperasi untuk mengolah kayu bulat adalah industri-industri yang memiliki ijin primer (IPHHK), sedangkan industri lanjutan dan perorangan (jual beli log, industri/pengrajin mebel, galangan kapal, bak truk) tidak memiliki kesempatan untuk mengolah kayu bulat, sehingga harus membeli kayu olahan dari IPHHK dengan harga yang lebih tinggi” (Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah).*

*Kebijakan saat ini masih dalam taraf normal, hanya saja perlu kebijakan yang dapat mengendalikan harga kayu sehingga terjangkau oleh industri (IKM). Di samping itu perlu penyederhanaan FAK-B FAK-O karena banyak industri (IKM) yang hanya menggunakan kayu sedikit-sedikit” (Tim Klaster Industri Mebel, Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah).*

*Kebijakan FAKB dirasakan memberatkan terutama IKM karena mereka hanya memerlukan bahan baku kayu tidak dalam jumlah besar” (Asmindo Jawa Tengah).*

*Beberapa peraturan pemerintah (pusat) dirasakan tumpang tindih dan menyulitkan operasionalisasi di lapangan. Contoh: P55 dan P51 itu banyak celah seperti masalah areal/lahan asal kayu rakyat (letter C/D). Istilah letter C hanya ada di Jawa. P.18 menyamaratakan penghitungan jumlah kayu olahan dengan jumlah log, maksudnya apabila dalam pengujian ditemukan kelebihan atau kekurangan satu keping saja maka akan bermasalah, kalau untuk log mungkin masih logis aturan itu diterapkan tetapi kalau untuk kayu olahan sudah tidak bisa lagi karena misalnya di jalan hilang satu keping atau bertambah satu saja, jadi temuan bagi polisi. Sebaiknya instansi yang mengatur industri kehutanan cukup satu saja agar tidak terjadi tumpang tindih”. (Kopartemen Industri Kehutanan Kadin Jawa Tengah).*

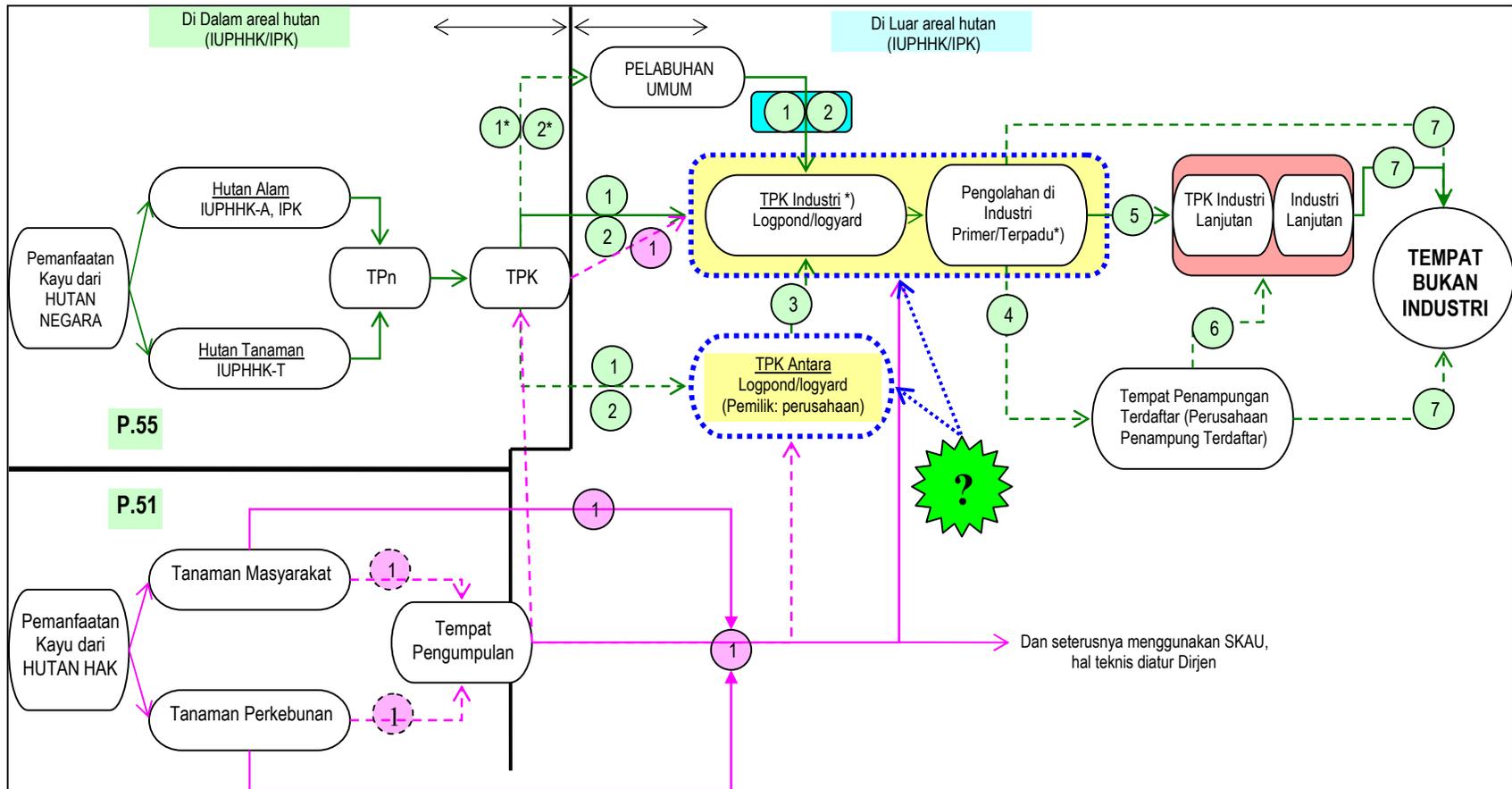
---

<sup>8</sup> Penerbit Faktur (Penerbit FA-KB/FA-HHBK/FA-KO) adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai Penguji Hasil Hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen Faktur (Bab I Ps. 1 butir 29 P.55). Selanjutnya diatur dalam Ps. 25 P.55/Menhut-II/2006.

*P.55 Menhut harus dicari solusinya karena tidak semua industri (terutama industri kecil) bisa beli kayu langsung sehingga menyulitkan kalau harus dengan FA-KB, mereka juga membeli BBK dalam jumlah kecil. Oleh karena itu P55 ini perlu penyempurnaan” (Masyarakat Industri Kehutanan Jawa Tengah).*

Kajian rencana pembangunan terminal kayu perlu dikaitkan dengan P.55 dan P.51 tersebut mengingat kedua tersebut mengatur sistem peredaran kayu dan terminal kayu akan menjadi bagian dari sistem peredaran/distribusi tersebut. Hasil analisis terhadap P.55 dan P.51 tersebut disajikan pada Gambar 4.14.

Berdasarkan Gambar 4.14, terlihat bahwa pada intinya setiap terjadi pergerakan kayu oleh alat angkut, baik kayu bulat maupun kayu olahan, harus disertai dengan dokumen yang menunjukkan keabsahan kayu. Ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh para pelaku usaha perkayuan. Seperti terungkap dalam kritik responden di atas, yang menjadi permasalahan atau dianggap memberatkan adalah distribusi kayu bagi industri kecil dan pengrajin yang membeli kayu dalam jumlah kecil. Memperhatikan skema pada Gambar 4.14, FA-KB/FA-KO dikeluarkan oleh perusahaan penjual kayu (bulat atau olahan). Jika ada biaya dokumen, maka otomatis akan masuk dalam komponen harga kayu. Hal ini berarti semakin sering pengrajin membeli kayu (karena dalam setiap proses produksi menggunakan bahan baku kayu sedikit), semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dokumen. Berkenaan dengan persoalan tersebut, rencana pembangunan terminal kayu yang akan melayani pembelian kayu sesuai kebutuhan industri/pengrajin, memang dibutuhkan dengan catatan biaya akibat dokumen lebih rendah atau bahkan tidak ada karena terminal kayu secara total menjual kayu dalam jumlah besar.



Sumber: Analisis Peneliti terhadap P.55 dan P.51

**GAMBAR 4.14.**  
**SISTEM PEREDARAN DAN DOKUMEN ANGKUTAN KAYU MENURUT P.55 DAN P.51**

## Keterangan Gambar 4.14:

	=	Surak Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dari Pejabat Penerbit SKSKB (
	=	Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) milik perusahaan pemegang ijin (IUPHHK/IPK/ILS)
 	=	SKSKB/FA-KB baru dari pemegang ijin yang diberi cap "ANGKUTAN LANJUTAN"
	=	SKSKB & FA-KB dimatikan oleh Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) kemudian dikembalikan ke pemilik kayu
	=	FA-KB dari petugas pemilik perusahaan TPK-Antara
	=	FA-KO milik industri (primer/terpadu) atau milik perusahaan penampung terdaftar
	=	FA-KO milik industri (primer/terpadu)
	=	FA-KO milik perusahaan penampung terdaftar
	=	Nota Perusahaan penjual/pengirim kayu
*	=	Kecuali industri kayu serpih (chip) dan atau pulp
	=	Kemungkinan posisi/fungsi Terminal Kayu dalam sistem peredaran dan angkutan kayu menurut P.55/P.51
	=	Bila Tempat Pengumpulan berada di luar wilayah Desa/Kelurahan asal kayu, kemungkinan harus menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul)
	=	SKAU wajib disertakan dalam setiap pengangkutan kayu dari tempat asal ke luar Desa/Kelurahan asal kayu.
	-	SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat setara di wilayah dimana kayu tersebut akan diangkut.
	-	SKAU digunakan untuk jenis-jenis kayu sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan Kelapa ( <i>Cococ Nucifera</i> ). Untuk kayu jenis lain yang berasal dari hutan hak menggunakan dokumen angkutan SKSKB dengan cap "KR".

Mengacu pada P.55 dan P.51 yang divisualisasikan dalam Gambar 4.14, terdapat peluang pembangunan terminal kayu yaitu pada unit TPK Antara<sup>9</sup>. Akan tetapi jika terminal kayu identik dengan TPK Antara maka terminal hanya bisa melayani penjualan log/kayu bulat (tidak bisa melayani industri atau pengrajin mebel atau pengrajin kayu lainnya yang tidak memerlukan log). Dengan demikian, terminal kayu sama fungsinya sebagai pedagang perantara. Jika terminal kayu dibuat terpadu dengan adanya fasilitas pengolahan (penggergajian, pengawetan dan pengeringan) dengan tujuan ingin melayani pembelian kayu oleh industri atau pengrajin yang tidak memerlukan kayu bulat, maka fungsi tersebut merupakan fungsi IPHHK.

#### **4.4.2 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007**

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 telah menetapkan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dalam Lampiran II Perpres tersebut di sektor Kehutanan, industri primer yang masih terbuka bagi penanaman modal adalah bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) atau dengan Ijin Khusus, yaitu Industri Kayu Gergajian Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 m<sup>3</sup>/Tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, jadi tidak logis kalau terminal kayu beroperasi hanya berkapasitas maksimum 2000 m<sup>3</sup>/tahun sementara pengrajin yang harus dilayani untuk wilayah Semarang dan sekitarnya saja berjumlah ribuan.

---

<sup>9</sup> TPK Antara (Tempat Penimbunan Kayu Antara) adalah tempat untuk menampung Kayu Bulat (KB) atau Kayu Bulat Kecil (KBK) baik berupa logpond (di air) atau logyard (di darat), yang lokasinya di luar areal ijin IUPHHK/IPHHK/IPK/ILS dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang (P.55 ps.1 butir 23).

Jika rencana pembangunan terminal kayu akan mendasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah (Propinsi) Jawa Tengah harus mengambil kebijakan sesuai kewenangannya. Namun demikian, mengingat besarnya investasi yang harus dilakukan maka sebelum berinvestasi Pemprop tentu akan mempertimbangkan manfaat terminal kayu bagi daerah, baik secara finansial (secara langsung: PAD/retribusi, tidak langsung: pengaruhnya terhadap PDRB) maupun sosial antara lain penyerapan tenaga kerja atau *multiflier effect* yang dapat ditimbulkan.

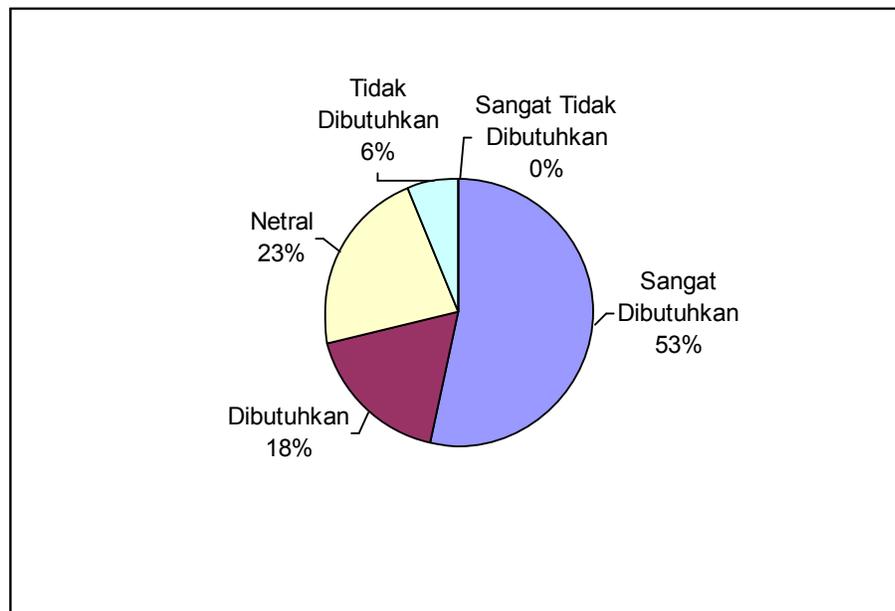
Ditinjau dari arahan lokasinya, pembangunan terminal terpadu dapat dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI). KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan Pemda Dati II yang bersangkutan (Keppres No. 98/1993). Beberapa lokasi yang disarankan dalam Laporan Studi Ditjen Industri Agro dan Kimia (2006) adalah berada di kawasan industri (Candi, Tugu, Brumbung, Kendal). Namun demikian, belum dilakukan kajian mendalam kesesuaian terminal kayu dengan kriteria KPI, yaitu (Anonim, 2003):

- a. Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya.
- b. Mendorong perkembangan kegiatan sektor dan ekonomi yang ada di sekitarnya.
- c. Tidak mengganggu fungsi lindung.
- d. Tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah.
- g. Meningkatkan kesempatan kerja.

#### 4.5 Kebutuhan Terminal Kayu

Jika melihat pendapat responden, maka mayoritas menyatakan bahwa pembangunan Terminal Kayu Terpadu (TKT) sangat dibutuhkan (53%) dan menyatakan dibutuhkan (18%), untuk menunjang keberlangsungan IPKM Jawa Tengah (Gambar 4.15). Sedangkan yang menyatakan sangat tidak dibutuhkan dan tidak dibutuhkan masing-masing hanya 2% dan 3%. Sisanya menyatakan bahwa ada atau tidak adanya TKT tidak berpengaruh terhadap usahanya (netral). Selanjutnya dari perhitungan skor dengan skala Likert (Lampiran 6) juga menunjukkan bahwa TKT berada pada tingkat dibutuhkan (bobot 77,65%).



Sumber: Data primer, diolah

**GAMBAR 4.15**  
**PENDAPAT RESPONDEN TENTANG KEBUTUHAN**  
**TERMINAL KAYU TERPADU**

Adanya perbedaan (pertentangan) mengenai kebutuhan terminal kayu antara pendapat responden sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.15 dengan hasil analisis menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Pendapat responden menunjukkan persepsi mereka bahwa permasalahan IPKM Jawa Tengah dapat diatasi dengan membangun terminal kayu, tanpa melihat bahwa produksi kayu dari sumbernya semakin terbatas. Hal ini diperkuat dengan alasan bahwa pasokan kayu kepada industri masih berlangsung dan kasus *illegal logging* dan *illegal trading* kayu sampai sekarang masih berlangsung pula. Dalam hal ini relevan apa yang dikemukakan Ketua Tetap Kompartemen Industri Kehutanan Kadin Jawa Tengah yang menyatakan bahwa:

*Terminal kayu diperlukan karena sampai sekarang data peredaran kayu tidak jelas, menurut data industri di daerah asal kayu juga kesulitan bahan baku kayu, tetapi mengapa banyak kayu yang keluar dari daerah tersebut?*

Namun tidak ada data yang menunjukkan berapa besar kayu yang keluar tersebut. Sementara data yang menunjukkan defisit bahan baku kayu terus diekspos berbagai kalangan.

Selanjutnya, jika melihat pendapat yang menyatakan terminal kayu tidak dibutuhkan maka yang menarik adalah pendapat dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari sisi produksi dan peredaran bahan baku kayu bulat serta industri primer hasil hutan kayu (IPHHK). Oleh karena itu, analisis tidak hanya melihat proporsi dibutuhkan atau tidaknya terminal kayu, melainkan perlu juga dilihat alasan dan fakta kebutuhannya. Lampiran 8 merangkum alasan sikap semua responden sebagai

*stakeholder* industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah terkait dengan kebutuhan terminal kayu.

Jika dihubungkan antara permasalahan mendasar IPKM, solusi atas permasalahan, fungsi dan kebutuhan TKT, maka dibangunnya TKT tidak akan menyelesaikan permasalahan mendasar yaitu defisit bahan baku kayu. TKT merupakan bagian dari sistem distribusi, sistem distribusi akan berjalan kalau ada barang yang akan didistribusikan. Di samping itu, secara finansial investasi untuk membangun terminal kayu tidak menarik bagi usaha.

Berdasarkan Laporan Kajian Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia (2006) yang mengacu pada estimasi kebutuhan biaya dan analisis biaya dari Masyarakat Industri Kayu (MIK) Jawa Tengah, diketahui bahwa:

- a. Untuk membangun Terminal Kayu seluas 10 Ha, dengan kapasitas 100.000 M<sup>3</sup> kayu dibutuhkan investasi sebesar Rp. 49.995.000.000,- (hampir 50 milyar rupiah).
- b. Dalam analisis biaya ditunjukkan bahwa keuntungan bersih hasil operasi adalah sebesar Rp. 450.000.000,- per tahun.

Dalam analisis tersebut belum memasukan beban biaya investasi, reinvestasi dan biaya pemeliharaan (gedung, mesin dan peralatan lain) serta biaya operasional mesin dan peralatan yang ada. Dengan demikian apabila tersedia dana untuk investasi tanpa bungapun, dengan estimasi umur teknis:

- Bangunan 20 tahun
- Mesin dan peralatan 20 tahun

Sudah pasti dapat dinyatakan tidak ekonomis. Untuk itu perlu studi kelayakan dengan rancangan kegiatan yang berbeda, artinya perlu di "arange" kembali.

Kebutuhan modal sangat besar, terutama:

- Investasi, untuk membangun 1 unit terminal kayu dengan kapasitas 100.000 M<sup>3</sup> diperlukan investasi hampir 50 milyar rupiah
- Pembelian kayu, sebagai "stock" atau persediaan, yang relatif tinggi Rp. 3.000.000,- per M<sup>3</sup>, sehingga untuk menyediakan kayu dalam volume besar (estimasi kebutuhan persediaan rata-rata Jawa Tengah 550.000 M<sup>2</sup> log), harus tersedia dana 165 milyar rupiah. Oleh karena itu harus dilakukan secara bertahap dan dibuat dalam skala yang sesuai dengan kapasitas peruntukan (pendekatan klaster).
- Estimasi keuntungan dari jasa pengolahan dan administrasi sebesar Rp. 800.000 per M<sup>3</sup> (Rp. 3.800.000,- – Rp. 3.000.000,-), atau sebesar 26.66 %, secara ekonomi kurang menarik bagi perusahaan.

Berdasarkan analisis finansial sederhana tersebut diketahui bahwa rencana pembangunan terminal kayu membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan manfaatnya secara ekonomi kurang menarik. Oleh karena itu rencana pembangunan TKT ditinjau dari berbagai aspek secara komprehensif. Berdasarkan analisis terhadap aspek yang telah diuraikan dari sub bab 4.1 – 4.4 dan telaahan data-data lainnya seperti telah diuraikan dalam Bab III, maka dapat diketahui tingkat kebutuhan pembangunan Terminal Kayu Terpadu dan kemungkinan realisasinya. Tabel IV.6 merangkum seluruh aspek yang dianalisis sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai dibutuhkan atau tidak dibutuhkannya pembangunan terminal kayu.

**TABEL IV.6**  
**KELAYAKAN/KEBUTUHAN TERMINAL DARI BERBAGAI ASPEK**

No	Aspek analisis	Hasil analisis
1	2	3
1	Permasalahan industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah serta solusinya	Empat permasalahan utama industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah adalah: (1) Kekurangan bahan baku, (2) Kebijakan dan iklim usaha yang kurang kondusif, dan (3) Kebijakan pemerintah yang tidak mantap dan (4) Kompetensi sumber daya manusia (SDM), teknologi serta kelembagaan dan sarana/prasarana. Oleh karena hal tersebut merupakan permasalahan mendasar, sementara itu solusi pembangunan Terminal Kayu Terpadu (TKT) memiliki bobot tidak mutlak atau kurang meyakinkan karena bobotnya 37,5%. Maka, pembangunan TKT bukan satu-satunya solusi yang harus ditempuh karena jika solusi tersebut dilakukan secara parsial maka semua bobotnya rendah. Dengan kata lain pembangunan TKT bukan jawaban mendasar terhadap permasalahan industri pengolahan kayu dan mebel (IPKM) Jawa Tengah. Dalam skala prioritas, secara parsial semua solusi dari bobot tertinggi sampai terendah masing-masing termasuk prioritas IV (solusi no. 1) dan lainnya prioritas V (Gambar 4.2). Artinya, secara parsial tidak ada solusi yang bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara simultan.
2	Proses pengolahan kayu	Kebutuhan bahan baku kayu setiap unit industri pengolahan kayu dan mebel yang kecil menimbulkan kesulitan tersendiri, karena para pemasok kayu lebih menyukai pembelian kayu dalam partai besar. Dari sudut pandang ini, keberadaan TKT untuk membantu IKM dibutuhkan karena TKT dapat melayani pembelian bahan baku kayu sesuai kebutuhan, baik dalam partai kecil atau bahkan eceran serta dalam partai besar.
3	Fungsi TKT	Konsep fungsi Terminal Kayu Terpadu (TKT) memberikan gambaran bahwa Terminal Kayu merupakan lembaga <i>super body</i> yang akan melampaui tugas pokok dan fungsi beberapa instansi atau institusi terkait yang telah ada. Di samping itu fungsi tersebut terlalu luas sehingga tidak akan efektif.
4	Pasokan dan permintaan bahan baku kayu (BBK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Defisit BBK bagi IPKM Jawa Tengah industri mencapai sebesar 4,35 juta m<sup>3</sup> (Gambar 4.4), defisit nasional mencapai &gt; 50 juta m<sup>3</sup>/tahun dan daerah yang dulu sebagai penghasil kayu utama telah mengalami defisit, serta defisit dunia sangat besar yaitu 744,17 juta m<sup>3</sup>/tahun. Dengan demikian, mengharapkan pasokan BBK bagi TKT dengan mengimpor akan sulit diperoleh dalam jumlah signifikan.</li> <li>- Jika pembangunan TKT diutamakan untuk menampung kayu dari luar Jawa, maka rencana pembangunannya perlu ditinjau kembali karena tidak sinkron dengan industri unggulan Jawa Tengah.</li> </ul>

**TABEL IV.6 (Lanjutan)**

1	2	3
5	Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pergerakan fisik kayu dari berbagai sumber ke terminal kayu kemudian didistribusikan ke industri, merupakan langkah yang akan menimbulkan biaya, baik biaya angkut maupun biaya bongkar-muat. Biaya angkut untuk jarak 0 – 20 km, Rp 22.000,- sampai Rp 35.000,- per m<sup>3</sup> tergantung kesepakatan antara pemilik kayu dengan perusahaan jasa angkutan. Untuk distribusi kayu di wilayah Semarang saja, bila kayu diangkut dari pelabuhan ke terminal kayu kemudian ke industri maka biaya angkut minimum menjadi Rp 44.000,-/m<sup>3</sup> (Gambar 4.6). Biaya angkut dan biaya bongkar muat di Terminal Kayu akan menjadi bagian dari harga kayu. Selain itu, disamping menimbulkan biaya tambahan, mekanisme terminal kayu secara fisik juga tidak praktis, kecuali terminal kayu juga satu lokasi dengan pelabuhan pendaratan.</li> <li>- Jika jumlah sebaran IPHHK dipertimbangkan sebagai faktor utama arahan lokasi rencana pembangunan Terminal Kayu Terpadu, maka selayaknya rencana pilot pembangunan fasilitas tersebut diarahkan ke daerah-daerah yang sangat tinggi atau tinggi jumlah unit IPHHK-nya yaitu Kab. Jepara atau Kab. Cilacap dan bukan di sekitar Kota Semarang (Gambar 4.7).</li> <li>- Jika faktor sebaran jumlah industri yang menggunakan kayu dari hutan tanaman, maka rencana pembangunan pembangunan terminal kayu dapat diarahkan kepada daerah yang paling tinggi industrinya menggunakan kayu dari hutan tanaman, baik jumlah atau kapasitas. Daerah yang memiliki jumlah unit industri yang menggunakan kayu dari hutan tanaman adalah Jepara (463 unit), Cilacap (367 unit) dan Brebes (220 unit). Sementara di Kota Semarang dan sekitarnya (Kendal, Kab. Semarang dan Demak) masing-masing terdapat 105, 121, 152 dan 1 unit. Sedangkan berdasarkan kapasitas produksinya, tiga daerah terbesar yang industri primernya menggunakan kayu tanaman adalah Temanggung (555.325 m<sup>3</sup>/tahun), Banjarnegara (361.310 m<sup>3</sup>/tahun) dan Cilacap (328.455 m<sup>3</sup>/tahun). Adapun kapasitas industri primer di Semarang dan sekitarnya (4 daerah) hanya berjumlah 160.798 m<sup>3</sup>/tahun. Peta pada Gambar 4.9 dan 4.10 menjelaskan secara lengkap sebaran industri tersebut.</li> <li>- Jika sebaran industri mebel sebagai arahan lokasi terminal kayu maka daerah dimana sebaran industri mebelnya dominan dapat dijadikan pertimbangan lokasi. Dalam hal ini sebaran klaster industri mebel layak dipertimbangkan sebagai arahan lokasi terminal kayu (Gambar 4.11). Dari peta terlihat bahwa Kota Semarang termasuk daerah yang memiliki klaster industri mebel, namun bukan yang utama.</li> <li>- Berdasarkan sebaran industrinya maka pembangunan TKT di Semarang kurang sesuai (Peta pada Lampiran 9).</li> </ul>

**TABEL IV.6 (Lanjutan)**

1	2	3
6	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengacu pada P.55 dan P.51 yang divisualisasikan dalam Gambar 4.14, terdapat peluang pembangunan terminal kayu yaitu pada unit TPK Antara. Akan tetapi jika terminal kayu identik dengan TPK Antara maka terminal hanya bisa melayani penjualan log/kayu bulat (tidak bisa melayani industri atau pengrajin mebel atau pengrajin kayu lainnya yang tidak memerlukan log). Dengan demikian, terminal kayu sama fungsinya sebagai pedagang perantara.</li> <li>- Jika terminal kayu dibuat terpadu dengan adanya fasilitas pengolahan (penggergajian, pengawetan dan pengeringan) dengan tujuan ingin melayani pembelian kayu oleh industri atau pengrajin yang tidak memerlukan kayu bulat, maka fungsi tersebut merupakan fungsi IPHHK. Berdasarkan Perpres No. 77/2007, Industri primer yang masih terbuka bagi penanaman modal adalah bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) atau dengan Ijin Khusus, yaitu Industri Kayu Gergajian Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 m<sup>3</sup>/Tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, jadi tidak logis kalau terminal kayu beroperasi hanya berkapasitas maksimum 2000 m<sup>3</sup>/tahun sementara pengrajin yang harus dilayani untuk wilayah Semarang dan sekitarnya saja berjumlah ribuan.</li> <li>- Jika rencana pembangunan terminal kayu akan mendasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah (Propinsi) Jawa Tengah harus mengambil kebijakan sesuai kewenangannya. Namun demikian, mengingat besarnya investasi yang harus dilakukan maka sebelum berinvestasi Pemprop tentu akan mempertimbangkan manfaat terminal kayu bagi daerah, baik secara finansial (secara langsung: PAD/retribusi, tidak langsung: pengaruhnya terhadap PDRB) maupun sosial antara lain penyerapan tenaga kerja atau <i>multiflier effect</i> yang dapat ditimbulkan.</li> <li>- Ditinjau dari arahan lokasinya, pembangunan terminal terpadu dapat dilakukan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) namun perlu dikaji lebih mendalam apakah TKT dapat memenuhi semua kriteria KPI tersebut.</li> </ul>
7	Finansial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila tersedia dana untuk investasi tanpa bungapun, dengan estimasi umur teknis: Bangunan, mesin serta dan peralatan 20 tahun. Sudah pasti dapat dinyatakan tidak ekonomis.</li> <li>- Estimasi keuntungan dari jasa pengolahan dan administrasi sebesar Rp. 800.000 per M<sup>3</sup> (Rp. 3.800.000,- – Rp. 3.000.000,-), atau sebesar 26.66 %, secara ekonomi kurang menarik bagi perusahaan.</li> </ul>

Sumber: Hasil analisis (2007)

## 4.6 Sintesis Terhadap Hasil Analisis

### 4.6.1 Kayu Dalam Mekanisme Pasar

Berdasarkan tipikalnya, kayu termasuk barang privat yaitu barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, dimana titik temu antara produsen dan

konsumen adalah mekanisme harga. Tingginya harga kayu merupakan akibat terbatasnya produksi kayu dari hutan, merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar dan mengikuti hukum ekonomi yaitu jika pasokan berkurang maka harga akan naik. Terbatasnya produksi mengakibatkan kelangkaan (*scarcity*) yang mengakibatkan adanya persaingan dalam memperoleh bahan baku kayu (*rivalrous consumption*) dan konsumsi/pembelian hanya dapat dilakukan oleh industri yang memiliki modal kuat (*excludable consumption*). Inilah karakteristik dari barang privat (*private good*) di mana pada kayu karakteristiknya seperti pada Tabel IV.7.

**TABEL IV.7**  
**KARAKTERISTIK KAYU SEBAGAI BARANG PRIVAT**

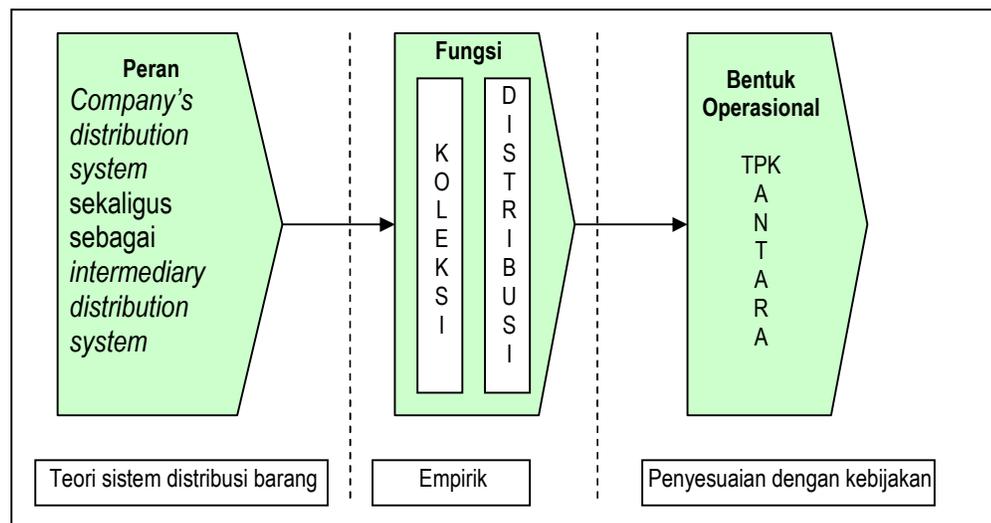
No	Karakteristik	Karakteristik Pada BBK
1	<i>Rivalrous consumption</i>	Terjadi persaingan untuk mendapatkan bahan baku kayu, dimana IKM kesulitan akses/kalah dalam persaingan dan pemodal kuat tetap memperoleh bahan baku kayu untuk industrinya.
2	<i>Excludable consumption</i>	Tingginya harga kayu menjadi faktor pembatas di industri. Industri yang memiliki modal kuat tetap mampu membeli bahan baku kayu meskipun dengan harga tinggi.
3	<i>Scarcity/depletability/finite</i>	Kelangkaan ditunjukkan dengan terjadinya kekurangan pasokan kayu bagi industri baik di tingkat regional, nasional & global.

Keterangan: IKM = Industri Kecil Menengah  
Sumber: Sintesis peneliti (2007)

#### 4.6.2 Terminal Kayu Dalam Sistem Distribusi

Jika terminal kayu berdiri maka secara fungsi utama yang dimiliki adalah sebagai kolektor dan distributor (Gambar 4.13). Hal tersebut sesuai dengan teori sistem jaringan distribusi barang yang dikemukakan Suwignjo (1998) sebagaimana telah digambarkan dengan skema pada Gambar 2.5. Di samping itu, jika mengacu pada kebijakan yang ada maka, fungsi distribusi tersebut dapat berbentuk TPK Antara dengan fungsi penyaluran komoditas terbatas dalam bentuk log dan tidak bisa menyalurkan kayu olahan yang diproses oleh terminal kayu.

Dalam teori sistem distribusi barang, terminal kayu dapat diperankan sebagai bagian dari sistem perusahaan distribusi. Terminal kayu merupakan *company's distribution system* karena dalam operasionalnya harus berupa perusahaan. Terminal kayu juga merupakan *intermediary distribution system* karena fungsinya sebagai perantara produsen bahan baku kayu dengan konsumen (industri atau pengguna bahan baku kayu). Untuk lebih jelasnya, hubungan tersebut digambarkan dengan bagan seperti pada Gambar 4.16.



Sumber: Sintesis Peneliti (2007)

**GAMBAR 4.16**  
**HUBUNGAN ANTARA FUNGSI TERMINAL KAYU**  
**DALAM SISTEM DISTRIBUSI BARANG DAN KEBIJAKAN**  
**PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU**

#### 4.6.3 Manajemen Rantai Pasokan

Berdasarkan analisis pasokan, kebutuhan dan distribusi kayu diketahui bahwa kayu sebagai bahan baku industri merupakan komoditas yang memiliki keterkaitan mulai dari produksinya di hutan sampai konsumen sebagai

penggunanya. Masalah yang timbul pada produksi akan berdampak pada aktifitas distribusi dan pengolahannya oleh industri.

Solusi yang tepat untuk menjaga keberlangsungan IPKM Jawa Tengah adalah jawaban terhadap permasalahan mendasar kelangkaan bahan baku, yaitu upaya untuk meningkatkan produksi kayu dari hutan dan upaya tersebut tiada lain adalah penanaman hutan. Selama tidak ada kaitan antara distribusi atau industri dengan kegiatan di hulu yaitu penanaman, maka upaya pengaturan sistem distribusi tidak akan efektif. Hal ini berarti rencana pembangunan Terminal Kayu Terpadu tanpa dikaitkan dengan upaya peningkatan produksi kayu, maka rencana tersebut tidak akan efektif.

Jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Healy & Ilbery (1996) tentang *backward and forward links*, maka kegiatan penanaman pohon di hutan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri merupakan bagian dari faktor yang termasuk *input*, oleh karena itu merupakan suatu *backward links* dalam IPKM. Tiadanya keterkaitan antara sistem distribusi atau industri dengan penanaman berarti memutuskan rantai pasokan kayu. Upaya pembangunan terminal kayu semestinya dikaitkan dengan upaya pembangunan hutan (penanaman). Hal inilah yang lebih realistis untuk dilakukan sebagaimana telah disadari oleh para pengagas terminal bahan baku kayu di Solo. Menurut Asmino Komda Solo, program pengamanan bahan baku yang sedang diupayakan adalah proyek percontohan terminal kayu. Salah satu upaya pengamanan tersebut adalah menggalakan penanaman jati jenis unggul nasional bersama petani hutan

rakyat yang dilakukan di sekitar Solo Raya antara lain di Wonogiri, Klaten dan Boyolali (Kompas, 2007d).

Menurut Hamilton (2007), kegiatan mengintegrasikan pemasok ke dalam pengembangan produk merupakan suatu inovasi dalam manajemen rantai pasokan. Jadi, upaya mengkaitkan program pembangunan terminal kayu dengan program penanaman pohon di areal hutan lebih memiliki fondasi teori yang kuat dalam manajemen rantai pasokan.

#### **4.6.4. Restrukturisasi Industri Kehutanan**

Meskipun IPKM sedang menghadapi permasalahan terbatasnya bahan baku, namun semua pihak sepakat bahwa industri ini masih memiliki prospek yang baik. Prospek yang baik tersebut akan menjadi kenyataan jika dimulai dengan langkah yang tepat.

Tabel IV.8 memperlihatkan dengan jelas bahwa ditinjau dari berbagai aspek, ternyata rencana pembangunan terminal kayu terpadu saat ini bukan merupakan solusi yang dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan IPKM Jawa Tengah. Jadi pendapat responden yang menyatakan pembangunan terminal kayu lebih didasarkan pada persepsi responden dan bukan pada data serta fakta. Sedangkan persepsi adalah suatu proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai hal yang terdapat dalam penginderaan seseorang (Wibowo 1988). Krech, dkk. dalam Budi (2005: 9) mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan faktor pribadi kemungkinan adalah keinginan untuk terlibat

dalam terminal kayu, mengingat terminal kayu bila berdiri, sebagaimana dikemukakan para pengagasnya, akan melibatkan berbagai pihak terkait industri pengolahan kayu dan mebel Jawa Tengah.

**TABEL IV.8**  
**PERTIMBANGAN POSITIF DAN NEGATIF PEMBANGUNAN**  
**TERMINAL KAYU**

No	Aspek	Hasil analisis	
		Positif	Negatif
1	Pasokan dan permintaan bahan baku kayu (BBK):		
	1.1. Berdasarkan data primer (permasalahan kekurangan BBK)		√
	1.2. Berdasarkan data sekunder (defisit BBK regional, nasional dan global)		√
2	Distribusi:		
	2.1. Biaya Angkut		√
	2.2. Sebaran IPHHK		√
	2.3. Sebaran penggunaan kayu alam/tanaman		√
	2.4. Sebaran klaster industri mebel	√	
	2.5. Saluran distribusi	√	√
3.	Fungsi dan Kebijakan:		
	3.1. Fungsi TKT	√	√
	3.2. Kebijakan		√
4	Finansial		√
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>9</b>

Sumber: Hasil sintesis (2007)

#### 4.6.4 Pengembangan IPKM

Mengingat masih prospektifnya IPKM, terutama industri mebel Jawa Tengah, berdasarkan hasil analisis terhadap data primer maupun sekunder, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak terkait adalah:

(1) Instansi Pemerintah:

- Diperlukan kebijakan baik dari pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota/Kabupaten untuk menjaga keberlangsungan industri kayu. Kebijakan

menyangkut harga dan legalitas bahan baku sehingga tidak menimbulkan *high cost*.

- *Law enforcement* oleh penegak hukum sesuai porsinya. Jangan sampai pelaku usaha yang sudah jelas-jelas legalitasnya dicari-cari kesalahannya, dicegat di jalan, pungutan liar, dll.
- Membuat transparansi regulasi terutama kebijakan yang memprioritaskan untuk kemudahan pasokan bahan baku.
- Perlu adanya regulasi yang kuat dan jelas dalam pengembangan industri kayu.
- Peninjauan/pengkajian kembali terhadap kebijakan yang dirasakan menghambat.
- Instansi terkait diharapkan mempermudah pengurusan administrasi (perijinan daftar ulang, dll).
- Perijinan sebaiknya memperhatikan atau harus sudah dikombinasikan dengan spesifikasi produk. Belajar dari pengalaman negara lain (China, Jepang) dimana industri telah terspesialisasi. Untuk satu produk, setiap komponen-komponennya dibuat oleh unit industri yang berbeda.
- Ada upaya sehingga harga bahan baku yang diterima industri stabil dan wajar.
- Departemen/Dinas Kehutanan harus merasa benar-benar bertanggungjawab terhadap ketersediaan bahan baku kayu. Departemen/Dinas Perindustrian terus-menerus melakukan pembinaan dan mengembangkan produk inovatif, contoh: seperti patung Asmat dulu.

- Sosialisasi bahan baku kayu alternatif yang terjamin ketersediaannya.
- Pembinaan dan pengembangan, berupa pembinaan teknis, bantuan pemasaran/akses pasar, teknologi dan SDM industri.

(2) Kalangan Industri/Asosiasi:

- Adanya spesialisasi produk dari masing-masing industri sehingga industri tetap kesinambungannya terjaga.
- Mengembangkan dan menjaga produk unggulan IPKM Jawa Tengah.
- Peningkatan efisiensi pengolahan di industri.
- Peningkatan citra dan kualitas produk. Lebih baik tidak menjual daripada mencampur produk berkualitas dengan yang tidak berkualitas.
- Melakukan inovasi produk dan telah berstandar.
- Melakukan promosi terus-menerus untuk membuka pasar.
- Perlu adanya satu bahasa (persepsi) yang sama dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan.
- Pemilik industri turut berperan aktif dalam pembangunan/penanaman hutan rakyat.

(3) Seluruh *stakeholder*:

- Masing-masing stakeholder mengambil perannya secara proporsional.
- Seluruh stakeholder perlu menyamakan persepsi mengenai permasalahan yang dihadapi industri permebelan.
- Mendorong berkembangnya klaster industri.
- Memacu penyediaan bahan baku kayu dalam jangka panjang melalui pembangunan (penanaman) baik di hutan rakyat maupun hutan negara.
- Menyeimbangkan rasio jumlah industri dengan pasokan bahan baku kayu sehingga terjadi *balance* antara *Supply* dan *Demand*.

## **BAB V** **P E N U T U P**

### **5.1 Kesimpulan**

Distribusi bahan baku kayu mulai dari hutan sampai ke industri/pengguna merupakan suatu mata rantai pasokan (*supply chain*) yang saling memiliki keterkaitan. Dalam sistem distribusi, terminal kayu merupakan infrastruktur yang dapat berfungsi sebagai kolektor dan distributor bahan baku kayu yang berperan sebagai *company's distribution system* sekaligus *intermediary distribution system* dengan bentuk operasional yang paling memungkinkan adalah TPK Antara. Sehingga fungsi terminal kayu secara fisik memiliki keterbatasan.

Adanya rencana untuk membangun Terminal Kayu Terpadu (TKT) lebih didasarkan pada sisi *demand* dimana industri sebagai pihak yang membutuhkan bahan baku. Padahal kurangnya pasokan bahan baku akibat berkurangnya produksi kayu dari hutan. Jika rencana TKT hanya berpijak pada sisi permintaan, maka pembangunannya tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi IPKM Jawa Tengah. Sehingga pembangunannya saat ini tidak dibutuhkan karena tidak dapat menjawab permasalahan utama defisit bahan baku kayu akibat semakin terbatasnya produksi kayu dari hutan. Dengan kata lain pembangunan TKT bukan jawaban mendasar terhadap permasalahan industri pengolahan kayu dan mebel (IPKM) Jawa Tengah. Selain itu juga berlawanan dengan arus utama pembangunan sumber daya hutan yaitu intensifikasi rehabilitasi hutan.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor (1) pasokan dan permintaan bahan baku kayu, (2) distribusi, (3) kebijakan dan (4) kebutuhan, ternyata bahwa rencana pembangunan TKT sebagai fasilitas penunjang IPKM Jawa Tengah, bukan merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan saat ini. Hal ini juga ditunjukkan oleh rendahnya bobot solusi yang hanya 37,5%. Artinya, pembangunan TKT bukan solusi yang harus ditempuh secara parsial melainkan harus dilakukan secara integral dengan solusi lain terutama dikaitkan dengan upaya pembangunan hutan tanaman. Untuk mendukung pasokan bahan baku kayu khususnya bagi industri kecil-menengah mebel, sebaiknya meningkatkan efektifitas saluran distribusi seperti warung kayu yang telah ada.

Kelangkaan bahan baku kayu sebaiknya menjadi momentum untuk sungguh-sungguh menghutankan kembali areal yang telah dieksploitasi. Jika saat ini aktifitas pembangunan hutan tanaman intensif dilakukan maka IPKM Jawa Tengah khususnya dan nasional pada umumnya tidak akan kekurangan bahan baku kayu. Pada situasi demikian adanya fasilitas yang mengatur distribusi dan tata niaga bahan baku kayu dalam bentuk terminal kayu terpadu akan efektif.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi permasalahan IPKM secara mendasar hanya bisa ditempuh melalui pembangunan hutan tanaman (penanaman pohon) untuk menghasilkan bahan baku kayu, baik di hutan negara maupun hutan hak (rakyat). Dana investasi yang ada untuk membangun Terminal Kayu Terpadu saat ini lebih tepat jika digunakan untuk membangun hutan.

2. Pada kondisi IPKM saat ini, untuk menunjang industri kecil/pengrajin dapat dioptimalkan sistem distribusi dan pasokan yang ada seperti warung kayu yang dimiliki Perhutani.
3. Mengingat keunggulan produk mebel Jawa Tengah adalah mebel dari kayu jati, hendaknya melakukan upaya menjual nilai produk, bukan sekedar menjual produk. Jati sebagai bahan baku kayu yang memiliki karakteristik istimewa, maka perlakuan terhadap jenis kayu tersebut mesti melalui proses yang benar, penggunaan bahan seefisien mungkin, dan tidak merusak citra.
4. Untuk mengurangi ketergantungan pada kayu jati, maka diversifikasi bahan baku kayu perlu terus disosialisasikan terus-menerus kepada para pelaku usaha industri kayu khususnya mebel.
5. Jika akan dibangun terminal kayu pada waktu yang akan datang, maka perlu dikaji ulang pembangunannya terutama disesuaikan dengan waktu terjadinya pasokan kayu optimal dan kesesuaian lokasi.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Oleh karena terbatasnya waktu, tenaga dan dana maka penelitian ini memiliki keterbatasan, baik substansi maupun teknis penelitian. Secara substansial, kajian tidak melakukan analisis finansial tersendiri. Aspek finansial yang dikemukakan merupakan hasil kajian Ditjen Industri Agro dan Kimia (2006).

Adapun secara teknis penelitian, terutama dalam pengambilan sampel, pemilihan responden hampir seluruhnya dilakukan di Semarang. Namun demikian, dengan *purposive sampling* dapat mengatasi keterbatasan tersebut karena responden dipilih dengan kriteria atau justifikasi tertentu.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Jamaludin Malik**, dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1970 di Cililin, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagai putra ketiga (tujuh bersaudara) dari Bapak Amin Al Aman dan Ibu Erah. Menikah tanggal 16 Agustus 1998 dengan Hj. Ratih T. Rentjani, SS dan dikaruniai tiga orang putri: Hasna Annida Zulfa (7 tahun), Farah Huwaida Qurrota Aini (6 tahun) dan Hanan Najya Millatina (1 tahun).

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Cililin, yaitu SDN Tanjung Jaya 1978 – 1984, SMPN Cihampelas 1984 – 1987 dan SMAN Cililin 1987 – 1990. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi ke Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diterima melalui USMI/PMDK (Undangan Seleksi Masuk IPB) dengan mengambil Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi Hasil Hutan yang diselesaikan pada tahun 1996 dengan gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut). Pernah bekerja di swasta pada sebuah perusahaan konsultan tahun 1997 – 1998, kemudian diterima sebagai PNS Departemen Kehutanan tahun 1998 dan aktif bekerja hingga sekarang. Saat ini Penulis bekerja sebagai Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Badan Litbang Kehutanan dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Muda bidang Teknologi Hasil Hutan. Penulis melakukan berbagai penelitian terkait teknologi kayu dan pemanfaatan hasil hutan lainnya, menulis pada jurnal dan media serta mengikuti berbagai forum ilmiah terkait hasil hutan dan industri kehutanan. Di samping itu, dari tahun 2003 sampai sekarang, penulis juga menjadi instruktur pada berbagai kursus/pelatihan pengolahan kayu (*woodworking*).

Pada Bulan September 2006, Penulis mendapat kesempatan melaksanakan tugas belajar S2 di MTPWK UNDIP dengan beasiswa dari Bappenas yang diselesaikan tepat waktu dengan predikat kelulusan Cum Laude dan Terbaik. Harapan setelah mengikuti pendidikan tersebut adalah dapat memberikan kemampuan analisis dan solusi permasalahan dengan pendekatan interdisiplin dan lokalitas.

Dari kegiatan survey dan interaksi dengan berbagai *stakeholder* industri pengolahan kayu dan mebel di Jawa Tengah selama penyusunan Tesis, diperoleh kesimpulan perlunya peningkatan sinergi antara lembaga penelitian dengan industri. Artinya semakin diperlukan hasil-hasil penelitian yang dapat langsung menjawab permasalahan di lapangan.